



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
BUPATI PESISIR SELATAN

Apt. RUDI HARIANSYAH, S.Si
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020**





LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020**



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
BUPATI PESISIR SELATAN





Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN





Hj. EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020 telah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yang merupakan Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir serta dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Barat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan dokumen dalam upaya menciptakan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan penyusunan LPPD ini adalah sebagai perwujudan kinerja Kepala Daerah dalam sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang baik, dan kepada segenap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam membangun Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik sesuai



dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

Melalui penyampaian LPPD ini diharapkan akan terlihat gambaran pelaksanaan, permasalahan dan solusi seluruh program dan kegiatan yang diamanatkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020, namun dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan ada beberapa program dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya *Refocusing* anggaran sebagai langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak pandemi tersebut. Mudah-mudahan segala upaya bersama yang telah dilakukan akan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang.

Painan, Maret 2021

BUPATI PESIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1.1
1.1 Penjelasan Umum	1.1
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	1.18
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1.30
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.1
A. Capaian Kinerja Makro	2.1
B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	2.2
2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	2.2
2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	2.41
2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2.47
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2.49
BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	3.1
A. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	3.1
3.1 Target Kinerja	3.3
3.2 Realisasi	3.3
B. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	3.5
C. Permasalahan dan Kendala	3.7
D. Saran dan Tindak Lanjut	3.7
BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	4.1
A. Urusan Pendidikan	4.1
1. Jenis Pelayanan Dasar	4.1
2. Target Pencapaian SPM	4.3
3. Realisasi	4.3
4. Alokasi Anggaran	4.5
5. Dukungan Personil	4.5
6. Permasalahan dan Solusi	4.5
B. Urusan Kesehatan	4.6
4.2.a Dinas Kesehatan	4.6
1. Jenis Pelayanan Dasar	4.6
2. Target Pencapaian SPM	4.7



3.	Realisasi	4.7
4.	Alokasi Anggaran	4.8
5.	Dukungan Personil	4.9
6.	Permasalahan dan Solusi	4.10
4.2.b	RSUD M. Zein Painan	4.11
1.	Jenis Pelayanan Dasar	4.11
2.	Target Pencapaian SPM	4.11
3.	Realisasi	4.11
4.	Alokasi Anggaran	4.11
5.	Dukungan Personil	4.11
6.	Permasalahan dan Solusi	4.11
C.	Urusan Pekerjaan Umum	4.59
1.	Jenis Pelayanan Dasar	4.59
2.	Target Pencapaian SPM	4.59
3.	Realisasi	4.60
4.	Alokasi Anggaran	4.60
5.	Dukungan Personil	4.61
6.	Permasalahan dan Solusi	4.62
D.	Urusan Perumahan Rakyat	4.64
1.	Jenis Pelayanan Dasar	4.64
2.	Target Pencapaian SPM	4.64
3.	Realisasi	4.64
4.	Alokasi Anggaran	4.65
5.	Dukungan Personil	4.68
6.	Permasalahan dan Solusi	4.68
E.	Urusal Sosial	4.70
1.	Jenis Pelayanan Dasar	4.70
2.	Target Pencapaian SPM	4.72
3.	Realisasi	4.73
4.	Alokasi Anggaran	4.73
5.	Dukungan Personil	4.74
6.	Permasalahan dan Solusi	4.74
F.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.74
4.6.a	Satuan Polisi PP dan Damkar	4.75
1.	Jenis Pelayanan Dasar	4.75
2.	Target Pencapaian SPM	4.76
3.	Realisasi	4.76



	4.	Alokasi Anggaran	4.76
	5.	Dukungan Personil	4.79
	6.	Permasalahan dan Solusi	4.79
	4.6.b	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.81
	1.	Jenis Pelayanan Dasar	4.82
	2.	Target Pencapaian SPM	4.83
	3.	Realisasi	4.88
	4.	Alokasi Anggaran	4.89
	5.	Dukungan Personil	4.91
	6.	Permasalahan dan Solusi	4.92
	G.	Program dan Kegiatan	4.93
BAB	V	PENUTUP	5.1





BAB 1

PENDAHULUAN

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

1.1.1.a Undang Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 serta Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan



Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat pada pasal 1 angka 9 bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

1.1.1.b Data Geografis Wilayah

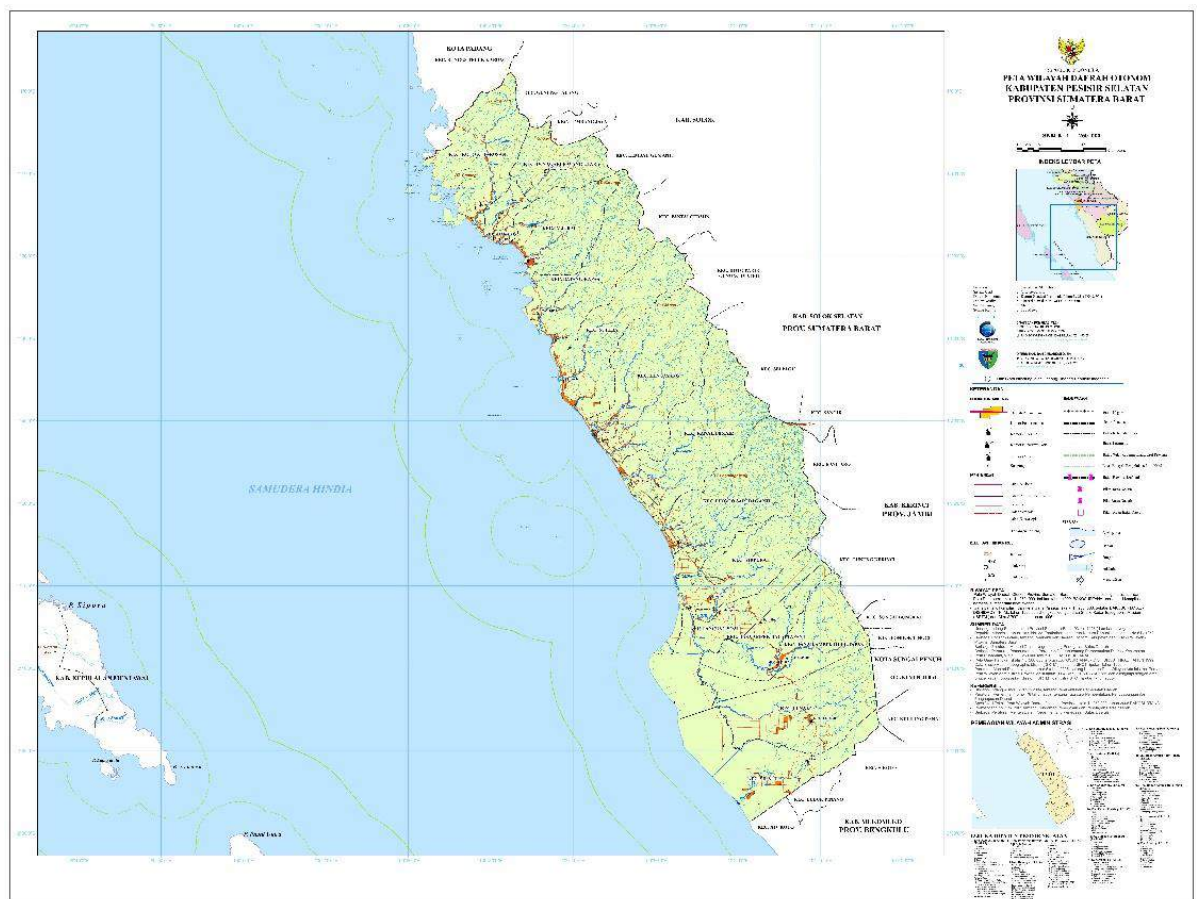
Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis terletak pada garis $0^{\circ}57'31,21''$ - $2^{\circ}28'42,32''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}17'48,64''$ - $101^{\circ}17'34,3''$ Bujur Timur. Luas daratan $\pm 6.049,33$ km², memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai ± 234 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Padang.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 47 buah pulau serta dialiri sebanyak 23 sungai besar dengan 14 anak sungai. Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 23° C hingga 32° C disiang hari dan 20° C 28° C di malam hari

dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm perbulan. Kota Painan sebagai ibukota kabupaten berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan untuk kota kecil lain pada umumnya terletak pada lokasi yang rendah kecuali daerah Asam Kumbang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berada pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 1.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Kota Painan sebagai ibukota kabupaten berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan untuk kota kecil lain pada umumnya terletak pada lokasi yang rendah kecuali daerah Asam Kumbang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berada pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Ketinggian Beberapa Tempat dari Permukaan Laut
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	*Tinggi Wilayah (mdpl) <i>Altitude (m a.s.l)</i>	Jarak ke Ibukota Kabupaten <i>Distance to the Capital of Regency</i>
(1)	(2)	(3)
Silaut	14	186
Lunang	30	171
Basa Ampek Balai Tapan	25	135
Ranah Ampek Hulu Tapan	28	131
Pancung Soal	15	111
Airpura	39	101
Linggo Sari Baganti	7	91
Ranah Pesisir	4	74
Lengayang	2	55
Sutera	3	39
Batang Kapas	5	19
IV Jurai	3	4
Bayang	4	12
IV Nagari Bayang Utara	60	25
Koto XI Tarusan	3	10
Pesisir Selatan	0 - 1000	

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2021

1.1.1.c Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan jumlah penduduk tahun 2020 tercatat 514.444 jiwa yang terdiri dari 258.790 laki-laki dan 255.654 perempuan. Sementara menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 tercatat 504.418 jiwa yang terdiri dari 253.854 laki-laki dan 250.564 perempuan. Dari dua sumber data tersebut terdapat perbedaan sebanyak 10.026 jiwa atau 1,95 persen. Perbedaan data tersebut disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan dalam pendataan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 dan 1.3 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Penduduk	
		Laki – Laki		Perempuan			
		N (jiwa)	(%)	N (jiwa)	(%)	N (jiwa)	(%)
1	Pancung Soal	13.490	2,6	13.142	2,6	26.632	5,1
2	Ranah Pesisir	17.072	3,3	17.360	3,4	34.432	6,9
3	Lengayang	31.309	6	31.097	6,1	62.406	12,5
4	Batang Kapas	18.679	3,6	18.670	3,7	37.349	7,4
5	IV Jurai	26.069	5	25.913	5,1	51.982	10
6	Bayang	21.613	4,2	21.788	4,3	43.401	8,5
7	Koto XI Tarusan	27.109	5,2	26.789	5,2	53.898	10,6
8	Sutera	29.074	5,6	28.515	5,6	57.589	11
9	Linggo Sari Baganti	25.332	4,9	24.817	4,9	50.149	9,7
10	Lunang	11.308	2,2	10.856	2,1	22.164	4,2
11	Basa Ampek Balai Tapan	7.992	1,5	7.931	1,6	15.923	3,1
12	IV Nagari Bayang Utara	4.186	0,8	4.273	0,8	8.459	1,7
13	Airpura	9.568	1,8	9.218	1,8	18.786	3,4
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	8.028	1,6	7.740	1,5	15.768	2,9
15	Silaut	7.961	1,5	7.545	1,5	15.506	2,9
Total Kabupaten		258.790	50	255.654	50	514.444	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
	(2)	(3)	(4)
0–4	21 999	20 878	42 877
5–9	21 565	20 416	41 981
10–14	23 448	22 069	45 517
15–19	23 850	21 893	45 743
20–24	22 323	21 047	43 370
25–29	20 294	18 957	39 251
30–34	19 573	18 507	38 080
35–39	18 131	18 194	36 325
40–44	17 584	17 749	35 333
45–49	15 399	15 409	30 808
50–54	13 937	14 306	28 243
55–59	10 913	12 210	23 123
60–64	9 731	11 038	20 769
65–69	7 409	7 809	15 218
70–74	4 519	5 114	9 633
75+	3 179	4 968	8 147
Pesisir Selatan	253 854	250 564	504 418



Sumber : BPS, Buku Pesisir dalam Angka, 2021

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, menurut data Badan Pusat Statistik yaitu wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bayang dengan kepadatan rata-rata 521 jiwa/Km² dan Kecamatan Silaut 33 jiwa/Km² dengan kepadatan penduduk paling rendah. Hal Ini dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
		Menurut data Disdukcapil	Menurut data BPS
1	Silaut	33,24	33
2	Lunang	48,58	49
3	Basa Ampek Balai Tapan	84,94	83
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	55,92	55
5	Pancung Soal	48,65	49
6	Airpura	49,42	48
7	Linggo Sari Baganti	89,93	88
8	Ranah Pesisir	61,22	60
9	Lengayang	98,59	96
10	Sutera	101,07	98
11	Batang Kapas	134,57	131
12	IV Jurai	141,18	138
13	Bayang	536,34	521
14	IV Nagari Bayang Utara	34,91	34
15	Koto XI Tarusan	123,23	121
Rata-Rata		85,04	83

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020 & BPS Pesisir Selatan Dalam Angka 2021

Berdasarkan struktur usia, menurut Badan Pusat Statistik komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang produktif (range usia 20 s/d 54 tahun) hanya 251.410 jiwa (49,84 persen). Sementara usia yang di anggap tidak produktif berjumlah 253.008 jiwa (50,16 persen). Dan Menurut Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang produktif (range usia 20 s/d 54 tahun) hanya 250.784 jiwa (48,8 persen). Sementara usia yang di anggap tidak produktif berjumlah 263.660 jiwa (51,4



persen), untuk lebih jelasnya komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel 1.5 dan 1,6 berikut:

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	21 999	20 878	42 877
5–9	21 565	20 416	41 981
10–14	23 448	22 069	45 517
15–19	23 850	21 893	45 743
20–24	22 323	21 047	43 370
25–29	20 294	18 957	39 251
30–34	19 573	18 507	38 080
35–39	18 131	18 194	36 325
40–44	17 584	17 749	35 333
45–49	15 399	15 409	30 808
50–54	13 937	14 306	28 243
55–59	10 913	12 210	23 123
60–64	9 731	11 038	20 769
65–69	7 409	7 809	15 218
70–74	4 519	5 114	9 633
75+	3 179	4 968	8 147
Pesisir Selatan	253 854	250 564	504 418

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka tahun 2021

Tabel 1.6
Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Kelompok Umur	Penduduk					
		Laki – Laki		Perempuan		Jumlah	(%)
		N (jiwa)	(%)	N (jiwa)	(%)		
1	00-04	19.148	3,7	17.734	3,5	36.882	7,2
2	05-09	24.608	4,8	22.667	4,4	47.275	9,2
3	10-14	25.490	4,9	23.905	4,7	49.395	9,6
4	15-19	25.511	4,9	23.809	4,7	49.320	9,6
5	20-24	23.914	4,6	22.736	4,4	46.650	9,1
6	25-29	19.022	3,7	17.511	3,4	36.533	7,1
7	30-34	17.794	3,4	16.936	3,3	34.730	6,8
8	35-39	18.584	3,6	18.690	3,7	37.274	7,2
9	40-44	18.348	3,5	18.257	3,6	36.605	7,1
10	45-49	15.386	3	15.788	3,1	31.174	6,1

No.	Kelompok	Penduduk					
11	50-54	13.687	2,6	14.131	2,8	27.818	5,4
12	55-59	10.657	2,1	12.236	2,4	22.893	4,5
13	60-64	10.354	2	12.155	2,4	22.509	4,4
14	65-69	7.777	1,5	8.086	1,6	15.863	3,1
15	70-74	4.316	0,8	4.908	1	9.224	1,8
16	> 75	4.194	0,8	6.105	1,2	10.299	2
Total Kabupaten		258.790	50	255.654	50	514.444	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pesisir Selatan menurut data Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil adalah 152.321 KK. Jumlah KK terbanyak berada di Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 18.821 KK, dan yang paling sedikit berada pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 2.644 KK. Untuk lebih jelasnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7
Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Keluarga	
		N (KK)	(%)
1	Pancung Soal	7.309	4,7
2	Ranah Pesisir	10.830	7,1
3	Lengayang	18.821	12,3
4	Batang Kapas	11.317	7,4
5	IV Jurai	15.486	10,1
6	Bayang	13.070	8,5
7	Koto XI Tarusan	15.428	10,1
8	Sutera	16.608	10,9
9	Linggo Sari Baganti	15.115	9,9
10	Lunang	6.623	4,3
11	Basa Ampek Balai Tapan	4.590	3,0
12	IV Nagari Bayang Utara	2.644	1,7
13	Airpura	5.319	3,4
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	4.400	2,8
15	Silaut	4.761	3,1
Total Kabupaten		152.321	100

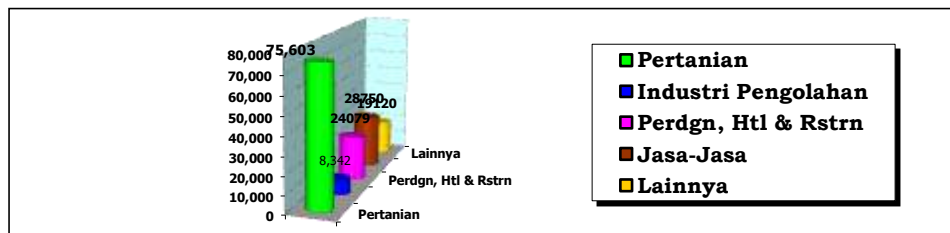
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Sumber utama perekonomian masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan berada pada sektor agraris yang meliputi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sektor agraris ini belum sepenuhnya diolah dengan penerapan teknologi yang maju, sebagian besar



masih diolah secara tradisional. Untuk lebih jelasnya, komposisi masyarakat berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Komposisi Masyarakat berdasarkan Mata Pencaharian
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Menurut komposisi penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, tamat SMA/Sederajat dengan jumlah 113.412 jiwa atau 33,73 persen. Kemudian diikuti dengan tamat Sekolah Dasar atau lebih rendah sebanyak 110.691 jiwa atau 32,92 persen. Komposisi penduduk menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8
Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Sekolah Dasar/Lebih Rendah	110.691	32,92
2	SLTP	77.113	22.93
3	SLTA	113.412	33,73
4	Perguruan Tinggi	35.028	10,42
Total		336.244	100.0

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2021

Menurut komposisi penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja menurut Golongan Umur di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, golongan umur 25-29 tahun dengan jumlah 39.251 jiwa. Kemudian diikuti dengan golongan umur 30-34

tahun sebanyak 36.080 jiwa atau 24,35 persen. Komposisi penduduk menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9
Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	15-19	23.850	21.893	45.743
2	20-24	22.323	21.047	43.370
3	25-29	20.294	18.957	39.251
4	30-34	19.573	18.507	38.080
5	35-39	18.131	18.194	36.325
6	40-44	17.584	17.749	35.333
7	45-49	15.399	15.409	30.808
8	50-54	13.973	14.306	28.279
9	55-59	10.913	12.210	23.123
10	60 +	24.838	28.929	53.767
Total		186.878	187.201	374.079

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2021

Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan masih relatif rendah. Namun berdasarkan indikator yang ada, terjadi kecenderungan peningkatan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta indek pembangunan manusia seperti dapat dilihat pada tabel 1.10.

Tabel 1.10
Data Perkembangan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	69,96	70,11	70,23	70,45	70,73
Angka Harapan Lama Sekolah	13,04	13,05	13,06	13,30	13,31
Rata-rata lama sekolah	8,11	8,12	8,13	8,14	8,25
IPM	68,07	68,39	68,74	69,40	70,08

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2020



1.1.1.d **Jumlah Kecamatan dan Desa/Nagari/Kelurahan di Kabupaten Pesisir Selatan**

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan (pemekaran 3 Kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 Nagari (pemekaran Nagari tahun 2011), dan 480 Kampung dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Lengayang 632,96 km dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bayang 80,92 km. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.11 dan 1.12 berikut:

Tabel 1.11
Jumlah Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km)	(%)
1	Silaut	Silaut	466.45	7.71
2	Lunang	Lunang	456.73	7.55
3	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	187.46	3.10
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	281.46	4.65
5	Pancung Soal	Inderapura	547.41	9.05
6	Airpura	Tamuan	380.10	6.28
7	Linggo Sari Baganti	Air Haji	557.66	9.22
8	Ranah Pesisir	Balai Selasa	562.44	9.30
9	Lengayang	Kambang	632.96	10.46
10	Sutera	Surantih	569.81	9.42
11	Batang Kapas	Pasar Kuok	277.54	4.59
12	IV Jurai	Salido	368.19	6.09
13	Bayang	Pasar Baru	80.92	1.34
14	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	242.33	4.01
15	Koto XI Tarusan	Nanggalo	437.37	7.23
Total Kabupaten			6.049,33	100

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2021

Tabel 1.12
Jumlah Desa/Kelurahan/Nagari dari tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan Subdistrict	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Silaut	10	10	10	10	10
Lunang	10	10	10	10	10
Basa Ampek Balai Tapan	10	10	10	10	10
Ranah Ampek Hulu Tapan	10	10	10	10	10
Pancung Soal	10	10	10	10	10
Airpura	10	10	10	10	10
Linggo Sari Baganti	16	16	16	16	16
Ranah Pesisir	10	10	10	10	10
Lengayang	9	9	9	9	9
Sutera	12	12	12	12	12
Batang Kapas	9	9	9	9	9
IV Jurai	20	20	20	20	20
Bayang	17	17	17	17	17
IV Nagari Bayang Utara	6	6	6	6	6
Koto XI Tarusan	23	23	23	23	23
Pesisir Selatan	182	182	182	182	182

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2021

1.1.1.e Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

a. Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang memimpin suatu daerah otonom dalam hal ini Bupati, maka diperlukan adanya perangkat daerah. Perangkat daerah adalah lembaga atau badan pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perangkat daerah antara lain terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah (OPD), lembaga teknis daerah, kecamatan. hal ini dapat dilihat pada tabel 1.13 berikut:

Tabel 1.13
Jumlah dan Nama Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020

No.	Perangkat Daerah	Alamat	Ket
1.	Sekretariat Daerah	Painan	
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Painan	
3.	Inspektorat Daerah	Painan	
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Painan	
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Painan	



	Daya Manusia		
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Painan	
7.	Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Sago	
8.	Badan pendapatan	Painan	
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Painan	
10.	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Painan	
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Painan	
12	Dinas Kesehatan	Painan	
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Painan	
14	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Painan	
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Painan	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sago	
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Painan	
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Painan	
19	Dinas Pangan	Painan	
20	Dinas Lingkungan Hidup	Painan	
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Painan	
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Painan	
23	Dinas Perhubungan	Sago	
24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Painan	
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	Painan	
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Salido	
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Painan	
28	Dinsa perumahan, Permukiman Rakyat dan Pertanahan	Painan	
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Painan	
30	RSUD Dr.M.Zein Painan	Painan	
31	Kantor Camat Koto XI Tarusan	Tarusan	
32	Kantor Camat Bayang	Ps.Baru Bayang	
33	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	
34	Kantor Camat IV Jurai	Salido	
35	Kantor Camat Batang Kapas	Batang Kapas	
36	Kantor Camat Sutera	Surantih	
37	Kantor Camat Iengayang	Kambang	
38	Kantor Camat Ranah Pesisir	Balai Selasa	
39	Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Air Haji	
40	Kantor Camat Pancung Soal	Indrapura	



41	Kantor Camat Airpura	Tamuan	
42	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	
43	Kantor Camat Basa Ampek hulu Tapan	Tapan	
44	Kantor Camat Lunang	Lunang	
45	Kantor Camat silaut	Silaut	

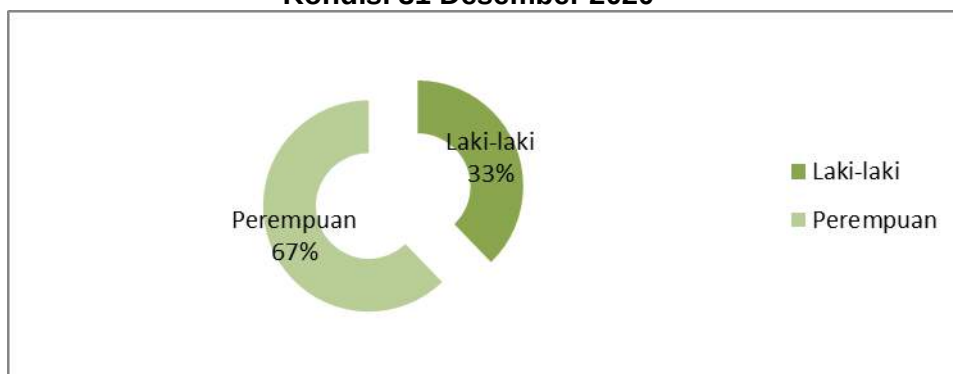
a. Pegawai Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kondisi 31 Desember 2020 berjumlah sebanyak 6.506 yang ditempatkan pada 45 Organisasi Perangkat Daerah. Dari 6.506 orang tersebut terdiri atas 2.159 orang Laki-Laki dan 4.347 perempuan dengan persentase jumlah PNS perempuan lebih banyak daripada PNS laki-laki yakni dengan perbandingan 66,81% dan 33,18%. Perbandingan PNS per jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel di bawah :

Tabel 1.14
Data PNS Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Kondisi 31 Desember 2020

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Laki-Laki	2.159	33,18%.
2	Perempuan	4.347	66,81%
	JUMLAH	6.506	100,00%

Gambar 1.3
Data PNS Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Kondisi 31 Desember 2020

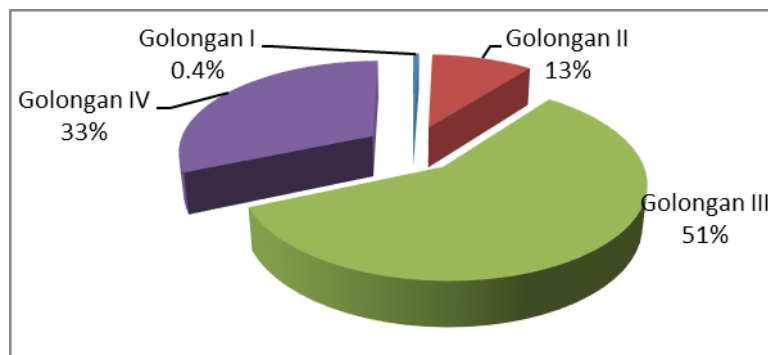


Dari 6.506 orang tersebut terbagi atas Golongan I sebanyak 27 orang, Golongan II sebanyak 893 orang, Golongan III sebanyak 3.378 orang dan Golongan IV sebanyak 2.208 orang. Sebaran PNS per Golongan dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah :

Tabel 1.15
Data PNS Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Golongan
Kondisi 31 Desember 2020

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	27	0.41%
2	Golongan II	893	13,72%
3	Golongan III	3.378	51,92%
4	Golongan IV	2.208	33,93%
	JUMLAH	6.506	100,00%

Gambar 1.4
Data PNS Kabupaten pesisir Selatan Berdasarkan Golongan
Kondisi 31 Desember 2020



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten sangat kekurangan PNS Golongan I yang biasanya bertugas sebagai sopir atau pengantar surat. Kekurangan ini disebabkan juga karena sebagian besar PNS Golongan I telah mengikuti ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat. Persentase terbanyak PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah PNS Golongan III yang biasanya merupakan pejabat pengawas dan pelaksana dengan persentase sebesar 51,92%.

Dari 6.506 orang tersebut terbagi atas lulusan SD sebanyak 11 orang, lulusan SLTP sebanyak 46 orang, SLTA sebanyak 833 orang, Diploma sebanyak 1.252 orang, D4/S1 sebanyak 3.970, Strata 2 sebanyak 394 orang dan Strata 3 sebanyak 0 orang.

Persentase terbanyak yakni lulusan D4/S1 dengan jumlah 3.970 orang atau 61,02% dari jumlah PNS Kabupaten Pesisir Selatan. Itu artinya dari tingkat pendidikan PNS di Pesisir Selatan cukup berpendidikan dengan persentase lulusan SMP kebawah hanya 0.87% dari total pegawai. Sebarannya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 1.16
Data PNS Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
Kondisi 31 Desember 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SD	11	0.16%
2	SLTP	46	0.7%
3	SLTA	833	12.8%
4	DIPLOMA	1.252	19,24%
5	DIPLOMA IV/S1	3.970	61.02%
6	STRATA 2	394	6,05%
	JUMLAH	6.506	100,00%

Dari 6.506 orang, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 656 orang PNS. Sebarannya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah:

Tabel 1.17
Data PNS Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Eselon
Kondisi 31 Desember 2020

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	II	30	3	33
2	III	119	38	157
3	IV	256	210	466
	JUMLAH	405 (61,73%)	251 (38,26%)	656

1.1.1.f Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.18
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember 2020

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN	1.698.028.198.430,00	1.630.555.826.351,45	96,03
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	152.636.474.688,00	133.652.411.809,45	87,56
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	28.949.287.406,00	20.454.008.648,00	70,65
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	10.793.229.391,00	3.096.510.273,00	28,69
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.632.288.482,00	9.632.288.482,00	100,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	103.261.669.409,00	100.469.604.406,45	97,30
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.132.202.448.576,00	1.105.649.823.074,00	97,65
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.975.499.938,00	13.289.192.614,00	57,84
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	792.358.743.000,00	784.053.203.000,00	98,95
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	316.868.205.638,00	308.307.427.460,00	97,30
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	413.189.275.166,00	391.253.591.468,00	94,69
4.3.1.	Pendapatan Hibah	139.113.946.095,00	120.041.802.226,00	86,29
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	61.724.300.071,00	58.860.760.242,00	95,36
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	212.351.029.000,00	212.351.029.000,00	100,00
5.	BELANJA	1.704.269.461.248,61	1.614.617.483.234,17	94,74
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.053.582.361.124,78	1.022.491.190.775,80	97,05
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	688.220.167.932,52	673.800.435.343,00	97,90
5.1.2.	BELANJA BUNGA	457.290.882,00	170.241.442,00	37,23
5.1.4.	BELANJA HIBAH	61.700.181.085,00	60.273.631.085,00	97,69
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	950.000.000,00	81.500.000,00	8,58
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	4.677.359.196,46	886.215.694,00	18,95

5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	250.965.350.578,80	250.843.286.593,80	99,95
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	46.612.011.450,00	36.435.880.618,00	78,17
5.2.	BELANJA LANGSUNG	650.687.100.123,83	592.126.292.458,37	91,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	123.740.907.856,00	119.745.591.392,37	96,77
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	237.933.405.106,83	210.446.068.509,00	88,45
5.2.3.	BELANJA MODAL	289.012.787.161,00	261.934.632.557,00	90,63
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.241.262.818,61)	15.938.343.117,28	(255,37)
6.	PEMBIAYAAN	6.241.262.818,61	5.335.886.255,61	85,49
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.950.207.818,61	16.044.831.255,61	94,66
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16.950.207.818,61	16.044.831.255,61	94,66
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.708.945.000,00	10.708.945.000,00	100,00
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	4.708.945.000,00	4.708.945.000,00	100,00
6.2.3.02.	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	4.708.945.000,00	4.708.945.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	6.241.262.818,61	5.335.886.255,61	85,49
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	21.274.229.372,89	-

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

- 1) Sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai.

- 2) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta pelayanan publik yang prima.
- 3) Memantapkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu, Memobilisasi kemampuan masyarakat dan lembaga pada masa krisis dengan tujuan utama meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana, serta Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis dengan tujuan utama melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana.
- 4) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkala dengan Indikator Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu dan Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Berkualitas dengan Indikator Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Hasil Penilaian AKIP.
- 5) Meningkatnya akses pendidikan, Meningkatnya mutu pendidikan, Meningkatnya jumlah seni budaya lokal yang direvitalisasi dan Meningkatnya benda cagar budaya yang direvitalisasi.
- 6) Peningkatan Target dan Realisasi Umur Harapan Hidup dari tahun ke tahun.
- 7) Menurunkan persentase angka kecelakaan pertahun.
- 8) Jumlah Produksi Perikanan menurun karena adanya wabah corona (covid 19) yang berdampak kepada perekonomian masyarakat dan faktor cuaca.

- 9) Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB dimana Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan peringkat Baik.
- 10) Peningkatan mutu genetika ternak tiap tahun dan Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis dari tahun sebelumnya.
- 11) Menurunkan tingkat pengangguran, pemenuhan hak-hak pekerja dan peningkatan kemandirian masyarakat transmigran.
- 12) Pencapaian skor pola pangan harapan (pph) Tahun 2020.
- 13) Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB, Produktivitas padi per hektar, Cakupan Bina Kelompok Pertanian.
- 14) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Nagari, Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari.
- 15) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), Penetapan Objek Pemeriksaan, Jadwal dan besaran anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan Pengoptimalan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi

Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021 dan merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMAIS DAN SEJAHTERA”**



Makna Visi tersebut adalah:

- Mandiri** : Berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- Unggul** : Masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- Agamais** : Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 dijabarkan dalam beberapa Misi yaitu:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Strategi pembangunan daerah pada tahun 2020 disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu :

Tabel 1.19
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Tahun 2016-2021

Misi 1	
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah. 3. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 5. Mempercepat dan memperdekat pelayanan bagi masyarakat. 6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar.	1. Mempertahankan opini BPK 2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 3. Menciptakan perencanaan yang partisipatif, aplikatif dan terintegrasi. 4. Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan fungsi perangkat daerah 5. Meningkatkan standar kualitas pelayanan di seluruh bidang 6. Mengupayakan pemekaran kabupaten, kecamatan dan nagari 7. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar serta rujukan 8. Meningkatkan upaya pencegahan penularan penyakit melalui promosi budaya hidup sehat 9. Memperluas akses dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah 10. Mengembangkan pendidikan non formal dan informal 11. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 12. Menyediakan bantuan beasiswa SMA dan Perguruan Tinggi
Misi 2	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata. 2. Membangun jaringan irigasi baru dan / atau peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang sudah. 3. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya air dan sumber energi baru terbarukan 4. Meningkatkan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah 5. Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih 6. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai 7. Mengembangkan transportasi dan jaringan komunikasi, 8. Melakukan penanganan serta pengurangan resiko bencana 9. Melaksanakan penataan kawasan kumuh perkotaan	1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan 2. Membangun dan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada serta ditunjang dengan meningkatkan pengelolaan sistim irigasi partisipatif 3. Memanfaatkan sumber daya air dan sumber energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat 4. Meningkatkan akses layanan air limbah domestik dan non domestik, 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan limbah 6. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum 7. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan 8. Menyediakan fasilitas terminal yang layak 9. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan 10. Mengembangkan jaringan transportasi 11. Mengembangkan jaringan komunikasi 12. Memantapkan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana 13. Meningkatkan pembangunan perumahan dan pemukiman
Misi 3 Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Melakukan penguatan peran ulama, niniak mamak, bundo kanduang, cendikiawan dan generasi muda dalam pengembangan dan penerapan nilai-nilai ABS-SBK 2. Melakukan penguatan peran lembaga adat dan agama 3. Mengembangkan pusat budaya lokal	1. Merevitalisasi penerapan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat 2. Meningkatkan implementasi budaya pendidikan karakter sebagai muatan lokal 3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, pemangku adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, 4. Meningkatkan pelaksanaan event-event keagamaan, 5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, 6. Meningkatkan event-event seni dan budaya 7. Meningkatkan cagar budaya.

Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan menerapkan teknologi tepat guna 2. Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan 3. Mengembangkan sentra industri pengolahan dan pusat perdagangan lokal 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan	1. Melakukan penguatan agribisnis hulu (up stream agribusiness) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian, pupuk, bibit dan lain-lain 2. Mengembangkan usaha tani/pertanian primer (on farm agribusiness) yang mencakup usaha: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan 3. Merevitalisasi sentra IKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk 4. Membangun sentra IKM 5. Merevitalisasi pasar tradisional 6. Membina kelembagaan koperasi dan UMKM 7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan koperasi dan UMKM dengan lembaga ekonomi lainnya. 8. Meningkatkan sarana penunjang pariwisata 9. Memperluas jaringan promosi dan pemasaran wisata 10. Mengembangkan industri penunjang pariwisata 11. Meningkatkan kapasitas pelaku jasa wisata
Misi 5 Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengurangan gangguan trantibmastibum, kejahatan dan kriminalitas 2. Memperkuat peran kelembagaan adat dan keagamaan dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat berolahraga. 4. Memperkuat kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah yang responsif	1. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam mengurangi trantibmastibum, kejahatan dan kriminalitas 2. Meningkatkan peran LKAAM, KAN, dan MUI dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang 3. Memasyarakatkan olahraga 4. Meningkatkan kualitas atlit dan pelatih 5. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga 6. Melakukan penguatan kelembagaan dan jaringan serta pembuatan regulasi daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak-hak dasar

terhadap HAM 5. Mengembangkan pendidikan politik berbasis kearifan lokal.	7. Meningkatkan pemahaman kelembagaan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan 8. Meningkatkan peran masyarakat sipil 9. Meningkatkan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan.
--	---

Sumber : RPJMD 2016-2021, tahun 2020

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020 berorientasi kepada tingkat kebutuhan, analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama serta menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Pengamalan agama yang telah dilaksanakan seperti dalam Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan (MDA, TPA, LDS, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Pengurus Masjid/Mushalla), memberikan bantuan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang bersifat stimulan.

2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur dan mutu pendidikan, menerapkan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan, peningkatan dan pemerataan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta mewujudkan pendidikan berkarakter.

3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang sehat dengan gizi seimbang, melalui peningkatan pelayanan, infrastruktur dan kualitas

SDM kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi masyarakat, menurunnya tingkat kematian ibu dan bayi, meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya pengendalian terhadap penyakit menular, dan meningkatnya upaya penyehatan lingkungan.

4) Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi keanekaragaman pangan yang berbasis komoditi lokal. Namun potensi ini belum semuanya tergali secara optimal. Pengembangan potensi ekonomi pangan berbasis komoditi lokal akan meningkatkan daya saing produk industri pangan, berkembangnya penganekaragaman konsumsi pangan dengan komoditi lokal, penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, meningkatkan kesempatan kerja pada sektor industri pangan.

5) Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata utama, strategis dan potensial seperti Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Carocok Painan, Batu Nago, Pasir Putih Kambang dan Mandeh Rubiah menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuhkan kembangkan objek-objek wisata yang potensial, membuka lapangan kerja di sektor pariwisata, mewujudkan Pesisir Selatan sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat, meningkatkan pemasaran objek-objek wisata pesisir selatan baik didalam maupun diluar negeri

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir untuk menarik kunjungan wisata, dan beberapa diantaranya telah menjadi event tahunan seperti Pelaksanaan Festival Langkisau dan Tour de Singkarak, serta pelaksanaan olahraga mancing sebagai

agenda tahunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai upaya pengembangan wisata bahari yang berwawasan lingkungan.

6) Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis

Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan perdesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya infrastruktur publik, adanya akses air bersih dan sanitasi, munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk pengembangan kawasan ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengembangan kawasan produksi (agropolitan, minapolitan) dan sentra industri dimaksudkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, seperti:

- a. Persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) direncanakan untuk pengembangan KEK Pariwisata di Kecamatan Koto XI Tarusan.
- b. Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
- c. Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti.
- d. Pengembangan kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang dan Linggosari Baganti.
- e. Pengembangan sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan dan Ranah IV Hulu Tapan.
- f. Kawasan perkebunan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB

Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.

- g. Kawasan agroindustri meliputi kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Pancung Soal, Lunang dan Silaut.
- h. Sentra industri sulaman bayangan Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kampung Batik Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- i. Sentra industri anyaman pandan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
- j. Sentra industri makanan tradisional di Painan Kecamatan IV Jurai.

Kawasan ekonomi memerlukan dukungan aksesibilitas transportasi darat dan transportasi laut. Pengembangan Transportasi laut untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam kedaulatan maritim. Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Panasahan Painan sebagai pelabuhan pengumpan regional yang difungsikan untuk mendukung pelabuhan Teluk Bayur.

Untuk pengembangan kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan prinsip partisipatif, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan rencana program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu kawasan.

Pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Pengembangan Kawasan Berbasis Sapi Potong di Kecamatan Sutera, Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan

Peternakan Sapi di Kecamatan Silaut, Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh, Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Sentra Peternakan dan pengembangan kawasan perdesaan lainnya.

7) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian dan daya dukung sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga potensi sumber daya yang sudah ada dapat dipertahankan untuk usaha ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, terwujud konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan pencemaran lingkungan, dan terpeliharanya kearifan lingkungan.

Untuk mengantisipasi dampak lingkungan dalam pembangunan sarana dan prasarana diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Beberapa bentuk prasarana lingkungan tersebut antara lain :

- a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- b. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
- c. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.
- d. Jalur Evakuasi Bencana Alam.

8) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran

Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara intensif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, terlaksananya program perlindungan sosial, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, dan meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

9) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat dari tata pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bebas KKN, terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, dan terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

10) Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang

Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang diarahkan untuk memperkuat struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas serta peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada kuatnya kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah terhadap gender dan HAM, pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha, meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dan munculnya generasi muda yang mandiri dan berprestasi.

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang merupakan tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh setiap Pemerintah Daerah pada batas waktu yang ditentukan.

Urusan wajib yang diamanatkan memiliki SPM adalah yang terkait pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan urusan wajib adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial.

SPM merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya. Evaluasi SPM merupakan pemberian gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan oleh daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, memiliki nilai capaian sebesar 85% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.20
Indikator, target dan capaian Standar Pelayanan minimal tahun 2020

JENIS LAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2020
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, MI, SMP/ MTs)	99%	98,97%
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99%	98,77%

JENIS LAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2020
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	85%	80,70%
2. Dinas Kesehatan			
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	90%	84,75%
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	90%	86,78%
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	90%	99,40%
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65%	72,26%
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	84,21%
Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	20%	21,18%
Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	70%	70,75%
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60%	24,52%

JENIS LAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2020
Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	70%	87,67%
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90%	97,67%
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%	121,7%
Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Waria/ Transgender, Pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatanmenda patkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	50%	24,7%
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,16%	99,27%
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,16%	75,84%
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0.2178	0.2233
Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	Rasio Permukiman Layak Huni	96.76	96.82
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

JENIS LAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2020
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10 %	3,58 %
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	25%	0 %
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	15%	19,00 %
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100 %
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	75 %	75 %
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	3 x patroli dalam sehari/ 100%
	Cakupan rasio petugas linmas	100%	0,36/ 100%
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Pelayanan informasi rawan bencana	Cakupan layanan informasi rawan bencana	100%	60%



JENIS LAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2020
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	44%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,89%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata capaian sebesar 90%, realisasi capaian masih di bawah 100%.



BAB 2

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020**

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan Masyarakat dapat direpresentasikan dari baik atau buruknya tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan. Indikator yang biasa digunakan untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbentuk dari empat komponen utama yaitu : (1) Usia Harapan Hidup, (2) Harapan lama sekolah, (3) Rata rata Lama sekolah dan (4) Pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Pesisir Selatan terjadi sedikit penurunan dimana pada tahun 2019 IPM 70.08 meningkat menjadi 69.90 pada tahun 2020.

b. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan tahun 2019 mengalami peningkatan yakni 7,88 naik dari tahun sebelumnya yakni 7,59. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah adanya kenaikan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Selain itu survei yang dilakukan oleh BPS untuk angka kemiskinan ini pada bulan Maret. Kondisi perekonomian pada bulan Maret tersebut di Pesisir Selatan sedang menurun ditandai dengan rendahnya harga komoditi perkebunan seperti sawit dan gambir. Kondisi ini juga terjadi pada sektor perikanan dimana nelayan tidak melaut diakibatkan oleh cuaca yang ekstrim (badai). Berdasarkan kondisi tersebut diatas tentu saja hasil survei menunjukkan bahwa terjadi penurunan daya beli pada masyarakat.

c. Tingkat Pengangguran

Secara umum tingkat pengangguran di Pesisir Selatan berfluktuasi setiap tahunnya , tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 5,85 pada tahun 2018 menjadi 5,84 pada tahun 2019. hal ini menjadikan masalah ketenagakerjaan dan pengangguran sebagai salah satu permasalahan utama daerah disebabkan oleh masih lemahnya daya saing sumber daya manusia serta masih terbatasnya lapangan pekerjaan

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Pesisir Selatan 4,81% pada tahun 2019, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 5,36%. Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu



daerah dapat dilihat dari seberapa besar ekonomi di daerah tersebut tumbuh dan seberapa besar masyarakatnya menikmati pertumbuhan tersebut secara berkeadilan.

e. Pendapatan PDRB

Pendapatan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kenaikan dari 9.142.697,20 pada tahun 2018 menjadi 9.582.867,69 tahun 2019. Bila dilihat dari struktur perekonomian Pesisir Selatan, terdapat 4 sektor sebagai penyumbang tertinggi pada PDRB Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor perdagangan dan sektor jasa lainnya.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Indikator yang menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah adalah Indeks Gini atau biasa disebut dengan Gini Ratio. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Indeks gini bernilai 0, menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan Indeks gini bernilai 1, menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Indeks Gini Pesisir Selatan telah menunjukkan nilai yang baik dimana nilai Gini Ratio tidak pernah melebihi nilai 0,3 dan performanya untuk tahun 2019 Gini Ratio kabupaten Pesisir Selatan 0,25 .

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (negeri dan swasta)	62	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	



	2	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
	3	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		
	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	748		
	5	Jumlah pendidik pada PAUD (negeri dan swasta)	837		
	6	Jumlah pendidik PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	83		
	7	Jumlah kepala sekolah PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	83		
	8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	372		
	9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
	10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
	11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		
	12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah	0		

			pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		
		13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.709	
		14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.098	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.284	
		16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.038	
		17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.600	
		18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	858	
		19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	463	
		20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	164	
		21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.929	
		22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	919	
		23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	394	
		24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	73	
		25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah	34	

			dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		
		26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	64	
		27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	372	
		28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	
		29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	
		30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	
		31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	
		32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.790	
		33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.098	
		34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.284	
		35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.038	
		36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.600	
		37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	858	
		38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	463	
		39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	164	

		40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.929		
		41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	919		
		42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	394		
		43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	73		
		44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	34		
		45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	64		
		46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10		
		47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
		48	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		
		49	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	355		
		50	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	355		
		51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki	329		

			ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			
		52	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-		
		53	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	17		
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	$\frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$		
		3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	100%		
		5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan	100%		
		7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	100%		
		9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%		
		11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100%		
		13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
		15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
		17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		

		18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
		19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		20	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
		21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
		23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
		25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
3	PUTR	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	13.855,2	DINAS PSDA	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	413.390		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	2.923,08		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	37.350		
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada		
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai	Ada		



			milik pemerintah kabupaten/kota			
		8	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	13.855,2		
		9	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	413.390		
		10	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	2.923,08		
		11	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	37.350		
		12	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada		
		13	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada		
		14	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Ada		
		15	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{77.032}{125.712} \times 100 = 61,27\%$		
		16	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{135.495}{225.827} \times 100 = 60\%$		
		17	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik			
		18	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	DINAS PUTR	
		19	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak		
		20	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1		
		21	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk	Tidak		

			melakukan penyelenggaraan SPAM		
		22	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak	
		23	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	77.007	
		24	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	3.995	
		25	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	81.002	
		26	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	757	
		27	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	757	
		28	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3.995	
		29	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		
		30	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		
		31	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		
		32	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		
		33	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		
		34	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		
		35	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		
		36	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		
		37	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal		

			dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		
		38	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		
		39	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	
		40	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak Ada	
		41	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada	
		42	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada	
		43	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		
		44	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		
		45	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	2333.18 Km	
		46	Panjang jalan yang dibangun	6.040 m	
		47	Panjang jembatan yg dibangun	50 m	
		48	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	15.412 m	
		49	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	
		50	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	27.462 m	
		51	Panjang jembatan yang direhabilitasi	192 m	
		52	Panjang jalan yang dipelihara	386,50 Km	
		53	Panjang jembatan yang dipelihara	863,30 m	
		54	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	
		55	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	

		56	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0		
		57	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada		
		58	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak Ada		
		59	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada		
		60	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada		
		61	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak Ada		
		62	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak Ada		
		63	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak Ada		
		64	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat	Tidak Ada		

			pelatihan operator dan teknisi/analisis			
		65	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak Ada		
		66	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada		
		67	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada		
		68	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		69	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		70	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		71	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	81		
		72	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0		
		73	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0		
		74	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0		
		75	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	81		

		76	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		77	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		78	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
4	Perumahan Rakyat	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak ada		
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak ada		
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak ada		
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada		
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-		
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada		
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada		
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak ada		
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak ada		
			Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada		
		10	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum	Tidak ada		

			mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		
		11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	
		12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	
		13	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	
		14	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak ada	
		15	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	140.21	
		16	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	2,141	
		17	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,1315	
		18	Jumlah rumah di kab/kota	114,308	
		19	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	2,141	
		20	Jumlah rumah tidak layak huni	134	
		21	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada data	
		22	Rasio rumah dan KK	108.35	
		23	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada data	
		24	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	5	
		25	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Dikerjakan oleh PU	
		26	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	275	
		27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	525	
		28	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	5	
		29	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Dikerjakan oleh Dinas Perhubungan	
		30	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak ada	
		31	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Tidak ada	

		32	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak ada		
5	TRANTIBUM LINMAS	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	100	POL PP & DAMKAR	
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	-		
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1		
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3		
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	-		
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	2		
		7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBD	
		8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	92		
		9	Persentase penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	Tidak ada		
		10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan sah/legal	Tidak ada Anggaran		
		11	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	Tidak ada		
		12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Tidak ada		
		13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Tidak ada		
		14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	34,5		

		15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	97,6		
		16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100		
		17	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	54,5		
		18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	77,4		
		19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	1	POL PP & DAMKAR	
		20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada		
		21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada		
		22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	4 Pos		
		23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	8 Mobil		
		24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	3 Orang		
		25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak		

		26	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	Tidak		
6	SOSIAL	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	12.107	DINSOS P3A	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	6.354		
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	51		
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Tidak ada		
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4		
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	Tidak ada		
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak ada		
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Tidak ada		
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	70		
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Tidak ada		
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak ada		
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak ada		
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak ada		
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	249		
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	Tidak ada		

			usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Tidak ada	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Tidak ada	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	7	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	7	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	6	
		22	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	539	
		23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Tidak ada	
		24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tidak ada	
		25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Tidak ada	
		26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak ada	
		27	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	249	
7	Ketenaga Kerjaan	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Tidak ada	DISNAKERTRANS



	2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Tidak ada	
	3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak ada	
	4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{6}{6} \times 100 = 100\%$	
	5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{2}{6} \times 100 = 33,3\%$	
	6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{5}{80} \times 100 = 6,25\%$	
	7	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{4}{27} \times 100 = 14\%$	
	8	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{27}{27} \times 100 = 100\%$	
	9	Jumlah penganggur yang dilatih	96 Orang	
	10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{96}{96} \times 100 = 100\%$	
	11	Persentase penyerapan lulusan	50%	
	12	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{41}{96} \times 100 = 42\%$	
	13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Tidak ada	
	14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak ada	
	15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tidak ada	
	16	Data tingkat produktivitas total	Tidak ada	
	17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{19}{90} \times 100 = 21,11\%$	
	18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{11}{13} \times 100 = 84,61\%$	
	19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	21 SP/SB	

		20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{22}{27} \times 100 = 81,48$		
		21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{272}{7.363} \times 100 = 3,69$		
		22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Tidak ada		
		23	Jumlah mogok kerja	Tidak ada		
		24	Jumlah penutupan perusahaan	2 Perusahaan		
		25	Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak ada		
		26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak ada		
		27	Jumlah perselisihan PHK	3 Kasus		
		28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Tidak ada		
		29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Tidak ada		
		30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada/tidak		
		31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Tidak ada		
		32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada		
		33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.857 orang		
		34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	16 BKK		
		35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak ada		
		36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Tidak ada		
		37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Tidak ada		
		38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Tidak ada		

		39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Tidak ada		
		40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Tidak ada		
		41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Tidak ada		
		42	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	Tidak ada		
		43	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Tidak ada		
		44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak ada		
		45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Data Menyusul		
8	Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	45	DINSOS P3A	Surat Pernyataan
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	42 PROGRAM 45 KEGIATAN		
		3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak ada		
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga		
		5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{52}{52} \times 100 = 100\%$		
		6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 Lembaga		
		7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan	1 Lembaga		

			keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)			
		8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	19 Lembaga		
		9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	3.370		
		10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 Lembaga		
		11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1 Lembaga		
		12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 kegiatan		
		13	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Tidak ada		Surat Pernyataan
		14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{57}{57} \times 100 = 100\%$		
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada		
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada		
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada		
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	DINAS PANGAN	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada		
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada		
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada		

		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada		
10	Pertanahan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Tidak ada	DISPERKIMTAN	
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Tidak ada		
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Tidak ada		
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Tidak ada		
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tidak ada		
11	Lingkungan Hidup	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Hutan (IKTH)	90	DINAS LH	
		2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada		
		3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{97}{109} \times 100 = 100 \%$		
		4	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota			Surat Pernyataan
		5	Penetapan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota			Surat Pernyataan
		6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH			Surat Pernyataan
		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat			Surat Pernyataan



		8	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{3}{5} \times 100 = 60 \%$		
12	Adminduk Capil	1	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$	DUKCAPIL	
		2	Penerbitan akta perceraian	$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$		
		3	Penerbitan akta kematian	$\frac{3094}{3094} \times 100 = 100 \%$		
		4	Penyajian data kependudukan	$\frac{268.861}{430.520} \times 100 = 100 \%$		
13	Pemberdayaan Masyarakat desa	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	54	DMPDPPKB	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	54		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1139		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	119		
		5	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	54		
		6	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	54		
		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1139		
		8	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan	119		

			ekonomi produktif dan pemberdayaan			
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-perda-kan	0	DMPDPPKB	
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	35,405		
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	2,83		
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{11.567}{26.486} \times 100 = 43,67\%$		
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	20		
		6	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{109}{253} \times 100 = 43,08\%$		
		7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{18.946}{80.949} \times 100 = 23,4\%$		
		8	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	486		
		9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{1.081}{7.663} \times 100 = 14,11$		
		10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah			
		11	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{5.593}{41.330} \times 100 = 13,58$		
15	Perhubungan	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal angkutan tipe c	$\frac{0}{0} \times 100 = 0$	DISHUB	
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{4169}{5212} \times 100 = 79,99$		
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{1}{10} \times 100 = 10$		
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu	$\frac{0}{6000} \times 100 = 0$		

			lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota			
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{66}{66} \times 100 = 100$	DINAS KOMINFO	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{66}{66} \times 100 = 100$		
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Tidak ada		
		4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{165}{165} \times 100 = 100\%$		
		5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$		
		6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$		
		7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{37}{37} \times 100 = 100\%$		
		8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{3}{37} \times 100 = 8\%$		
		9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan	$\frac{7}{9} \times 100 = 77,78\%$		

			peraturan perundang-undangan			
		10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{24}{37} \times 100 = 64,87\%$		
		11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$		
		12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{42}{46} \times 100 = 91,30\%$		
		13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$		
		14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{46}{46} \times 100 = 100$		
		15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$		
		16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{6}{12} \times 100 = 50\%$		
		17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada Perda No. 4 tahun 2020s		
		18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{7}{121} \times 100 = 5,79\%$		
		19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{32}{45} \times 100 = 71,11\%$		
		20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{8}{8} \times 100 = 100\%$		
17	Koperasi dan UMKM	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah	$\frac{46}{62} \times 100 = 74,19\%$	DINAS KOPERINDAG	

			keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{3}{318} \times 100 = 100\%$		
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{10}{108} \times 100 = 13,1\%$		
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{75}{318} \times 100 = 23,58 \%$		
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{160}{17.674} \times 100 = 0,90\%$		
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{2}{318} \times 100 = 0,63 \%$		
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak perlu diisi		
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{124}{318} \times 100 = 38,99 \%$		
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi	$\frac{4}{318} \times 100 = 1,26 \%$		

DINAS
KOPERINDAG



			dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{75}{318} \times 100 = 23,58 \%$		
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan
		14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{42}{3629} \times 100 = 1,16\%$		
		15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{789}{3629} \times 100 = 21,74 \%$		
		16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{12}{(5.335 - 12)} \times 100 = 0.22 \%$		
		17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{43}{(5.335 - 43)} \times 100 = 0,81\%$		
		18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{12}{(5.335 - 12)} \times 100 = 0.22 \%$		
		19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{60}{5.335} \times 100 = 1,12 \%$		
		20	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{249}{5.335} \times 100 = 4,67 \%$		
18	Penanaman Modal	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perda No 5 tahun 2018		
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Keputusan Bupati pesisir selatan Nomor 570/285/Ktps/BPT-PS/ tentang SOP pelayanan perizinan dan Non perizinan	DPMPTSP	

		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal			
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	nihil		
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	nihil		
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	nihil		
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	nihil		
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4.025 izin		
		9	Laporan realisasi penanaman modal	345.019.215.304		
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota			
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN			
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota			
19	Kepemudaan	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	36	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	3		
		3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	nihil		
		4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	2810		
		5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	59/496		
		6	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	nihil		
20	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah	Tidak ada	DINAS KOMINFO	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Surat Keterangan		
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1.151		
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada		

		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1.151		
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	1.151		
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	1.151		
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0$		
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{0}{0} \times 100 = 0$		
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{0}{0} \times 100 = 0$		
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0$		
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)	185 Obyek Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	102 Obyek Cagar Budaya		
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	102 obyek Cagar Budaya		
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,	24 Orang SDM		

			standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	10 Cagar Budaya	
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	185 Cagar Budaya	
		7	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	185 Cagar Budaya	
		9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	168 Cagar Budaya	
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	300 lebih koleksi	
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	215 orang	
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	3 orang	
		13	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	3 orang (1 orang penunggu tamu, 1 orang pemandu, dan 1 orang petugas Kebersihan museum)	
		14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	
		15	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	5 orang	
		16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 orang	
		17	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	
		18	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	
		19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1	

		20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1		
23	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{19.565}{514.444} \times 100 = 3,8\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{16.621}{514.444} \times 100 = 3,23\%$		
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{18}{514.444} \times 100 = 0,0034\%$		
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{2}{1116} \times 100 = 0,2\%$		
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	20 TBM		
		6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	-		
		7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	-		
		8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-		
24	Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$57/137 \times 100 = 41,60$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$6 \text{ boks}/825 \text{ boks} \times 100 = 0,34$		
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-		
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$22/130 \times 100 = 16,92$		
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	-		
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	$6 \text{ boks}/825 \text{ boks} \times 100 = 0,72$		
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	-		
		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	$22/161 \times 100 = 13,66$		

		9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	-		
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	-		
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	-	Dinas Perikanan Dan Kelautan	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional	%		
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	-		
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	-		
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	5.208.000 ekor		
26	Pariwisata	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	69	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	492		
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota	89		
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	250		
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	15 virtual		
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0		
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0		



		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{40}{500} \times 100 = 8 \%$		
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{120}{340} \times 100 = 35 \%$		
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	7 Lokasi		
27	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Benih dan Bibit 1. Benih cabe merah 4,5 kg 2. Benih semangka 8,5 kg 3. Benih melon 300 gr 4. Benih jagung manis 170 kg 5. Saprodi Pengembangan bawang merah 6 ha 6. Bantuan Perluasan Areal Tanaman Baru (PATB) Padi Gogo 2010 ha 7. Bantuan benih padi inbrida sawah 1.186 ha (29.650 kg) 8. Bantuah benih jagung hibrida 10.194 ha (152.910 kg) 9. Bibit kelapa kopyor 3.060 batang Alat dan Mesin Pertanian 10. Combine Harvester Besar 1 unit 11. Power Thresher 14 unit 12. Corn seller 14 unit 13. Corn seller mobile 4 unit	DISTANHORT BUN	

			14. Power thresher multi guna 2 unit 15. Power thresher multi guna mobile 7 unit 16. Caplak 111 unit 17. Pompa air untuk brigade 2 unit 18. Pompa air 11 unit 19. Cultivator 4 unit 20. Handsprayer 146 unit 21. Tractor roda empat 2 unit 22. Hand tractor rotari 2 unit 23. Hand tractor 6,5 PK 1 unit 24. Hand tractor 8,5 Pk 11 unit Infrastruktur Pertanian 25. Irigasi perpompaan besar 3 unit 26. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier 1.000 ha 27. Embung 1 unit 28. Dam Parit Saluran 4 unit 29. Rehabilitasi jaringan irigasi 8 unit 30. Pembangunan jalan usaha tani 9 unit		
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	20 Unit	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	11 buah	
		4	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{20}{20} \times 100 = 100 \%$	Dinas Pertanian
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{11}{11} \times 100 = 100 \%$	

		6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (kejadian/kasus penyakit hewan menular)	$\frac{15}{15} \times 100 = 100 \%$	Diskeswan	
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		Kewenangan Provinsi	
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		Kewenangan Provinsi	
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura		Kewenangan Provinsi	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		Kewenangan Provinsi	
29	Energi dan SDM	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		Bag Perekonomian dan ESDM SETDA KAB	
30	Perdagangan	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan		DINAS KOPERINDAG	Surat Pernyataan
		2	Persentase penerbitan TDG	$\frac{10}{10} \times 100 = 100 \%$		
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{10}{10} \times 100 = 100 \%$		
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri			Surat Pernyataan
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{3}{3} \times 100 = 100 \%$		
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu			Surat Pernyataan
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (0,5 + 0,32) \times 100 = 82\%$		
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	$\frac{Ef}{n} = \frac{29,6}{12} \times 100 = 2,47$		

		9	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{17.838}{104.181 \times 115.756,26} \times 100 = 0,00015\%$		
		10	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{400}{109.331} \times 100 = 0.37\%$		
		11	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	-		Surat Pernyataan
31	Perindustrian	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	DINAS KOPERINDAG	Belum ada IUKI dan IPKI yang diterbitkan
		2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100%		Sudah terbit tahun 2019
		3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industry (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{7}{7} \times 100 = 100\%$		
		4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-		Belum ada IPUI yang diterbitkan
		5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	-		Belum ada industri kecil menengah yang melakukan entry SIINas
32	Transmigrasi					

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{14.999}{18.592} \times 100 = 80,67\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	$\frac{57.123}{57.317} \times 100 = 99,66\%$		
		3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	$\frac{27.213}{29.595} \times 100 = 91,95\%$		
		4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	$\frac{595}{8.404} \times 100 = 7,08\%$		
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{253}{467.062} \times 100 = 0,054\%$	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi	$\frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$		
		3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$\frac{8550}{10088} \times 100 = 84,75\%$		
		4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	$\frac{8358}{9631} \times 100 = 84,75\%$		
		5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	$\frac{8530}{8581} \times 100 = 84,75\%$		
		6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	$\frac{25875}{35807} \times 100 = 72,26\%$		
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{7641}{9073} \times 100 = 84,21\%$		
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{58889}{277912} \times 100 = 21,18\%$		
		9	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{46446}{65639} \times 100 = 70,75\%$		
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	$\frac{19270}{78573} \times 100 = 24,52\%$		

			elayanan kesehatan sesuai standar			
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{2240}{1964} \times 100 = 87,67\%$		
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{958}{981} \times 100 = 97,65\%$		
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{7336}{6027} \times 100 = 121,7\%$		
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{3467}{14031} \times 100 = 24,70\%$		
3	PUTR	1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	$\frac{3.876,21}{13.855,2} \times 100 = 27,98\%$	Dinas PSDA	
		2	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	$\frac{1.427}{58.460} \times 100 = 2,44\%$		
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{11.916}{20.907} \times 100 = 57\%$		
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	$\frac{102.866}{107.610} \times 100 = 95,59\%$	Dinas PUTR	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{81.002}{107.610} \times 100 = 75,27\%$		
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota			
		7	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	$\frac{941,47}{2333,18} \times 100 = 40,36\%$		
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{0}{97} \times 100 = 0\%$		

4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$	Dinas PERKIMTAN	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{114.174}{114.308} \times 100 = 99,88 \%$		
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{275}{114.308} \times 100 = 0,241 \%$		
5	TRANTIBUM LINMAS	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$	Satpol PP dan Damkar	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$		
		3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	475.883	BPBD	
		4	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6.255		
		5	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	335		
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{32}{32} \times 100 = 100 \%$	Satpol PP dan Damkar	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	1 JAM		
6	SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{582}{8072} \times 100 = 7.21 \%$	Dinas Sosial dan P3A	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	$\frac{539}{539} \times 100 = 100 \%$		
7	Ketenaga Kerjaan	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$	Disnakertrans	



		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{41}{12.987} \times 100 = 0,32 \%$		
		3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{9.582.867}{209.277} \times 100 = 45,79 \%$		
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{21}{116} \times 100 = 18,1 \%$		
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	$\frac{52}{1867} \times 100 = 2,78 \%$		
8	Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{50.680.140.355}{592.138.435.487} \times 100 = 8.56\%$	Dinas Sosial dan P3A	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	$\frac{52}{173.311} \times 100 = 0.03 \%$		
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{57}{255.654} \times 100 = 0.02 \%$		
9	Pangan		Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{92.234,35}{186.683} \times 100 = 0,49 \%$	Dinas Pangan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$	Dinas Perkimtan	
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		
		4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{3}{3} \times 100 = 100 \%$		
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH Pessel = $(0.376 \times 90) + (0.405 \times$		

				$91,81)+(0,219*71,78)=86,74287(\text{Sangat Baik})$		
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	$\frac{12.045}{56.036,63} \times 100 = 21,49 \%$	Dinas Lingkungan Hidup	
		3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	$\frac{2}{3} \times 100 = 66,67 \%$		
12	Admindakapil	1	Perekaman KTP elektronik	$\frac{351.923}{360.738} \times 100 = 97,56 \%$	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{41.952}{152.516} \times 100 = 27,51 \%$		
		3	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{172.369}{172.500} \times 100 = 100 \%$		
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{10}{46} \times 100 = 21,74 \%$		
13	Pemberdayaan Masyarakat desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{17}{125} \times 100 = 13,6 \%$	DPMDPP&KB	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{7}{125} \times 100 = 5,6 \%$		
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,83	DPMDPP&KB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	$\frac{62.021}{80.949} \times 100 = 76,62 \%$		
15	Perhubungan	1	Rasio Konektivitas Kab/Kota	$(3,6 \times 70) + (1 \times 30)$	Dinas Perhubungan	
		2	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	$\frac{0}{6000} \times 100 = 0 \%$		
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{66}{66} \times 100 = 100 \%$	DISKOMINFO	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{7}{13} \times 100 = 53,84 \%$		
		3	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	$\frac{360.179}{514.444} \times 100 = 70,01 \%$		
17	Koperasi dan UMKM	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{46}{318} \times 100 = 14,47 \%$	Dinas Koperindag	



		2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{3.629}{5.335} \times 100 = 68,02\%$		
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	$\frac{345.019.215.304 - 525.484.275.232}{525.484.275.232} \times 100 = -34,34$	DMPPTSP	
19	Kepemudaan	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{-}{129.230} \times 100 = -\%$	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{2810}{129.230} \times 100 = 2,17\%$		
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Nihil		
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$		
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$		
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya cagar budaya	$\frac{102}{185} \times 100 = 55,14\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0		
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$\frac{41,6+0,34+0+16,92}{4} = 14,72$		
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1.26		
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah	47.360,7 Ton	Dinas Perikanan Dan Kelautan	



			provinsi (sumber data: one data KKP)			
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{250-3650}{3650} \times 100 = 93,15\%$	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Turun 93,15 persen dari tahun sebelumnya
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	$\frac{177.033 - 2.065.863}{2.065.863} \times 100 = 84,75\%$		
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{18.663}{248.565} \times 100 = 7,5\%$		
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3.689.570.188,00		
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{382.843,16 + 241.376,69}{78.719 + 28.119,2} = 5,84 \text{ Ton/ha}$	Distanhortbun	
		2	Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan	$\frac{134-156}{156} = 34\%$	Diskeswan	Kasus Zoonosis Turun 34 %
28	Kehutanan	1				
		2				
		3				
		4				
29	Energi dan SDM	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab		Bag Perekonomian dan ESDM SETDA KAB	
30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{1883}{3764} \times 100 = 50\%$	Dinas Koperindag	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{17.838}{115.756} \times 100 = 15,41\%$		
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{400}{109.331} \times 100 = 0,37\%$		
31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{2503-2473}{2473} \times 100 = 1,21\%$	Dinas Koperindag	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-		Refocusing anggaran

		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{7}{7} \times 100 = 100\%$		
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-		Belum Ada IPUI yang terpantau
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-		Belum ada IUKI dan IPKI yang dipantau
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%		terlampir
32	Transmigrasi					

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{5607}{901} \times 100 = 622,31 \%$	BKPSDM	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{258}{3231} \times 100 = 7,99 \%$		
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{79}{258} \times 100 = 30,62 \%$		
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		BPKD	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			
		3	Assets Management			

		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{16.950.207.819}{1.431.684.077.296} \times 100 = 0.012 \%$		
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{650.687.100.123} \times 100 = 0 \%$	Bagian PBJ	Tidak ada proyek konstruksi dengan nilai besar dari RP 50 M
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{91}{474} \times 100 = 19 \%$		
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{200.272.789.931}{650.687.100.123} \times 100 = 30,78 \%$		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{320.418.007.077}{1.362.816.599.5548} \times 100 = 0.235 \%$	BPKD	
		2	Rasio PAD	$\frac{133.652.411.809,45}{9.579.653,65(juta)} \times 100 = 1,39 \%$	BAPENDA	
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{1.100.881.966.997 - 347.673.038.285}{1.362.816.599.5548} \times 100 = 0.552 \%$	BPKD	
		4	Opini Laporan Keuangan	2019 = WTP 2018 = WTP 2017 = WTP 2016 = WTP 2015 = WTP 2014 = WTP 2013 = WTP 2012 = WDP 2011 = WDP 2010 = WDP		
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		Dinas Kominfo	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			



2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja;

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	1.1.	Penilaian LKD (opini BPK)	opini	WTP
		1.2.	Kualitas penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	skala	BB
		1.3.	Skor Nilai LPPD	skor	3300
		1.4.	Level Maturitas SPIP	level	3
2	Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	2.1	Umur Harapan hidup	tahun	70,5
		2.2	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,49
		2.3	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,58
3	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi secara Berkelanjutan	3.1.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Tanpa satuan	6,0
4	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial secara berkelanjutan dan menurunkan ketimpangan	4.1.	Indeks Gini Ratio Kabupaten Pesisir Selatan	%	0,24
		4.2.	Presentase Akses Sanitas Layak	%	75,16
		4.3.	Presentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih	%	95,50
		4.4.	Rasio Rumah Layak Huni		0,2450
5	Meningkatnya pengamalan nilai nilai agama	5.1.	Persentase Mesjid yang memiliki TPQ aktif	%	71,51
		5.2.	Persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ	%	92
6	Lestarnya Nilai nilai adat dan budaya daerah	6.1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Gotong Royong	Tanpa satuan	Tinggi
		6.2.	Jumlah Kekayaan Budaya yang dilestarikan	unit	5
7	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian/perkebunan/ peternakan serta kelautan dan perikanan	7.1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian	trilyun (Rp.)	3,65
8	Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah	8.1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan atas harga konstan)	%	7,50
		8.2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan atas harga konstan)	%	12,50

9	Terwujudnya Peran Pemerintah dan Struktur Sosial dalam Pengurangan Penyakit Masyarakat	9.1.	Persentase penyelesaian kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparat	%	90
		9.2.	Persentase kasus Perda yang dii selesaikan	%	95
10	Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	10.1.	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	%	75
		10.2.	Jumlah Dasa Wisma Maju	unit	645

Sumber: Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.5
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2020		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI 1 : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT							
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja							
1.1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	1.	Penilaian LKD (opini BPK)	opini	WTP	WTP	100
		2.	Kualitas penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	skala	BB	B	93.97
		3.	Skor Nilai LPPD	skor	3300	3209	97.24
		4.	Level Maturitas SPIP	level	3	3	100
1.2.	Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	1	Umur Harapan hidup	tahun	70.5	70.86	100.51
		2	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.49	8.26	97.29
		3	Harapan Lama Sekolah	tahun	13.58	13.32	98.09
MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN							
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah.							
2.1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi secara Berkelanjutan	1.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	tanpa satuan	6.0	5.92	98.67



2.2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial secara berkelanjutan dan menurunkan ketimpangan	1.	Indeks Gini Ratio Kabupaten Pesisir Selatan	%	0.24	0.26	91.66
		2.	Presentase Akses Sanitas Layak	%	75.16	75.84	100.90
		3.	Presentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih	%	95.50	94.88	99.35
		4	Rasio Rumah Layak Huni		0.2450	0.2461	100.45
MISI 3 : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA YANG RUKUN, TOLERAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA							
ABS-SBK							
Tujuan 1 : Terwujudnya perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya							
3.1	Meningkatnya pengamalan nilai nilai agama	1	Persentase Mesjid yang memiliki TPQ aktif	%	71,51	100	139.84
		2	Persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ	%	92	100	122.23
3.2	Lestarnya Nilai nilai adat dan budaya daerah	1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Gotong Royong	tanpa satuan	Tinggi	Rendah	65.66
		2	Jumlah Kekayaan Budaya yang dilestarikan	unit	5	N/A	-
MISI 4 : MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN							
BERKELANJUTAN							
Tujuan 1 : Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing.							
4.1.	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian/perkebunan/ peternakan serta kelautan dan perikanan	1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian	trilyun (Rp.)	3.65	3.49	95.62
4.2.	Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah	1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan atas harga konstan)	%	7.50	6.47	86.27
		2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan atas harga konstan)	%	12,50	12.25	98.00
MISI 5 : MENINGKATKAN PERAN STRUKTUR SOSIAL DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT KEJAHATAN, KRIMINALITAS DAN PEREDARAN OBAT-OBATAN TERLARANG							
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum.							
5.1.	Terwujudnya Peran Pemerintah dan Struktur Sosial dalam Pengurangan Penyakit Masyarakat	1.	Persentase penanganan kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparatur	%	90	N/A	–
		2	Persentase kasus Perda yang diiselesaikan	%	95	100	111.11
5.2.	Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	%	75	100	133.33

		2	Jumlah Dasa Wisma Maju	unit	645	545	84.50
Rata-rata Capaian Indikator 10 Sasaran Strategis : 23 Indikator Kinerja							99.77

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan 10 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja memiliki beberapa perbedaan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang terdiri dari 11 sasaran dengan 25 indikator kinerja. Perbedaan ini berdasarkan oleh karena terjadinya perbedaan perubahan pada sasaran dan indikator pada perjanjian kinerja Tahun 2020, sasaran strategis dan indikator kinerja dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
MISI 1 : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT								
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja								
1.1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	1.	Penilaian LKD (opini BPK)	opini	WTP	WTP	WTP	
		2.	Kualitas penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	skala	CC	B	B	B
		3.	Skor Nilai LPPD	skor	3.037	3020	3065	3209
		4.	Level Maturitas SPIP	level	-	3	3	3
1.2.	Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	skala	B	B	B	B
		2	Umur Harapan hidup	tahun	68.9	70.11	70.23	70.45
		3	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.37	8.12	8.13	8.25
		4	Harapan Lama Sekolah	tahun	13.34	13.05	13.06	13.31
		5	Peringkat UN Sekolah Dasar Se Sumatera Barat					6 besar
MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN								



Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah								
2.1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi secara Berkelanjutan	1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	34.22	27.08	27.87	28.23
		2.	Persentase jembatan Kabupaten kondisi baik	%	-	66.07	39.78	41.11
		3.	Persentase Irigasi kondisi baik	%	47.14	49.13	51.64	54.34
		4.	Persentase pasar rakyat yang menuju kriteria SNI	%		10	18.18	27.27
		5	Persentase cakupan layanan Komunikasi	%		43	43.2	43.2
2.2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial	1.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	%	98.02	95	77.5	
		2.	Persentase akses sanitasi layak	%	80.79	64.01	73.17	75.13
		3.	Persentase penduduk berakses air minum/bersih	%	85.37	87.86	91.22	94.88
MISI 3 : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA YANG RUKUN, TOLERAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA ABS-SBK								
Tujuan 1 : Mewujudkan perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan, beragama, sosial dan budaya								
1	Meningkatnya pengamalan nilai nilai agama dan peran lembaga adat	1	Persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ	%		68	77	91
MISI 4 : MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN								
Tujuan 1 : Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing								
4.1.	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan	1.	Peningkatan produksi utama					
			a. Padi	ton	274,124	376,971	352,393	343,824
			b. Jagung	ton	161,981	169,102	135,484	116,031
			c. Daging	kg	3,812,986	4,596,386	4,489,635	4,896,407



			d. Telor	kg	1,645,104	1,680,940	2,140,771	2,244,676
			e. Ikan	ton	46,650	49,783	51,496	57,745
		2.	Skor pola pangan harapan	%	72.9	76.5	80.5	84
4.2.	Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah	1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan atas harga konstan)	%		8.83	8.53	7.54
		2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan atas harga konstan)	%		12.23	12.53	13.18
4.3.	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi utama wisata bahari di Sumatera Barat	1.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	1,980,000	2,350,000	2,479,841	2,065,856
		2.	Jumlah kunjungan wisatawan manca negara	orang	1,500	1,700	1,623	
MISI 5 : MENINGKATKAN PERAN STRUKTUR SOSIAL DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT KEJAHATAN, KRIMINALITAS DAN PEREDARAN OBAT-OBATAN TERLARANG								
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum								
5.1.	Terwujudnya Peran Pemerintah dan Struktur Sosial dalam Pengurangan Penyakit Masyarakat	1.	Persentase kasus PERDA yang diiselesaikan	%	-	100	99	100
5.2.	Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	1.	Jumlah Dasa Wisma Maju	Unit	-	-	545	545
Rata-rata Capaian Indikator 11 Sasaran Strategis : 25 Indikator Kinerja							100.36	97.50

d. Pengukuran capaian kinerja, dukungan sumber daya dan analisis program serta kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penilaian LKD (opini BPK)	opini	WTP	WTP	100.00
2.	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	skala	BB	B	93.97
3.	Skor nilai LPPD	skor	3300	3209	97.24
4.	Level maturitas SPIP	level	3	3	100.00
Rata-rata Capaian					97,80

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 97,80%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Penilaian LKD (opini BPK)

Sebagai tindak lanjut dari amanat Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 3 bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir Pada Tahun 2020, sebagaimana tahun – tahun sebelumnya Pemda Pessel Menyampaikan LKD secara tepat waktu ke BPK, Laporan yang disampaikan meliputi LRA, LO, LPSAL, LAK, Nerca, LPE dan CALK.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.



BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Ada beberapa indikator yang dapat menjadi ukuran keberhasilan good governance dan clean government diantaranya yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik apabila dari hasil audit BPK mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah opini BPK. Penyelenggaraan pemerintahan yang good governance dan clean government sudah merupakan cita cita semua pemerintah daerah yang menerima amanat rakyat. Cita-cita tersebut memerlukan komitmen, konsistensi dan upaya yang kuat dari pimpinan pemerintah sampai aparatur termasuk jajaran legislatif. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2020 menyatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan

pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Pemerintah Pessel sejak Tahun 2012 telah memperoleh Opini WTP 6 (enam) kali berturut- turut dari BPK, Dalam hal ini Opini BPK diberikan kepada Daerah yang memenuhi Kriteria sebagai berikut (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak berdasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Berikut tabel 2.7, realisasi dan capaian indikator kinerja Penilaian LKD (opini BPK):

Tabel 2.7
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Penilaian LKD
(Opini BPK) Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penilaian LKD (Opini BPK)	opini	WTP	WTP	100

Formulasi capaian indikator kinerja Penilaian LKD (Opini BPK)

Opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian
laporan keuangan

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 target indikator kinerja Penilaian Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK) adalah WTP dengan realisasi WTP dan capaian indikator kinerja adalah 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini adalah **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**. Dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diukur dari penyusunan laporan keuangan pemerintah mengikuti Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP), sedangkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur dari hasil audit lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional (Badan Pemeriksa Keuangan). Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir pada tahun 2020 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor : 72/S-HP/XVIII.PDG/06/2020 Tanggal 24 Junii 2020. Adapun faktor keberhasilan pencapaian target WTP tahun 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- a. Melakukan Rekonsiliasi antara BPKD selaku SKPKD dengan seluruh SKPD se Kabupaten Pesisir Selatan . Rekonsiliasi dilaksanakan secara Periodik (Bulanan), meliputi Laporan Keuangan dan Laporan BMD. Untuk setiap rekonsiliasi yang dilaksanakan maka hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekon
- b. Menambah aparatur Satuan Kerja di SKPKD yang mana Aparatur yang diberdayakan ini adalah dengan latar belakang berpendidikan Akuntansi yang dapat diandalkan dalam menunjang penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Tahun 2019 dan 2020, telah dilakukan penambahan tenaga Akuntansi di Bidang BMD dan Akuntansi menjadi sebanyak 4 Orang, Setiap Tahun Anggaran bertugas melakukan rekonsiliasi, mereview, kesesuaian, pencatatan dan akuntansi laporan SKPD dan menyusun laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berbasis Aplikasi SIPKD yang mana Aplikasi ini sudah dipakai dalam penyusunan pertanggungjawaban SKPD dan memudahkan SKPD dalam pelaksanaan tugas. Aplikasi ini meliputi SIPKD keuangan (dengan menu meliputi penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan), serta SIPKD Aset untuk pencatatan kartu inventaris barang.
- d. Revisi Kebijakan Akuntansi sesuai SAP dan kondisi spesifik Pemerintah Daerah.
- e. Melakukan Rekonsiliasi Aset setiap Triwulan dengan seluruh SKPD yaitu mencocokkan LRA- Belanja Modal dengan rekap Item Belanja Barng di SKPD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen Pertanggungjawaban dan Pengadaan (SPK)



- f. Melakukan perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan rencana Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap Tahunnya sesuai dengan Renja SKPD dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA SKPD
- g. Melakukan cek fisik Barang Milik Daerah bagi SKPD yang akan mengusulkan penghapusan Aset sesuai dengan usulan SKPD
- h. Penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan Modul SIPKD Aset yang mana pada modul ini sudah tertata penatausahaan Barang Milk Daerah sesuai dengan aturan yang ada.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target opini BPK ini antara lain:

1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
2. Inventarisasi hasil temuan pengawasan
3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
4. Evaluasi Laporan Kinerja SKPD
5. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan

Keberhasilan pencapaian target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengatasi beberapa permasalahan dan kendala diantaranya yaitu :

- a. Penyampaian Laporan Keuangan perangkat daerah yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan ketentuan/SAP;
- b. Masih belum optimalnya pemanfaat IT dalam pengelolaan keuangan yang dapat mengurangi human error dalam proses pengelolaan keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas telah dilaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan terutama dalam penguasaan IT. Selain itu juga diupayakan konsistensi dalam penyampaian laporan keuangan sehingga proses keuangan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil



evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 adalah **65,78** dengan kategori **B**.

Sasaran Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan, Komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018 s.d 2019

No.	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,92	21,64
b.	Pengukuran kinerja	25	15,73	16,51
c.	Pelaporan kinerja	15	9,49	10,97
d.	Evaluasi kinerja	10	6,29	6,63
e.	Capaian kinerja	20	10,17	10,03
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,59	65,78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : Hasil Evaluasi Menpan RB, 2019

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/504/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, diuraikan 6 (enam) hasil evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi dari evaluasi tahun 2019 sehingga terlihat adanya peningkatan kualitas perencanaan kinerja. Namun ditemukan bahwa penyusunan rencana strategis di beberapa Perangkat Daerah (PD) masih memfokuskan pada struktur yang ada, belum berfokus pada kinerja yang seharusnya



2. Penjenjangan (cascading) kinerja dilakukan lebih kepada upaya membagi tugas sesuai dengan struktur yang sudah ada dan mempertahankan program/kegiatan yang selama ini biasa dilakukan. Proses penjenjangan (cascading) kinerja harus menjadi momen untuk menyempurnakan struktur organisasi dan penguatan persyaratan kompetensi pemangku jabatan, mulai dari tertinggi sampai dengan yang terendah (pelaksana tugas)
3. Pelaksanaan program-program pembangunan belum mengidentifikasi cross cutting secara maksimal. Masing –masing PD melihat kegiatan yang dilakukan secara kotak-kotak satu dengan lainnya. Belum terlihat adanya kolaborasi antar PD untuk mencapai target program prioritas
4. Telah menyusun proses bisnis pada level pemerintah daerah dan level PD. Penyusunan proses bisnis tersebut diharapkan tidak hanya dalam rangka pemenuhan dokumen saja namun dapat secara keseluruhan mengidentifikasi proses-proses yang diperlukan dalam menunjang capaian kinerja
5. Telah melakukan analisis refocusing program dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, namun proses refocusing tersebut tidak berdasarkan pohon kerja, sehingga hasil refocusing tersebut diragukan dapat mendeteksi program kegiatan yang tidak mendukung sasaran strategis; dan
6. Pengembangan aplikasi e-SAKIP sebagai alat pemantauan perkembangan capaian kinerja dan anggaran belum optimal dimanfaatkan dalam pengelolaan kinerja PD dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih berfokus pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan reviu atas dokumen perencanaan untuk memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat(result oriented), memperhatikan keterpaduan perencanaan (integrated development plan)
2. Menyempurnakan proses penjenjangan (cascading) kinerja agar lebih menggambarkan proses bisnis terwujudnya kinerja utama yang akan dicapai serta memastikan tersedianya ukuran kinerja pada setiap jenjang jabatan sampai kepada



individu secara spesifik, relevan dan terukur serta memastikan seluruh PK dan SKP telah menggambarkan kinerja yang berorientasi hasil

3. Menyusun cross cutting berupa perencanaan yang terintegrasi (intergrated development plan) untuk menyinergikan kinerja dari setiap PD dalam mendukung terlaksananya program-program prioritas daerah
4. Melanjutkan penyusunan peta proses bisnis yang tidak hanya menjabarkan proses-proses sesuai dengan tugas dan fungsi namun juga dapat menjabarkan berbagai proses bisnis tersebut juga harus dapat menggambarkan hubungan antar unit – unit kerja dalam menyelesaikan proses-proses tersebut
5. Memperdalam analisis refocusing program dan kegiatan yang telah disusun sehingga tidak hanya menghilangkan program dan kegiatan yang dan menggabungkan program-program namun sumber daya manusia untuk program dan kegiatan yang secara langsung berpengaruh dalam pencapaian kinerja
6. Melanjutkan pembangunan dan pengembangan aplikasi manajemen kinerja mencakup perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Diharapkan dengan perbaikan

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal :

1. Pada bulan Juli tahun 2019, diselenggarakan coaching clinic dengan peserta seluruh perangkat daerah dan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Acara ini bertujuan untuk memberi masukan dalam rangka penyempurnaan Sistem AKIP perangkat daerah dalam menyusun dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti, Penyusunan Renstra OPD, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja instansi pemerintah;
2. Bulan Agustus sampai dengan September 2019, dilakukan pendampingan oleh tim dari Bagian Organisasi melakukan Bintek Implementasi e-SAKIP dengan seluruh Perangkat Daerah selama 2 (dua) hari yang dilanjutkan pendampingan penginputan data e-SAKIP dengan output kegiatan tersusunnya Laporan Sistem Pengelolaan Data Kinerja (Manual e-SAKIP).



3. Pada bulan Nopember dilakukan koordinasi dan konsultasi hasil penyusunan cascading OPD sampel dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang juga dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan..
4. Evaluasi terhadap penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan, dilaksanakan pada bulan Nopember 2019, dengan menghadirkan 20 OPD sampel sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Realisasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini :

Tabel 2.9
Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2018-2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2019	2020
1.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	skala	B	B

Berikut tabel 2.10, realisasi dan capaian indikator kinerja Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

Tabel 2.10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	skala	BB	B	93,97

Formulasi capaian indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 adalah BB (70) dan terealisasi B (65,78) dengan capaian indikator kinerja adalah

93,97%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong ***Sangat Berhasil*** dengan predikat ***Sangat Baik***.

Dalam peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, masih ditemukan hambatan antara lain :

1. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Renstra pada masing-masing Perangkat Daerah masih perlu perbaikan sesuai arahan narasumber Kemenpan.
2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan
3. Perjanjian Kinerja yang disusun belum seluruhnya mencerminkan outcome, baik dilevel eselon II maupun eselon IV
4. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai
5. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome
6. Implementasi teknologi informasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan yaitu melalui aplikasi E-Sakip masih ditemukan permasalahan dan kendala antara lain:
 - a. Masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Renstra pada masing-masing SKPD sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Perlu ada perbaikan terhadap keselarasan dokumen penganggaran Perangkat Daerah dengan renstra
 - c. Masih ada Perjanjian Kinerja yang disusun belum mencerminkan outcome.
 - d. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai
 - e. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome

Dalam rangka memperbaiki Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :.



1. Inspektorat melakukan review terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah, yang mencakup review tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang relevan spesifik dan terukur
2. Tetap melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyusunan cascading untuk seluruh perangkat daerah
3. Melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan program yang sudah disusun dalam RPJMD
4. Menyusun perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon II, III, IV dan Staf
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan e-SAKIP sebagai media informasi evaluasi terhadap capaian kinerja

3. Skor nilai LPPD

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Nilai LPPD Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPP) dalam wilayah provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor : 700/1054/Insp-SE/2019, tanggal 18 November 2019.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 ditetapkan target LPPD yang harus dicapai dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) tahun 2019 yaitu 3230 dengan skor penilaian sangat tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi sementara terhadap LPPD Kabupaten Pesisir Selatan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu 3209 dengan skor penilaian sangat tinggi. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 99,35 persen.

Berdasarkan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Se Sumatera Barat, Nilai LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 berada pada urutan ke-6 dari 19 Kabupaten/Kota. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.



Capaian target LPPD tersebut masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa indikator kinerja kunci (IKK) yang masih rendah dan sedang nilainya. Beberapa IKK tersebut antara lain :

1. Tataran pengambil kebijakan
2. Tataran pelaksana kebijakan
3. Pelaksanaan urusan wajib (Perumahan Rakyat dan permukiman, penanaman modal, perhubungan, pertanahan, fungsi penunjang pemberdayaan masyarakat desa serta statistik)
4. Pelaksanaan urusan pilihan kelautan dan perikanan, pariwisata dan transmigrasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 diperoleh hasil evaluasi terhadap :

A. Indeks Hasil EKPP

Penilaian terhadap Capaian Kinerja mendapat kategori prestasi Tinggi dilakukan terhadap Tataran Pengambilan Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan.

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Tataran Pengambilan Kebijakan terdiri dari 13 Aspek dengan 43 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah terdiri dari aspek administrasi umum dan urusan pemerintahan. Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah mendapat skor kategori prestasi tinggi dengan uraian sebagai berikut :

a. Aspek administrasi umum

Aspek administrasi umum terdiri dari 8 aspek dengan 21 indikator kinerja kunci (IKK) yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan dengan jumlah IKK sebanyak 630. Penilaian pada aspek administrasi umum mendapatkan skor kategori prestasi sangat tinggi

Skor dan prestasi per Urusan yang dilaksanakan oleh SKPD

- Skor tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada urusan statistik
- Skor terendah dengan prestasi sedang terdapat pada urusan Pariwisata

b. Urusan Pemerintahan



Urusan pemerintahan terdiri dari 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan penilaian terhadap urusan pemerintahan mendapatkan skor kategori prestasi tinggi

B. *Indek kesesuaian materi*

Penilaian Indek Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan Komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan penyajian indikator kinerja kunci (IKK). Hasil penilaian mendapatkan skor 4,000

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Tata Pengambilan Kebijakan

Terhadap 2 (enam) IKK capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

2. Tata Pelaksana Kebijakan

a. Administrasi Umum

Terhadap 90 (sembilan puluh) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang

b. Capaian Kinerja

Terhadap 4 (empat) urusan wajib (kepemudaan dan olah raga, trantribum Linmas, Kearsipan dan perpustakaan) dan 2 (dua) urusan pilihan perindustrian dan perdagangan dengan prestasi sedang (S) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang

Realisasi indikator kinerja skor nilai LPPD diperoleh dari dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2019 oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 4 kategori prestasi keberhasilan sebagai berikut:

NO	INDEKS LPPD	PRESTASI
1	3,00<.....≤4,00	Sangat Tinggi



2	2,00<.....≤3,00	Tinggi
3	1,00<.....≤2,00 Sedang	Sedang
4	0,00≤.....≤1,00 Rendah	Rendah

Realisasi dan capaian indikator kinerja skor nilai LPPD Tahun 2019 pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Nilai LPPD
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Nilai LPPD	skor	3300	3209	97.24

Formulasi capaian indikator kinerja Skor Nilai LPPD

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah oleh Kemendagri

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Skor Nilai LPPD Tahun 2019 :	$\frac{3,209}{3,300} \times 100\% = 97,24\%$
--------------------------------------	--

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Skor Nilai LPPD Tahun 2020 adalah 3,230 dan terealisasi sebesar 3,209 dengan capaian adalah 97,24%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong ***Sangat Berhasil*** dengan predikat ***Sangat Baik***.

Melihat sumberdaya yang dimiliki Pesisir Selatan, target nilai EKPPD 3,230 dengan skor penilaian sangat tinggi adalah target optimis dan realitis untuk dapat dicapai. Upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen kepala daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan urusan pilihan) menjadikan EKPPD sebagai ukuran dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Menyediakan sumberdaya manusia ((aparatur) dan dukungan anggaran yang memadai pada setiap perangkat daerah untuk menyusun dan menyajikan seluruh dokumen laporan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,



- termasuk LPPD. Dengan demikian setiap perangkat daerah akan menyusun berbagai dokumen laporan seperti LKD, LKJIP, LKPJ dan LPPD dengan satu basis data
3. Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang capaian IKK urusan pemerintahan sangat tinggi dan melakukan pembinaan kepada perangkat daerah dengan capaian IKK rendah
 4. Menetapkan perangkat daerah sebagai penanggungjawab utama dalam pencapaian IKK sesuai dengan urusan pemerintahan dan menentukan perangkat daerah lainnya penunjang dalam pencapaian IKK tersebut. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kelengkapan data pokok dan data penunjang sebagai lampiran yang diperlukan dalam proses evaluasi.

4. Level Maturitas SPIP

Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggara pemerintah yang baik. Pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan penyelenggaraan pemerintah yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP. Dengan adanya SPIP diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan, sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan Negara.

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik kualitas pengendalian internnya. Selain itu penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Indikator kinerja ini berupa tingkat kematangan implementasi SPIP yang berskala 1-5 sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern.

Pada tahun 2020, level Maturitas SPIP Kabupaten Pesisir Selatan meraih peringkat level 3. Tercapainya target tersebut disebabkan karena kelengkapan



dokumen atau bukti pendukung telah terpenuhi yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta Pementuan Pengendalian Intern. Kabupaten Pesisir Selatan berada pada level 3 berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor LHE-624/PW02/3/2017 tanggal 29 Desember 2017. Berikut tabel 2.12, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2020.

Tabel 2.12
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Level Maturitas SPIP	level	3	3	100

Formulasi capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP

Hasil Quality Assurance (QA) Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
(BPKP-RI)

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Level Maritas SPIP Tahun 2019 : $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2020 adalah 3 dan realisasi level 3 dengan capaian adalah 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong ***Sangat Berhasil*** dengan predikat ***Sangat Baik***.

Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 telah berada pada level 3 artinya secara umum menunjukkan bahwa SPIP telah dipraktekkan diseluruh organisasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan didukung dengan sistem pendokumentasian yang memadai, namun efektifitas pengendalian belum seluruhnya dievaluasi sehingga terdapat kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Beberapa infrastruktur pengendalian intern yang masih belum dilaksanakan secara memadai yaitu :

1. Belum sepenuhnya mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah serta belum mendokumentasikan secara konsisten.
2. Belum melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah secara berkala dan terdokumentasi.
3. Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan.
4. Belum memiliki petunjuk teknis/pelaksanaan terkait penilaian resiko, mulai dari penyusunan daftar resiko (risk register), peta resiko sampai dengan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan berlaku pada seluruh Perangkat Daerah secara Komprehensif.

Untuk dapat ke level yang lebih tinggi dari capaian sekarang maka perlu melakukan :

1. Mengoptimalkan implementasi SPIP.
2. Menyusunan dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2019, dan inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Koordinator.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri terhadap semua PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan aplikasi web site.
4. Membuat pedoman penilaian risiko secara khusus dan menyusun RTP berbasis risiko secara komprehensif atas program/kegiatan utama PD dan mengimplementasikan menjadi dasar perencanaan kegiatan yang harus ditindaklanjuti oleh PD terkait.
5. Setiap Kepala PD terkait agar melakukan evaluasi secara berkala atas:
 - a. Aturan perilaku dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara.
 - b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.
 - c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggungjawab.
 - e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM.
 - f. Hasil kinerja pengawasan inspektorat secara internal dan eksternal.
 - g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja.
 - h. Rekonsiliasi antar PD.
 - i. Meningkatkan Kinerja Pegawai PD.



- j. Pengendalian Umum dan pengendalian kinerja yang signifikan.
- k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
- l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN antara lain :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
5. Program Pemantapan Otonomi Daerah
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
7. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
9. Perencanaan pembangunan Daerah
10. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
11. Program Pemantapan Otonomi Daerah

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp20,610,988,423,- terealisasi sebesar Rp19,777,928,533,- atau 95.96 %. Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp833,059,890,- atau 4,04 %.

Sasaran 2 : Terwujudnya Peningkatan Akses Kualitas Pelayanan Dasar

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.13 berikut ini:



Tabel 2.13
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Umur Harapan Hidup	tahun	70.50	70.86	100.51
2.	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.49	8.26	97.29
3.	Harapan Lama Sekolah	tahun	13.58	13.32	98.09
<i>Rata-rata Capaian</i>					98,63

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 98,63%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat ***Sangat Baik***.

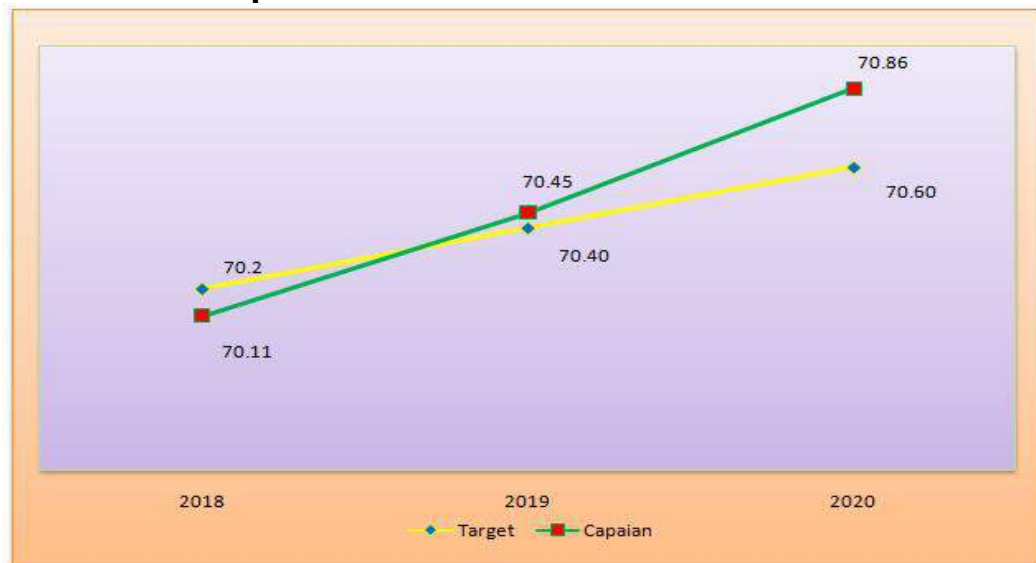
1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, mencakup gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Selain itu Umur Harapan Hidup (UHH) juga merupakan indikator yang digunakan dalam membentuk Indek Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Umur harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.

Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Kesehatan adalah indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Umur Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan yang cukup baik. Untuk lebih jelasnya gambaran UHH Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2018 s.d. 2020 dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 :
Target dan Capaian Usia Harapan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 s.d. 2020



Berikut gambaran perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Propinsi Sumatera Barat dan beberapa Kabupaten/Kota terdekat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut ini:

Tabel 2.14
Perbandingan Umur Harapan Hidup
Kab. Pesisir Selatan dengan Prop. Sumatera Barat
dan Kab./Kota terdekat Tahun 2018 s.d. 2019

No.	Uraian	Umur Harapan Hidup (tahun)		
		2018	2019	2020
1.	Pesisir Selatan	70,23	70,45	70,86
2.	Mentawai	64,37	64,49	
3.	Solok	67,65	67,95	
4.	Padang	73,20	73,35	
5.	Solok Selatan	66,92	67,21	
Sumatera Barat		69,01	69,31	69,47

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa umur harapan hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Begitu juga bila dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat dan 3 Kabupaten tetangga, dimana umur harapan hidup Kabupaten Pesisir Selatan masih

berada diatas ketiga daerah tersebut. Perbandingan UHH Kabupaten Pesisir Selatan dengan UHH Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 s.d. 2020 dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini:



Gambar 2.2 : UHH Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan UHH Prop. Sumatera Barat Tahun 2018 s.d. 2020

Dari tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Umur Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan melampaui capaian UHH Propinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk tingkat nasional belum dapat dibandingkan karena angka tersebut merupakan angka Susenas yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat dalam hal ini merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pencapaian UHH di Kabupaten Pesisir Selatan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat terutama bayi dan ibu melahirkan. Beberapa indikator pendukung pencapaian Umur Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir selatan antara lain

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh dari input data di Puskesmas yang tersebar di daerah ini. Berikut rincian angka kematian ibu tahun 2018-2020 yang diperoleh dari 18 puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel 2.15
Angka Kematian Ibu (AKI)
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020

Indikator	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu (AKI)	96/ 100.000 KH	92.3/ 100.000 KH	103,27%	92/ 100.000 KH	66/ 100.000 KH	128%	92/ 100.000 KH	98/ 100.000 KH	93%
/ 100.000 KH	9 org	8 org		8 org	6 org		6 org	9 org	

Sumber : LKj Dinas Kesehatan, 2020

Tabel 2.16
Jumlah Kematian Ibu Per Puskesmas
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020

NO	PUSKESMAS	Jumlah Lahir Hidup			Jumlah Kematian Ibu		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Barung2 Belantai	418	414	397	1	0	0
2	Tarusan	501	517	515	0	0	1
3	Pasar Baru	385	415	413	0	0	1
4	Koto Berapak	332	350	333	1	0	0
5	Asam Kumbang	114	102	122	0	0	0
6	Salido	669	723	637	1	1	1
7	Lumpo	189	193	212	0	0	0
8	Pasar Kuok	399	390	383	0	0	1
9	IV Koto Mudik	196	202	171	0	0	0
10	Surantih	1003	1016	984	0	0	1
11	Kambang	793	762	746	1	1	0
12	Koto Baru	327	343	273	0	0	0
13	Balai Selasa	567	543	543	1	1	1
14	Air Haji	936	915	888	0	1	0
15	Air Pura		372	347		1	1
16	Indera Pura	537	546	501	1	1	0
17	Tapan	560	257	271	1	0	0
18	Rahul		283	278		1	1
19	Tanjung Beringin	435	429	393	0	0	0
20	Tanjung makmur	320	297	257	1	0	1
	JUMLAH	8670	9070	8664	8	6	9

Sumber : LKj Dinas Kesehatan, 2020



Dari tabel 2.16 di atas dapat dijelaskan bahwa, jumlah kematian ibu yang ada di Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 9 orang, menurun dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah 8 orang dan 6 orang. Kasus Kematian Ibu disebabkan oleh satu orang disebabkan oleh Perdarahan, 2 (dua) orang disebabkan oleh Hipertensi dalam Kehamilan, 1 (satu) orang mengalami gangguan Sistem Peredaran darah, serta 5 (Lima) orang lainnya Sirosis Hepatis, CA Mame, Nifas, Emboli dan Infeksi Paru.

b. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan angka yang diperoleh dari 18 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut 2.17 tabel Angka kematian bayi di Kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel 2.17
Angka Kematian Bayi (AKB)
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020

Indikator	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH	23/ 1000 KH	10.84/ 1000 KH	152.80%	22/ 1000 KH	8.59/ 1000 KH	161%	21/ 1000 KH	6.9/ 1000 KH	167%

Sumber : LKj Dinas Kesehatan, 2020

Tabel 2.18
Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020

NO	Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup			Jumlah Kematian Bayi		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Barung-barung Belantai	418	429	397	7	6	4
2	Tarusan	501	554	515	9	12	9
3	Pasar Baru	385	439	413	4	2	2
4	Koto Berapak	332	347	333	5	2	2
5	Asam Kumbang	114	176	122	4	3	2
6	Salido	669	727	637	7	6	3
7	Lumpo	189	216	212	9	0	0
8	Pasar Kuok	399	399	383	7	4	7
9	IV Koto Mudik	196	276	171	9	2	6
10	Surantih	1003	1000	984	0	10	5



11	Kambang	793	752	746	12	7	1
12	Koto Baru	327	353	273	1	4	2
13	Balai Selasa	567	607	543	7	6	3
14	Air Haji	936	897	888	3	3	4
15	Air Pura		320	347		0	0
16	Indera Pura	537	520	501	4	2	1
17	Tapan	560	276	271	1	3	5
18	Rahul		297	278		0	2
19	Tanjung Beringin	435	421	393	3	4	4
20	Tanjung makmur	320	300	257	2	2	2
JUMLAH		8670	9276	8664	94	78	64

Sumber : LKj Dinas Kesehatan, 2020

Jumlah Kematian bayi paling tinggi pada tahun 2020 ada di Puskesmas Tarusan, yaitu berjumlah 9 orang. Dari 64 bayi yang meninggal, penyebabnya antara lain BBLR, Asfiksia, Sepsis, Kelainan Bawaan, dan lainnya.

Terjadi penurunan jumlah kematian bayi dari tahun 2018 s.d tahun 2020 yaitu dari 94 orang menjadi 64 orang di tahun 2020. Sedangkan jumlah kelahiran pada tahun 2020 adalah 8664 orang.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kematian ibu dan bayi tersebut. Kebijakan teknis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi adalah :

1. Mengalokasikan anggaran persalinan (Jampersal) bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya.
2. Menyediakan rumah tunggu dan menyediakan konsumsi bagi pasien dan keluarga yang berdomisili jauh dari RSUD M. Zein Painan.
3. Menyediakan biaya transportasi bagi pasien yang akan dirujuk ke pelayanan yang lebih tinggi / ke M. Djamil Padang.
4. Mengadakan Audit Maternal Perinatal (AMP) berkoordinasi dengan dokter spesialis obgyn dan spesialis anak RSUD M. Zein Painan
5. Intervensi prioritas untuk mengatasi penyebab utama Kematian Ibu dan bayi.
6. Meningkatkan universal access dan coverage untuk pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana.
 - Pelayanan Antenatal yang sesuai dengan standar
 - Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas balita yang telah dilaksanakan di seluruh Puskesmas.



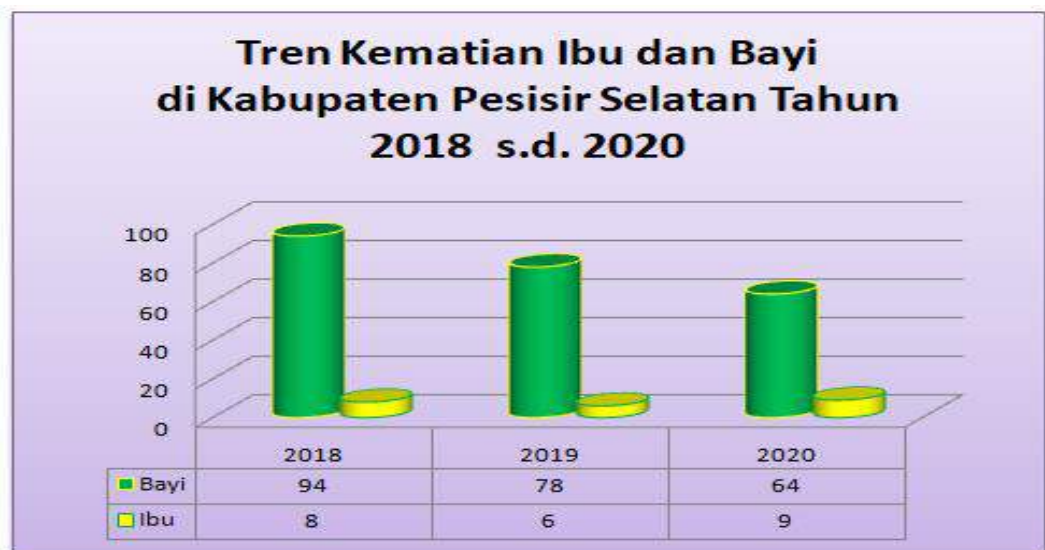
- Melakukan kunjungan ke rumah ibu hamil resiko tinggi yang dilaksanakan oleh tenaga Puskesmas.
- Mengaktifkan Program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) pada masing-masing nagari Siaga

Dengan melakukan audit kematian ke Puskesmas terkait.

- 1) Mendorong persalinan dengan tenaga kesehatan di fasyankes.
- 2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif) dan PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar)
- 3) Meningkatkan kualitas in service training dan distribusi tenaga kesehatan : Bidan, perawat, dokter, dokter spesialis (tugas belajar, pengiriman residen, sister hospistal)
- 4) Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan : Obat program dan bahan habis pakai, sarana/alat PONEK dan PONEK.
- 5) Menerapkan standar pelayanan kesehatan di Poskesdes / Polindes, Pustu (Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit)
- 6) Memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam KIA untuk meningkatkan health care seeking.
- 7) Pengaturan taskshifting dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
- 8) Peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang ada melalui dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, Dana Alokasi Khusus, Jamkesmas dan Jampersal.
- 9) Penguatan Jejaring KIA
- 10) Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Perguruan tinggi dan swasta Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas balita yang telah dilaksanakan di seluruh Puskesmas

Adapun tren kematian ibu dan bayi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut :





**Gambar 2.3 : Tren Jumlah Kematian Ibu dan Bayi
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 s.d. 2020**

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat jumlah kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, sementara untuk jumlah kematian bayi, terjadi peningkatan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Gambaran ini menunjukkan adanya upaya dari pihak pihak terkait dalam menekan jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun upaya menurunkan kematian ibu dan bayi antara lain adalah :

1. Meningkatkan universal access dan coverage untuk pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana.
 - a. Pelayanan Antenatal yang sesuai dengan standar
 - b. Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas balita yang telah dilaksanakan di seluruh Puskesmas.
 - c. Melakukan kunjungan ke rumah ibu hamil resiko tinggi yang dilaksanakan oleh tenaga Puskesmas
 - d. Intervensi prioritas untuk mengatasi penyebab utama Kematian Ibu dan bayi. Dengan melakukan audit kematian ke Puskesmas terkait.
 - e. Mendorong persalinan dengan tenaga kesehatan di fasyankes.
 - f. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif) dan PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar)

- g. Meningkatkan kualitas in service training dan distribusi tenaga kesehatan : Bidan, perawat, dokter, dokter spesialis (tugas belajar, pengiriman residen, sister hospistal)
- h. Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan : Obat program dan bahan habis pakai, sarana/alat PONEK dan PONEK.
- i. Menerapkan standar pelayanan kesehatan di Poskesdes / Polindes, Pustu (Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit)
- j. Memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam KIA untuk meningkatkan health care seeking.
- k. Pengaturan taskshifting dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
- l. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatanyang ada melalui dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, Dana Alokasi Khusus, Jamkesmas dan Jampersal.
- m. Penguatan Jejaring KIA
- n. Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Perguruan tinggi dan swasta.

Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun dapat dilihat dari tabel 2.19 dibawah ini:

Tabel 2.19
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Umur Harapan Hidup
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Umur Harapan Hidup	tahun	70,50	70,86	100,51

Formulasi capaian indikator kinerja Umur Harapan Hidup

Angka perkiraan lama hidup rata rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Umur Harapan Hidup Tahun 2019 :	$\frac{70,86}{70,50}$	X	100%	=	100,51%
---	-----------------------	---	------	---	---------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Umur Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah 70,50 dan terealisasi 70,86 dengan



capaian adalah 100,51%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong ***Sangat Berhasil*** dengan predikat ***Sangat Baik***.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar pendudukan usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,49 tahun dan terealisasi sebesar 8,26. Berikut tabel 2.20 target dan realisasi rata rata lama sekolah tahun 2020:

Tabel 2.20
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,49	8,26	97,29

Formulasi capaian indikator kinerja Rata rata Lama Sekolah

Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yg telah diselesaikan dalam jenjang pendidikan formal

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019 :	$\frac{8,26}{8,49}$	X	100%	=	97,29%
---	---------------------	---	------	---	--------

Dari di atas dapat digambarkan bahwa rata rata lama sekolah tahun 2020 ditargetkan sebesar 8,49 tahun, terealisasi sebesar 8,26 tahun atau dengan capaian 97.29%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai sangat berhasil dengan kategori sangat baik.

Dibandingkan tahun 2019 sampai 2020, rata lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan, seperti tabel 2.21 berikut ini:

Tabel 2.21
Perkembangan Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2018–2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2019	2020
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,25	8,26

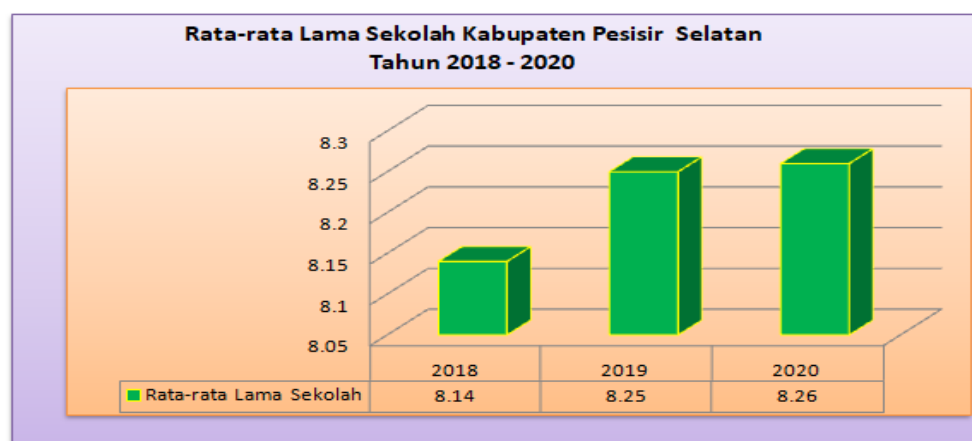


Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya, Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi ke-11 setelah Kabupaten Tanah Datar. Berikut tabel 2.22, perbandingan rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2019–2020:

Tabel 2.22
Perbandingan Rata rata Lama Sekolah
Kabupaten/Kota Tahun 2019–2020

Kabupaten/Kota		Tahun	
		2019	2020
(1)		(2)	(3)
Kabupaten			
1.	Kepulauan Mentawai	7.08	7.09
2.	Pesisir Selatan	8.25	8.26
3.	Solok	7.85	7.86
4.	Sijunjung	8.10	8.11
5.	Tanah Datar	8.45	8.61
6.	Padang Pariaman	7.86	8.87
7.	Agam	8.85	8.96
8.	Lima Puluh Kota	7.98	7.99
9.	Pasaman	7.86	8.09
10.	Solok Selatan	8.16	8.28
11.	Dharmasraya	8.46	8.47
12.	Pasaman Barat	8.06	8.19
Kota			
13.	Padang	11.34	11.58
14.	Solok	11.02	11.03
15.	Sawahlunto	9.97	10.17
16.	Padang Panjang	11.45	11.62
17.	Bukittinggi	11.32	11.33
18.	Payakumbuh	10.72	10.73
19.	Pariaman	10.37	10.59
Sumatera Barat		8.92	8.99

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020



Gambar 2.4 : Perkembangan Rata rata Lama Sekolah Tahun 2018-2020

3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan

pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2020, target indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 13,58 tahun dan terealisasi sebesar 13,32 tahun dengan capaian kinerja sebesar 98,63%. Berikut table 2.23, target dan realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2020:

Tabel 2.23
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,58	13,32	98,63

Formulasi capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah

Jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk berusia 7 tahun ke atas untuk
menyelesaikan pendidikannya

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 :	$\frac{13,32}{13,58}$	X	100%	=	98,63%
---	-----------------------	---	------	---	--------

Dari di atas dapat digambarkan bahwa harapan lama sekolah tahun 2020 ditargetkan sebesar 13,58 tahun, terealisasi sebesar 13,32 tahun atau dengan capaian 98,63%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai kategori **sangat baik**.

Dibandingkan tahun 2019 sampai 2020, Harapan lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan, seperti tabel 2.24 berikut ini:



Tabel 2.24
Perkembangan Indikator KinerjaHarapan Lama Sekolah
Tahun 2019–2020

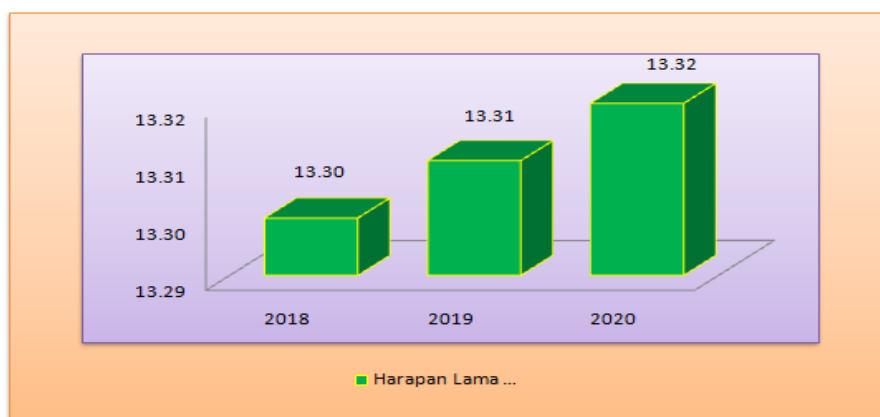
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2019	2020
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,31	13,32

Sedangkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya, Harapan lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi ke-11 setelah Kabupaten Lima Puluh Kota berikut tabel perbandingan Harapan lama sekolah 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2019-2020:

Tabel 2.25
Perbandingan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten/Kota Tahun 2019–2020

Kabupaten/Kota		Tahun	
		2019	2020
(1)		(3)	(4)
Kabupaten			
1.	Kepulauan Mentawai	12.76	12, 82
2.	Pesisir Selatan	13.31	13, 32
3.	Solok	13.03	13, 04
4.	Sijunjung	12.36	12, 37
5.	Tanah Datar	14.32	14, 33
6.	Padang Pariaman	13.62	13, 67
7.	Agam	13.86	13, 87
8.	Lima Puluh Kota	13.28	13, 29
9.	Pasaman	12.79	12, 80
10.	Solok Selatan	12.70	12, 71
11.	Dharmasraya	12.42	12, 43
12.	Pasaman Barat	13.40	13, 61
Kota			
13.	Padang	16.51	16, 52
14.	Solok	14.31	14, 32
15.	Sawahlunto	13.16	13, 17
16.	Padang Panjang	15.05	15, 06
17.	Bukittinggi	14.96	14, 97
18.	Payakumbuh	14.25	14, 26
19.	Pariaman	14.53	14, 54
Sumatera Barat		14.01	14,02

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020



Gambar 2.5 : Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2020

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapan lama dan Peringkat UN Sekolah Dasar Se-Sumatera Barat, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Keberhasilan program pendidikan 9 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari pencapaian APK, APM dan APS tingkat SD dan SMP. Berikut tabel 2.26, perkembangan APK, APM dan APS SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel 2.26
Perkembangan Pencapaian APK dan APM SD, SMP
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2018	2019	2020
			Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	- SD/MI/Paket A	%	124,20%	124,10%	124,01%
	- SMP/MTs/Paket B	%	103,01%	102,51%	102,39%
2	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	- SD/MI/Paket A	%	99,42%	99,51%	99,53%
	- SMP/MTs/Paket B	%	90,18%	91,34%	91,38%

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan, 2020

Formulasi :

APK SD/MI : $\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun}} \times 100\%$

APK SD/MI : $\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun}} \times 100\%$

APM SD/MI : $\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI Usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\%$



Jumlah Penduduk Usia 7 -12 tahun

$$\text{APK SMP/MTs} : \frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs Usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 -15 tahun}} \times 100\%$$

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan APK SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target APK tahun 2018 tingkat SD realisasi 124,20%, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 124,10% sedangkan pada tahun 2020 realisasi sebesar 124,01%. Pada tahun 2018 APK SMP realisasi 103,01 %, tahun 2019 naik menjadi 102,51% dan tahun 2020 realisasi 102,39%. Sedangkan untuk kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk APM SD tahun 2018 realisasi mencapai 99,42%, tahun 2019 terealisasi 99,51%, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 99,53%. Untuk SMP APM tahun 2018 terealisasi 90,18%, tahun 2019 realisasi 91,34% dan tahun 2020 mencapai 91,38%.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar antara lain :

1. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik
2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Program Standar Pelayanan Kesehatan
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
10. Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
14. Program Pendidikan Anak Usia Dini
15. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
16. Program Pendidikan Non Formal
17. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp747,446,237,111,– terealisasi sebesar Rp720,191,629,052,– atau 96,35% Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan



kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp27.254.608.059,- atau 3,65 %.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi secara Berkelanjutan

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.27 berikut ini:

Tabel 2.27
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	<i>Incremental capital Output Ratio (ICOR)</i>	tanpa satuan	5,80	5,92*	102,07
<i>Rata-rata Capaian</i>					102,07

* Data sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 102,07%. Pencapaian sasaran strategis 3 kategori kebrhasilannya termasuk **Sangat Baik**.

Indikator *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* merupakan indikator baru dalam perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. *ICOR* adalah rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output (PDRB). Data *ICOR* ini biasanya digunakan untuk mengestimasi :

1. Kebutuhan total investasi untuk mewujudkan suatu target pertumbuhan tertentu atau
2. Tingkat kebutuhan output (PDRB) yang akan dihasilkan dari besaran investasi tertentu

Terkait dengan capaian *ICOR* pada tahun 2020, dalam laporan ini tidak semua indikator pendukung dapat dijelaskan karena angka *ICOR* itu sendiri dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metoda-metoda tertentu dengan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur munculnya data *ICOR*. Namun demikian ada beberapa indikator yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator *ICOR* pada tahun 2020 yang berkaitan langsung dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, seperti pada tabel 2.28 berikut ini:



Tabel 2.28
Target dan Realisasi Indikator Yang Berkontribusi Terhadap
***Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* Tahun 2020**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase jalan Kabupaten dengan kondisi baik	%	29.90	29.55	98.83
2.	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	45.66	42.00	91.98
3.	Persentase Irigasi kondisi baik	%	54,27	57,05	105,12
4.	Persentase Pasar Rakyat yang menuju Kriteria SNI	%	36,36	36,36	100
5.	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	%	30	30	100
6.	Jumlah Realisasi Investasi Daerah	Rp.(milyar)	200	345	172.51

1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Persentase jalan kondisi baik diperoleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2020 dan pemuktahiran *database* jalan. Panjang jalan Kabupaten adalah 2333.18 Km, dan di targetkan pada akhir tahun 2020 persentase jalan kondisi baik adalah 29,90%. dengan realisasi 29,55 % atau dengan capaian sebesar 98,83%. Pemuktahiran *data base* jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan baik itu pekerjaan perbaikan/pemeliharaan/ peningkatan kualitas jalan. Data kondisi jalan menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, panjang jalan kota dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat dihitung persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik. Berikut tabel 2.29, rincian jalan berdasarkan jenis dan kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020:

Tabel 2.29
Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis
dan Kondisi Jalan Tahun 2018-2020

No	Jenis dan Kondisi Jalan	Realisasi					
		2018		2019		2020	
		(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)
1.	Baik	650.18	27.82%	658,64	28,23	689,47	29.55
2.	Sedang	250.61	10.74%	258,34	11,07	252,28	10.18
3.	Rusak	548.23	23.50%	559,00	23,96	382,85	16.41
4.	Rusak Berat	884.16	37.94%	857,21	36,74	1008,58	43.23
Jumlah		2.333,18	100	2.333,18	100	2333,18	100

Sumber: LKj Dinas PU dan Penataan Ruang , 2020

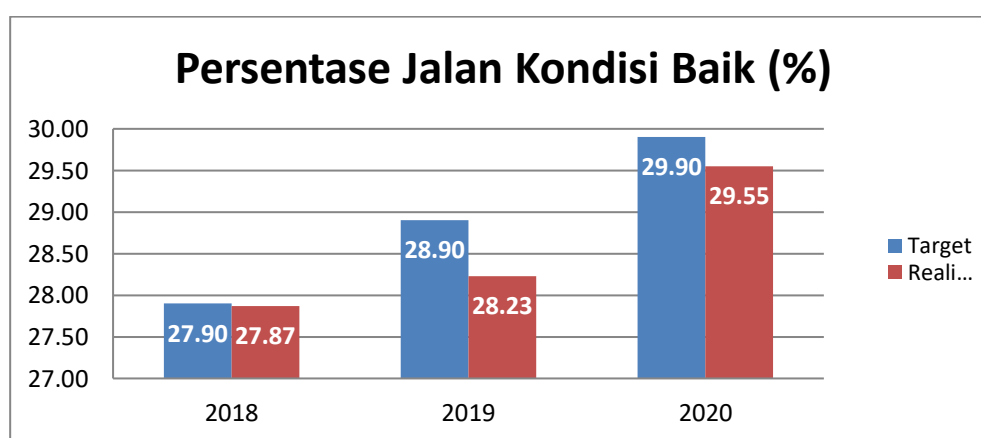


Dari tabel 3.30 di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kondisi jalan baik dari 658.64 km (28,23%) tahun 2019 menjadi 689.47 km (29,55%) pada tahun 2020 atau meningkat sebesar (1,32%). Bertambahnya kondisi jalan baik di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan karena makin berkurangnya kondisi jalan sedang dan jalan rusak. Bila dibandingkan pada tahun 2019 kondisi jalan sedang mengalami penurunan dari 258,34 km menjadi 252,28 km tahun 2020, sedangkan jalan rusak mengalami penurunan dari 559,00 km (23,96 %) menjadi 382.85 km (16.41%) pada tahun 2020.

Tabel 2.30
Target dan Realisasi Jalan Kondisi Baik Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	27.90	28.90	29.90	30.90
2	Realisasi (%)	27.87	28.23	29,55	

Sumber: LKj Dinas PU dan Penataan Ruang, 2020



Gambar 2.6 : Target dan realisasi per tahun Jalan Kondisi baik menurut Renstra 2018-2020

Capaian Indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di peroleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2020 dan pemutakhiran *database* jalan. Pemutakhiran *database* jalan dilakukan pada bulan desember. Pemutakhiran *database* jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan baik itu pekerjaan pembangunan, peningkatan kuantitas dan pemeliharaan jalan. Data kondisi jalan menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat

di hitung persentase panjang jalan status kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi mantap. Berikut tabel 2.31, realisasi dan capaian Jalan Kabupaten kondisi baik tahun 2020:

Tabel 2.31
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	29,90	29,55	98,83

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase jalan kondisi baik

$$= \frac{\text{Panjang Jalan Kabupten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jalan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2019 :	$\frac{29,90}{29,55}$	X	100%	=	98,83%
--	-----------------------	---	------	---	--------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020, target jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 29,90% dengan realisasi sebesar 29,55% dengan capaian sebesar 98,83%. Berdasarkan pencapaian kondisi jalan baik diatas, klasifikasi penilaian indikator kinerja persentase jalan kondisi baik kategori keberhasilannya adalah **Sangat Baik**.

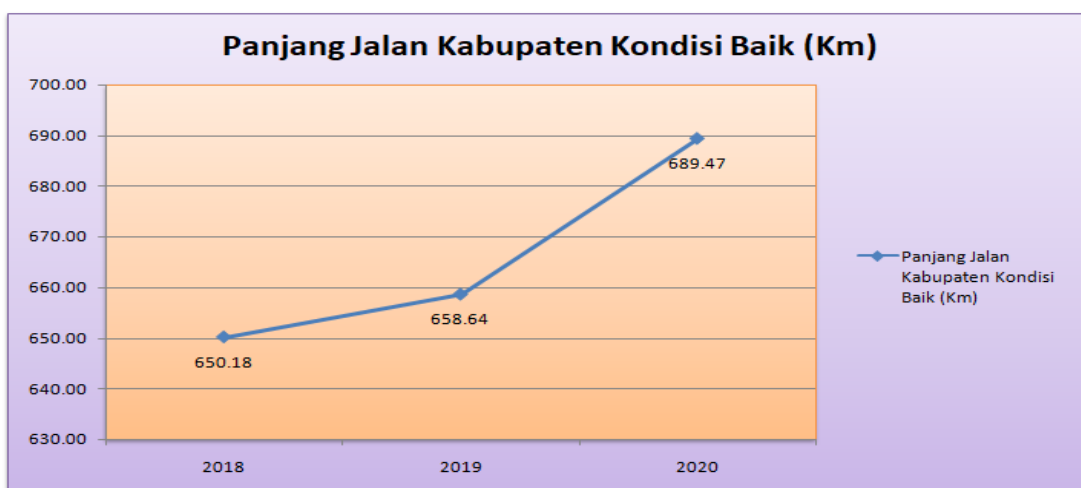
Tabel 2.32
Jenis, Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020

No.	Jenis Kondisi dan	Status Jalan		
		Jalan Kabupaten		
		2018	2019	2020
		Km	Km	Km
A	Jenis Permukaan			
	1 Aspal	749.79	761.35	680.11
	2 Kerikil	631.34	622.83	722.01
	3 Beton	234.13	231.38	706.50
	4 Tanah	717.92	717.62	224.56
	Jumlah	2333.18	2333.18	2333.18
B	Kondisi Jalan			
	1 Baik	650.18	658.64	689.47
	2 Sedang	250.61	258.34	252.28



	3	Rusak	548.23	559.00	382.85
	4	Rusak Berat	884.16	857.21	1008.58
Jumlah			2,333.18	2,333.18	2333.18
C	Panjang Jalan				
	1	Kelas I			
	2	Kelas Jalan II			
	3	Kelas Jalan III	232.90	232.90	232.90
	4	Kelas Jalan III A	376.50	376.50	376.50
	5	Kelas Jalan III B	413.26	413.26	413.26
	6	Kelas Jalan III C	-	-	
	7	Kelas Tidak Rinci	1310.52	1310.52	1310.52
Jumlah			2333.18	2333.18	2333.18

Sumber: LKj Dinas PU dan Penataan Ruang, 2020



Gambar 2.7 : Kenaikan Panjang Jalan Kondisi Baik Tahun 2018-2020

2. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

Data kondisi jembatan menyajikan panjang jembatan total yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, panjang jembatan dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Capaian indikator persentase panjang jembatan dalam kondisi baik diperoleh dari data kondisi jembatan tahun 2020. Data ini merupakan hasil pemuktahiran kondisi jembatan yang ada dengan pembaharuan kondisi terakhir berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan dan pemeliharaan jembatan. Hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan pada tahun 2020.

Kegiatan pembangunan, peningkatan kualitas, dan rehabilitasi serta pemeliharaan jembatan terus dilakukana sampai tahun 2020. Berikut tabel 2.33, realisasi dan capaian Jembatan Kabupaten kondisi baik tahun 2020:

Tabel 2.33
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jembatan
Kondisi Baik Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	45.66	42	91.98

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase Jembatan kabupaten dengan kondisi baik

$$\frac{\text{Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh jembatan kabupaten}} \times 100 \%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Persentase Jembata Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2019 : } \frac{42}{45,66} \times 100\% = 91,98\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target jembatan dengan kondisi baik di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebesar 45,66% dengan realisasi sebesar 42% dengan capaian sebesar 91,98%. Berdasarkan pencapaian kondisi jembatan baik tersebut, klasifikasi penilaian indikator kinerja persentase jembatan kondisi baik kategori keberhasilannya adalah ***Sangat Baik***.

Tabel 2.34
Realisasi dan capaian Jembatan Kondisi Baik Tahun 2018-2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2019	2020	2019	2020
1.	Jembatan kondisi baik	%	41.11	42	91.40	91.98

Sumber: LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , 2020

Tabel 2.35
Target dan Realisasi Jembatan Kondisi Baik Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	42.76	44.98	47.22	49.14
2	Realisasi	39.78	41.11	42	

Sumber: LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , 2020





Gambar 2.8 : Target dan realisasi Jembatan Kondisi baik Tahun 2018-2020

Tabel 2.36
Kenaikan Jumlah Jembatan Kondisi Baik
Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jembatan Kondisi Baik (unit)	179	185	189

Sumber: LKj Dinas PU dan Penataan Ruang, 2020



Gambar 2.9: Kenaikan Jumlah jembatan kondisi baik Tahun 2018 s.d 2020

Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan adalah :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Maupun Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam mendukung aksesibilitas jalan dan jembatan untuk menjamin masyarakat sampai pada tempat asal – tujuan tepat waktu, aman dan nyaman sangat tinggi baik dari sisi penyediaan dana maupun pembinaan dan pengawasan mutu jalan daerah.
2. Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan telah menjadi kegiatan rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan baik secara berkala, rutin maupun periodik setiap tahunnya.

Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan adalah :

1. *Database* jalan dan Jembatan belum terupdate secara maksimal.
2. Kegiatan inspeksi kondisi jalan dan jembatan belum optimal dilaksanakan untuk semua unit jembatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan

Strategi / Upaya Pemecahan Masalah adalah :

1. Penyiapan Dokumen pemetaan jaringan jalan dan jembatan yang terupdate sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
2. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan harus dilaksanakan secara rutin
3. Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur dan penyedia jasa sebagai unsur pelaksana pembangunan melalui diklat teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan fisik jalan dan jembatan.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan antara lain dapat dilihat pada table 2.37 berikut :

Tabel 2.37
Program yang mendukung pencapaian target
indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.688.341.140	7.357.913.024	95.70
2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	68.246.377.468	66.357.413.117	97.23
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	208.594.613	203.367.400	97.49



4	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong	1.265.540.014	1.202.808.950	95.04
5	Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan	1.391.590.000	1.260.522.880	90.58
6	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	900.000.000	824.245.000	91.59
Jumlah		79.700.443.235	77.206.310.371	96.87

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 79.700.443.235 terealisasi sebesar Rp.77.206.310.371 atau 96.87 %. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.13 % atau Rp. 2.494.132.864.

3. Persentase Irigasi kondisi baik

Total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **20.907 Ha** dan jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak **249** buah DI yang merupakan kewenangan Kabupaten, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar **18.800 Ha** dan luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **22.540 Ha** sehingga total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **62.647 Ha**.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 maka dilaksanakan pemetaan terhadap areal sawah yang ada serta untuk merevisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten Pesisir Selatan telah mengusulkan DI baru sebanyak **67 DI** sehingga total DI Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **313 DI**. Adapun luas usulan DI Kabupaten Pesisir Selatan adalah Luas baku **14.514,67 Ha**, luas potensial **10.662,42 Ha** dan luas fungsional adalah **10.269,79 Ha**. Sedang total luas fungsional Kabupaten Pesisir

Selatan baik kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi dan kewenangan pusat seluas **23.837 Ha** (kesepakatan Dinas PSDA, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Badan Pertanahan Nasional Painsan dan Badan Pusat Statistik Painsan). Data usulan ini telah di ajukan dan diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021, Bidang irigasi mempunyai beberapa indikator yang harus dicapai dalam 5 tahun mendatang. Adapun indikator bidang irigasi tersebut adalah :

1. Indeks Pertanaman Padi (kali/tahun)
2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi
3. Persentase Irigasi Kondisi Baik
4. Jumlah P3A yang aktif (kelompok)
5. Penanganan Bendung (unit)
 - Rehabilitasi ringan/sedang
 - Rehabilitasi berat/total
 - Pembangunan Baru
6. Penanganan saluran irigasi (m)
 - Rehabilitasi Saluran irigasi
 - Peningkatan kualitas saluran irigasi (saluran tanah menjadi pasangan)
7. Jumlah Klasifikasi irigasi yang ditingkatkan (DI)
8. Daerah Irigasi yang dilakukan OP (DI)
9. Jumlah P3A yang berbadan hukum
10. Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan

Realisasi dari kinerja bidang irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indeks Pertanaman Padi

Indeks pertanaman padi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 adalah sebesar **1,90** dan meningkat menjadi **1,91** pada tahun 2018, sedang pada tahun 2019 bertambah menjadi **1,95**. atau mengalami peningkatan sebesar **0,05** dari tahun 2018 ke tahun 2020. Peningkatan ini akan berpengaruh terhadap produksi pertanian yang merupakan mayoritas penghasilan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Indeks Kinerja Sistem irigasi merupakan indeks yang menilai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan hasil pertanian, adapun faktor tersebut adalah prasarana fisik, produktivitas (padi), sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan perkumpulan P3A/GP3A/IP3A.



Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 adalah sebesar **58,54** meningkat menjadi **58,81** pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 bertambah menjadi **59,03** atau mengalami peningkatan sebesar **0,49** dari tahun 2018 ke tahun 2020.

C. Persentase Irigasi Kondisi Baik

Irigasi kondisi baik adalah kondisi sawah yang dapat terairi secara lancar dan teratur. Irigasi kondisi baik ini merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 - 2021. Adapun persentase irigasi kondisi baik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 - 2020 adalah sebagai berikut:

Persentase Irigasi kondisi baik Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 adalah **51,64** meningkat menjadi **54,34** pada tahun 2019, pada tahun 2020 naik menjadi **57,05** atau mengalami peningkatan sebesar **5,41** dari tahun 2018 ke tahun 2020.

Adapun indikator bidang irigasi yang lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Indikator Bidang irigasi Tahun 2018 - 2020

No.	Indikator	Tahun		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Bendung yang direhabilitasi (unit)	6	8	6
2.	Panjang Saluran irigasi yang direhabilitasi (m)	3.042	6.149	8.565
3.	Jumlah klasifikasi Irigasi yang ditingkatkan (DI)	7	3	2
4.	Daerah irigasi yang dilaksanakan OP (DI)	26	20	21
5.	Jumlah P3A yang berbadan hukum (Klp)	12	20	28
6.	Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan (Klp)	12	20	-

Sumber : Bidang Irigasi (data diolah), 2020

Jumlah penanganan bendung baik rehabilitasi ringan/sedang, rehabilitasi berat maupun pembangunan baru dalam rentang waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 20 unit dengan rincian tahun 2018 sebanyak 6 unit, tahun 2019 sebanyak 8 unit serta tahun 2020 sebanyak 6 unit.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi peran serta masyarakat terutama masyarakat petani harus ikut berperan aktif atau partisipasi masyarakat. Kelompok masyarakat bergabung menjadi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), antara P3A bergabung menjadi Gabungan Perkumpulan



Petani Pemakai Air (GP3A) dan beberapa GP3A bersatu menjadi Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). selama tiga tahun jumlah P3A yang sudah berbadan hukum adalah sebanyak 60 kelompok dengan rincian tahun 2018 sebanyak 12 kelompok dan tahun 2019 sebanyak 20 kelompok serta pada tahun 2020 sebanyak 28 P3A.

Selain pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan, irigasi kewenangan propinsi dan pusat pada rentang tahun 2018 sampai tahun 2020 juga banyak pembangunan yang dikerjakan. Adapun pekerjaan yang cukup besar adalah Pembangunan Bendung DI Sawah Laweh di kecamatan Koto XI Tarusan dan DI Malepang Ampang Tulak di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang merupakan kewenangan pusat, dimana pembangunan bendung telah selesai dilaksanakan sedang pekerjaan saluran masih dikerjakan sampai sekarang.

Berikut tabel 2.39, realisasi dan capaian peningkatan irigasi kondisi baik tahun 2020.

Tabel 2.39
Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Persentase Irigasi Kondisi Baik Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Irigasi Kondisi Baik	%	54,27	57,05	105,12

Sumber: Dinas PSDA, data diolah, 2019

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase Irigasi kondisi baik

$$\frac{\text{Luas irigasi kondisi baik}}{\text{Total luas irigasi}} \times 100 \%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\begin{array}{l} \text{Capaian Persentase Irigasi Kondisi Baik} \\ \text{Tahun 2019 :} \end{array} \quad \frac{57,05}{54,27} \times 100\% = 105,12\%$$

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target irigasi kondisi baik di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 adalah sebesar 54,27% dan terealisasi sebesar 57,05% atau dengan capaian sebesar 105,12%. Berdasarkan pencapaian Irigasi kondisi baik tersebut, klasifikasi penilaian indikator kinerja persentase Irigasi kondisi baik kategori keberhasilannya adalah **Sangat Baik**.

4. Persentase pasar rakyat yang menuju kriteria SNI

SNI Pasar Rakyat merupakan standarisasi baku dalam pengelolaan pasar rakyat. SNI Pasar Rakyat bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengelola, membangun serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat. "Dengan demikian Pasar Rakyat dikelola secara profesional dan menjadi sarana perdagangan yang kompetitif terhadap pusat perbelanjaan, pertokoan maupun pusat perdagangan lainnya, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen,".

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Dalam aturan tersebut di atas menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus berpedoman kepada SNI Pasar Rakyat (SNI 8152.2015), ditetapkan menjadi SNI oleh Kepala BSN melalui Surat Keputusan No. 84/Kep/BSN/04/2015 pada 6 April 2015.

Terdapat **3 persyaratan** dalam SNI pasar rakyat yaitu :

- a. **Persyaratan umum** terdiri dari lokasi pasar, kebersihan dan kesehatan, serta keamanan dan kenyamanan.
- b. **Persyaratan teknis** terdiri dari ruang dagang, aksesibilitas dan zona, pos ukur ulang dan sidang tera, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan dalam bangunan, pencahayaan, sirkulasi udara, drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, sarana telekomunikasi, dan keselamatan dalam bangunan.
- c. **Persyaratan pengelolaan** terdiri dari prinsip pengelolaan pasar, tugas pokok dan fungsi pengelola pasar, prosedur kerja pengelola pasar, struktur pengelola pasar, pemberdayaan pedagang, serta pembangunan pasar.

Prinsip revitalisasi pasar rakyat harus memenuhi 4 aspek yaitu revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi dan sosial. "Revitalisasi fisik dan manajemen sudah tercantum dalam SNI Pasar Rakyat. Bagaimana meningkatkan kualitas fasilitasnya dan bagaimana pengelolaannya,". Sementara revitalisasi ekonomi dan sosial mengarah pada bagaimana proses sebuah pasar berkembang, tumbuh, berdaya saing serta memberikan pendapatan yang meningkat bagi pedagang dan lingkungan ekonomi di sekitarnya, terjadinya peningkatan ekonomi, yang akhirnya terjadi peningkatan omset.

Kedepan pasar-pasar yang direvitalisasi dan menerapkan SNI Pasar Rakyat, akan mengalami peningkatan ekonomi lebih banyak lagi. Revitalisasi yang terjadi tidak hanya berupa pembangunan pasar baru tetapi merevitalisasi pasar –pasar yang sudah ada menjadi baru dan berdaya saing. Pada akhirnya pasar rakyat yang ber-SNI ini akan hidup berdampingan dengan pasar modern yang saling berkembang bersama. Dari persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat, semuanya mengarah pada K3L. ("Bagaimana kesehatannya, mengelola keamanan dan keselamatan,") lingkungannya.

Kegiatan pembangunan dan atau revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya tetap mempedomani peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yakni Pasar Rakyat menuju kriteria SNI. Pada tahun 2020 belum semuanya persyaratan SNI Pasar Rakyat dapat terpenuhi, mengingat keterbatasan anggaran, hanya beberapa kriteria SNI yang dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi daerah.

Berikut data capaian indikator urusan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tabel 2.40 dibawah ini :

Tabel 2.40
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pasar Rakyat
Menuju Kriteria SNI Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	%	36,36	36,36	100

Sumber: Dinas Koperias, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase Pasar Rakyat Menuju SNI

$$\frac{\text{Jumlah pasar menuju Kriteria SNI Th. N}}{\text{Jumlah pasar rakyat yang dikelola Pemda}} \times 100 \%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase Pasar Rakyat yang menuju kriteria SNI Tahun 2020 :	$\frac{36,36}{36,36}$	X	100%	=	100%
---	-----------------------	---	------	---	------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target indikator kinerja Persentase Pasar Rakyat menuju kriteria SNI tahun 2020 adalah 36,36% dengan realisasi sebesar

36,36% dengan capaian sebesar 100%. Berdasarkan pencapaian indikator kinerja tersebut, kriteria keberhasilan capaiannya **Sangat Baik**.

Dari 11 Pasar Yang dikelola Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan, 4 (empat) diantaranya telah menuju beberapa kriteria SNI yang disyaratkan yaitu Pasar Rakyat Painan, Pasar Rakyat Kambang, Pasar Rakyat Batang Kapas dan Pasar Rakyat Tapan.

Pengalokasian anggaran dan pelaksanaan pembangunan pasar pada tahun 2020 dititik beratkan pada beberapa Pasar Rakyat dengan melakukan pembangunan dan Revitalisasi serta melengkapi fasilitas Ruang Dagang (kios/toko), Struktur Pengelola, Papan *Display* Informasi Harga, Pengawasan Kemetrolagian (Penggunaan timbangan Ukur Ulang), Pelayanan Tera Ulang.

Tabel 2.41
Nama Pasar dan Lokasi Pasar Rakyat Per Kecamatan
Tahun 2020

No	NAMA PASAR	LOKASI/KECAMATAN
1	Pasar Tarusan	Koto XI Tarusan
2	Pasar Pasar Baru	Bayang
3	Pasar Sago	IV Jurai
4	Pasar Painan	IV Jurai
5	Pasar Batang Kapas	Batang Kapas
6	Pasar Kambang	Lengayang
7	Pasar Balai Selasa	Ranah Pesisir
8	Pasar Air Haji	Linggo Sari Baganti
9	Pasar Inderapura	Pancung Soal
10	Pasar Tapan	Basa Ampek Balai Tapan
11	Pasar Lumpo	IV Jurai

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perindag Kab.Pesisir Selatan, Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga mendapatkan kembali Alokasi anggaran dari dana APBN melalui Kementerian Perdagangan RI (Dana Tugas Pembantuan) untuk Pembangunan Pasar Rakyat Lakitan yang berlokasi di Kecamatan Lengayang, pembangunan pasar rakyat tersebut telah berpedoman pada SNI pasar rakyat.

5. Persentase Peningkatan cakupan layanan komunikasi

Layanan komunikasi yaitu jasa yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jasa telekomunikasi terdiri dari jasa telepon tidak bergerak, jasa telepon seluler, jasa interkoneksi,



jasa layanan pesan singkat, faksimili, jasa layanan internet seluler, dan video call. Jasa telekomunikasi merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang telah diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999. Berikut data capaian indikator urusan komunikasi dan informatika.

Sarana komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan kabupaten pesisir selatan. Tanpa sarana komunikasi maka sulit untuk meningkatkan akses komunikasi dan layanan informasi antar kampung, nagari dan kabupaten.

Tabel 2.42
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Komunikasi Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan cakupan layanan komunikasi	%	30	30	100

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan cakupan layanan telekomunikasi

$$\frac{\text{Luas wilayah yg tercover layanan komunikasi}}{\text{Luas cakupan layanan komunikasi}} \times 100 \%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Persentase Cakupan Layanan Komunikasi Tahun 2020 : } \frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan di atas dapat dijelaskan bahwa, target indikator kinerja Persentase Cakupan Layannan Komunikasi tahun 2020 adalah 30% dengan realisasi sebesar 30% dengan capaian sebesar 100%. Berdasarkan pencapaian indikator kinerja tersebut, kriteria keberhasilan capaian kinerja ***Sangat Baik***.

Untuk meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilakukan pembinaan terhadap 15 Kelompok Informasi Masyarakat yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di kecamatan untuk menyampaikan informasi pemerintah daerah. Kelompok Informasi

Masyarakat merupakan wadah dan perpanjangan tangan pemerintah dalam penyampaian informasi pemerintah daerah.

Melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, KIM dapat menerapkannya dalam berbagai aktivitas perdagangan, pertanian, industri dan menghasilkan tambahan pendapatan dari aktivitas tersebut, informasi yang diperoleh dari berbagai media dan sumber lainnya, masyarakat dapat memperoleh informasi peluang-peluang usaha, permintaan pasar mengenai berbagai produk dan jasa, kemudian KIM dapat melakukan transaksi bisnis, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dikemas sedemikian rupa dalam bentuk bahan informasi (buku, bulletin, bahan *audio visual*).

Pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat dilakukan setelah Kelompok tersebut memenuhi standar kelompok yang ditetapkan antara lain :

1. Surat Keterangan Wali Nagari
2. Memiliki Struktur Kelompok/sanggar
3. Memiliki Wadah/tempat berkumpul Kelompok/sangga

Tabel 2.43
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Nagari	Nama Kelompok
1	Koto XI Tarusan	Pulau Karam	1. Sanggar Seni Elok Saiyo
			2. Sanggar Seni Tuah Sakato
			3. Sanggar Seni Atok Rumbio
2	Bayang	Tanjung Durian	1. Sanggar Batu Putih
			2. Saiyo Sakato
		Talaok	3. Bayang Palito
		Bayang Utara	4. Bayu Saiyo
3	IV Jurai	Painan Timur	1. Langkisau
		Painan	2. Sanggar San Alida
		Painan Selatan	3. Sanggar Andam Suri
		Painan Timur	4. Sanggar “ Yo Baiyo”
4	Batang Kapas	IV Koto Hilie	1. Gadih Nan Jombang
			2. Sanggar Gadih Basanai
		Taluak tigo sakato	3. Salendang Dunia Limau Sundai
5	Sutera	Koto Nan Tigo Selatan	1. Caidaiyani
			2. Pinang Sinawa
6	Lengayang	Lakitan Utara / Kampung Padang Marapalam	1. Sikambang Group
		Kampung Lubuak sariak / kambang utara	3. Galombang Maimbau
			4. Pinang Sinama Tuah Sakato
		Kambang Utara	5. Nilo Nali Sikayan
7	Ranah Pesisir	Sungai Liku Labuhan	1. Timbulun Saiyo
			1. Palang Permai
8	Linggo Sari Baganti	Punggasan Utara	1. Alang Babega



9	Air Pura	Lubuk Betung	1. Pulau Rajo
			2. Puti Kumala Intan
			3. Darul Sakim Sakato
10	Pancung Soal	Tigo Sepakat	1. Sanggar Seni Rimbo Sarumpun
11	Basa Ampek Hulu Tapan	Dusun Baru	1. Silek Indo Jati
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pondok Binjai	1. Galombang Duo Baleh
13	Lunang	Sindang	1. Gandai Sindang Harapan Rumah
		Lunang Barat	2. Baringin Koto
		Kampung Pasar Pagi Nagari Lunang Satu	3. Saiyo Sakato
14	Silaut	Sambungo	1. Asronggo Budoyo
		Silaut	2. Sanggar Seni Gandai
		Sei. Sarik	3. Gembong Srenggono
		Nagari Pasir Binjai	4. Tresno Budoyo
		Nagari Air Hitam	5. Taruna Budaya
		Lubuk Bunta	6. Tri Tunggal Budoyo
		Sungai Pulai	7. Singa Wana
		Nagari Lubuk Bunta	8. Krido Yakso
		Sungai Pulai	9. Turonggo Budoyo
		Sungai Sirah	10. Seni Tari Sekundang Merah
		Durian Seribu	11. Seni Tari Nirmala
		Talang Binjai	12. Seni Tari Tor – Tor
		Sei. Serik	13. Gembong Srenggono

Sumber: LKj Dinas Komunikasi dan informatika, 2020

Untuk Tahun 2020 Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Sanggar Seni dan Budaya "ANDAM SOERI" dibawah pimpinan Yulita Anggarini Indah, S.H,M.Kn yang beralamat Jalan Tritura, Painan Kecamatan IV Jurai mewakili Kabupaten Pesisir Selatan bertanding ditingkat Provinsi Sumatera Barat.

Perlombaan Media Tradisional ini diikuti seluruh Kelompok Informasi Masyarakat Se Provinsi Sumatera Barat. KIM Kabupaten Pesisir Selatan membawa drama tari yang berjudul " UNGGEH LAYANG" yang memberikan informasi tentang cerita tentang raja yang jatuh cinta dengan seorang Putri Raja. Putri Raja tersebut sudah memiliki tunangan. Dengan segala cara Raja Unggeh Layang berusaha untuk mendapat putri tersebut. Beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan kepada Kelompok Informasi Masyarakat yaitu sosialisasi dan anjang sana

4. Jumlah Operasional TV/radio dan Jumlah Menara Radio

LPPL Radio Langkisau merupakan wadah untuk menyampaikan informasi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat lebih luas lagi. Dengan adanya radio langkisau ini informasi pemerintah daerah dapat diterima oleh masyarakat di pelosok-pelosok daerah. Informasi melalui LPPL Radio Langkisau FM dapat didengarkan melalui *web streaming* dan *radio box* dunia. Untuk bisa



menjangkau ke wilayah terjauh maka diperlukan Menara pemancar radio yang perlu dilakukan perawatan Menara.

Dalam meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerapkan beberapa aplikasi yang secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

Program Aplikasi	Permintaan / Jenis		Tahun
Aplikasi TPP	Dinas Komunikasi & Informatika	Pembangunan Sistem Baru	2019
Website Radio Langkisau FM	Dinas Komunikasi & Informatika	Pembangunan Sistem Baru	2019
Dashboard Realbud SIPKD 2019	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pengembangan Sistem	2019
KSIMRS RSUD SIMRS	RSUD Dr. M. Zein	Pembangunan Sistem Baru	2019
siCANTIK v5 Cloud	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan Sistem	2019
e-MONEV	Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pembangunan Sistem Baru	2019
Web JDIH	Biro Hukum, Sekretariat Daerah	Pembangunan Sistem Baru	2019
siBAPER	Sekretariat Daerah	Pembangunan Sistem Baru	2019
siNAR PESSSEL	NAGARI	Pengembangan Sistem	2019
e-KINERJA	BKPSDM	Pengembangan Sistem	2019
siMAYA PESSSEL	Dinas Komunikasi & Informatika	Pengembangan Sistem	2019
siTAPAI	BKPSDM	Pembangunan Sistem Baru	2019
e-SPPD	BPKD	Pengembangan Sistem	2019
DESKPEMILU	KESBANGPOL	Pembangunan Sistem Baru	2019
siMARDI	DISKOMINFO	Pembangunan Sistem Baru	2019
MANDEH	DISKOMINFO	Pengembangan Sistem	2019
SIMBangda	DISKOMINFO	Pengembangan Sistem	2019
DWH siNAR	DISKOMINFO	Pembangunan Sistem Baru	2019
WBS	DISKOMINFO	Pembangunan Sistem Baru	2019
TALI KASI	DISKOMINFO	Pembangunan Sistem Baru	2019

Setiap pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan layanan telekomunikasi pasti terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi, diantaranya Cakupan Layanan Komunikasi yang ditargetkan 40 % dalam RPJMD 2016-2021 namun masih terkendala terhadap pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data, minimnya layanan aplikasi penyebaran informasi dan Perangkat Daerah yang kurang disiplin terhadap pendataan serta penataan data informasi masing-masing Perangkat Daerah.

Salah satu solusi yang diupayakan dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah telah dilaksanakan pembangunan jaringan komunikasi data, pembuatan aplikasi informasi yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dan permintaan kepada perangkat daerah untuk melengkapi data informasi yang bisa dipublish kepada masyarakat terhadap pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Program program pendukung pencapaian target indikator cakupan layanan telekomunikasi pada tahun 2020 yaitu:

- a. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
- b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
- d. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi
- e. Program Penyelenggaraan *e Government*

6. Jumlah Realisasi Investasi Daerah

Jumlah investasi daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, begitu juga halnya dengan perkembangan jumlah investor. Peningkatan investasi dan jumlah investor yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian kinerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, OPD melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Membandingkan rencana investasi dengan realisasi yang dicapai
- b. Melakukan performance gap analisis dengan menggali sebab sebab tidak tercapainya target dan meneliti faktor perbedaan tersebut
- c. Meneliti capaian yang menggambarkan keberhasilan

Berikut data capaian indikator jumlah Realisasi Investasi Daerah pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.45 dibawah ini :

Tabel 2.45
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Realisasi
Investasi Daerah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Realisasi Investasi Daerah	Rp.	200 milyar	345 milyar	172.51

Capaian Jumlah Investasi Daerah Tahun 2019 : $\frac{345 \text{ Milyar}}{200 \text{ Milyar}} \times 100\% = 172\%$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja investasi di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 dengan target Rp.200 milyar terealisasi sebesar Rp. 345 Milyar atau dengan capaian sebesar 172.51%. Berdasarkan pencapaian indikator kinerja tersebut, klasifikasi penilaian indikator keberhasilan dengan kategori capaian ***Sangat Baik***. Perkembangan jumlah investasi daerah (PMA, PMDN dan Non PMDN) dari tahun 2018 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.46
Perkembangan Jumlah Investasi Daerah
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2019

No	Tahun	PMA-PMDN		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2018	180. 000. 000. 000	442. 000. 000. 000	245,55
2	2019	190. 000. 000. 000	525.484.275.232	276,31
3	2020	200. 000. 000. 000	345,019,215,304	172,51

Sumber: LKj Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2020

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah investasi daerah dalam kurun 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah investasi daerah ditargetkan sebesar Rp180.000.000.000,—, dengan realisasi sebesar Rp442.000.000.000,—, dengan capaian 245,55%, pada tahun 2019, jumlah investasi sebesar Rp190.000.000.000,—, dengan realisasi Rp525.484.275.232,— atau tercapai sebesar 276,31%, sedangkan pada tahun 2020, jumlah investasi sebesar R200.000.000.000,—, dengan realisasi Rp345,019,215,304,— atau tercapai sebesar 172,51%, .

Meningkat jumlah investasi daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

- a. Akselerasi penyerapan anggaran untuk mendorong percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis daerah



- b. Semakin tingginya komitmen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan promosi investasi
- c. Meningkatkan pelayanan perizinan satu pintu
- d. Mengurangi pungutan liar yang memberatkan investor
- e. Meningkatkan kinerja pariwisata

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan antara lain :

1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan
3. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan
4. Program Pembangunan Saluran drainase / Gorong - gorong
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Program Pelayanan Penanaman Modal
9. Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp145.733.394.850,–, terealisasi sebesar Rp137.730.119.413,– atau 94,51%. Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp8.003.275.437,– atau 5,49 %.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial Secara Berkelanjutan dan Menurunkan Ketimpangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.47 berikut ini:

Tabel 2.47
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Gini Ratio Kabupaten Pesisir Selatan	%	0,24	0,26	91,66
2.	Presentase Akses Sanitasi Layak	%	75,16	75,27	100,15
3.	Persentase penduduk berakses air minum/bersih	%	95,50	95,59	100,09
4.	Ratio Rumah Layak Huni		0,2450	0,2461	100,45
Rata-rata Capaian					100,08



Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 4 sebesar 100,08%. Pencapaian dari sasaran strategis 4 termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

1. Indeks Gini Rasio Kabupaten Pesisir Selatan

Gini Rasio (rasio gini) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga semakin kecil angka rasio gini maka akan semakin baik atau semakin minim ketimpangan ekonomi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, Pada tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan target gini rasio sebesar 0.24%. Dari tabel 3.48 dapat dilihat indikator kinerja gini rasio dari target 0,24% terealisasi 0,26% dengan tingkat capaian 99,99%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, kriteria keberhasilan kinerja adalah **Sangat Baik**.

Realisasi indeks gini diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Indeks gini ratio ditentukan oleh 2 (dua) faktor, diantaranya adalah :

1. Pengeluaran Perkapita/Tahun (IPG)
2. Pengeluaran Perkapita/Tahun (IPM)

Ad.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat capaian keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Pembangunan manusia berbasis gender ini dapat dilihat dari 3 dimensi capaian dasar yaitu dimensi umur panjang, hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2019 kontribusi pengeluaran perkapita/Tahun Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan IPG sebesar Rp. 12.447. 000,- /Tahun. Hal ini berarti pemerataan distribusi ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan telah terjaga dengan baik, karena semakin kecil angka rasio gini maka akan semakin baik atau semakin minim ketimpangan ekonomi penduduk.

Ad.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Realisasi angka IPM diukur berdasarkan data penghitungan dari Badan Pusat Statistik. Adapun upaya pemerintah dalam meningkatkan IPM Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- a. Mengalokasikan sekitar 20 % APBD untuk sektor pendidikan
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan dengan pembangunan sekolah, penambahan ruang kelas, penyelenggaraan paket C.



- c. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi siswa miskin untuk mencegah siswa putus sekolah
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promosi dan preventatif dengan menggalak Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pada tahun 2019 kontribusi pengeluaran perkapita/Tahun Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan IPM sebesar Rp. 9.444. 000,- /Tahun*(data sementara). Artinya dari sisi pembangunan manusia tingkat, pengeluaran masyarakat sudah mulai baik, sehingga tingkat ketimpangan pengeluaran antara orang kaya dan orang miskin tidak terlalu mencolok. Hal ini dapat dilihat dari angka indek gini ratio Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebesar 0,26%. Berikut realisasi dan capaian indikator kinerja Indek Gini Ratio Kabupaten Pessir Selatan pada tabel 2.48 dibawah ini:

Tabel 2.48
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Gini Rasio Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Gini Rasio Kabupaten Pesisir Selatan	%	0,24	0,26	91,66

Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2020

Capaian Gini Rasio Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 :	$\frac{0,26 - (0,24 - 0,26)}{0,26} \times 100\% = 91,66\%$
---	--

3. Persentase Akses Sanitasi Layak

Sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel *slab* dan ventilasi; serta toilet kompos. Berikut tabel 2.49, data Rumah Tangga yang bersanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.

Tabel 2.49
Jumlah Rumah Tangga Yang Bersanitasi Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2020	Tambahan Jamban Pribadi Tahun 2020	Tambahan Sambungan Rumah (SR) Kegiatan APBD Tahun 2020	Tambahan Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2020	Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2020	Ket
		(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9
	JUMLAH	107.610	79.782	545	675	1.220	81.002	
I	SILAUT	3.505	2.642	30	-	30	2.672	
II	LUNANG	5.065	3.047	30	-	30	3.077	
III	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3.246	2.227	27	50	77	2.304	
IV	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3.567	2.254	33	100	133	2.387	
V	PANCUNG SOAL	6.236	4.003	30	100	130	4.163	
VI	AIR PURA	3.770	3.219	30	100	130	3.349	
VII	LINGGO SARI BAGANTI	10.632	8.561	48	100	148	8.709	
VIII	RANAH PESISIR	7.132	6.229	30	75	105	6.334	
IX	LENGAYANG	12.376	7.828	27	-	27	7.855	
X	SUTERA	11.889	10.165	36	-	36	10.201	
XI	BATANG KAPAS	7.407	4.649	27	-	27	4.676	
XII	IV JURAI	10.942	9.485	59	75	134	9.619	
XIII	BAYANG	8.655	6.246	51	-	51	6.297	
XIV	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,713	1.180	18	-	18	1.198	
XV	KOTO XI TARUSAN	11.428	8.017	69	75	144	8.1615	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2020



Gambar 2.10: Target dan Realisasi Akses Sanitasi Layak Tahun 2018–2020 di Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.50
Target dan Realisasi Cakupan Sanitas Layak
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 s.d. 2020

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	63.80	73.13	74.68	75.16	75.29
2	Realisasi (%)	64.01	73.17	75.13	75,27	



Gambar 2.11: Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak
Tahun 2018–2020 di Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rumah tangga yang memiliki jamban sehat pada tahun 2019 sebanyak 79.782 rumah tangga atau sebesar 74.13%, sedangkan Jumlah Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Jamban Sehat sebanyak 26.403 rumah tangga atau sebesar 24,54%. Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lebih dari 75% rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memiliki akses sanitasi layak.

Namun demikian melihat kondisi ini, pemerintah daerah akan terus melakukan terhadap peningkatan akses sanitasi layak, mengingat lebih dari 24 % rumah tangga masih belum memiliki jamban sehat. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada masyarakat yang belum menyadari pentingnya pola hidup sehat dengan memiliki jamban sehat dan menjaga lingkungan dari limbah yang tidak sehat. Upaya-upaya tersebut antara lain sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki jamban yang sehat, berperilaku hidup sehat dan menjaga lingkungan agar tetap sehat, memberikan bimbingan kepada tenaga pendamping pembangunan bagaimana memberikan informasi agar masyarakat sadar akan pentingnya sanitasi yang layak dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.51
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Akses Sanitasi Layak
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	75,16	75,27	100,15

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase Akses Sanitasi Layak

$$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah tangga bersanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase Akses Sanitasi Layak Tahun 2020 :	$\frac{75,16}{75,27}$	X	100%	=	100,15%
--	-----------------------	---	------	---	---------

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase akses sanitasi di kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding dengan capaian tahun 2019 sebesar 0.45%. Pada tahun 2020 pencapaian target indikator akses sanitasi layak Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 100,15% dari target 75,16% dan terealisasi sebesar 75,27 %. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja Persentase Akses Sanitasi Layak, maka kriteria keberhasilan kinerja adalah **Sangat Baik**.

4. Persentase penduduk berakses Air Minum/ Bersih

Pengelolaan sistem non perpipaan, umumnya dikelola langsung oleh masyarakat secara individu dengan sarana dalam bentuk sumur gali, sistem penampungan air hujan, mata air dan lain-lain. Sistem perpipaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air minum (PDAM). PDAM Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan mata air sebagai air baku untuk melayani kebutuhan air minum. Jumlah akses penyediaan air minum yang telah dilayani oleh PDAM pada tahun 2020 mencapai 22.778 rumah tangga (ruta) atau sebesar 21,17 % dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan akses penyediaan air minum yang Non PDAM berjumlah 20.724 ruta atau sebesar 19,26 %. Sementara itu jumlah akses air minum non perpipaan (SGL, PMA dan PAH) berjumlah 59.364 ruta atau 55,17% dari total jumlah rumah tangga.

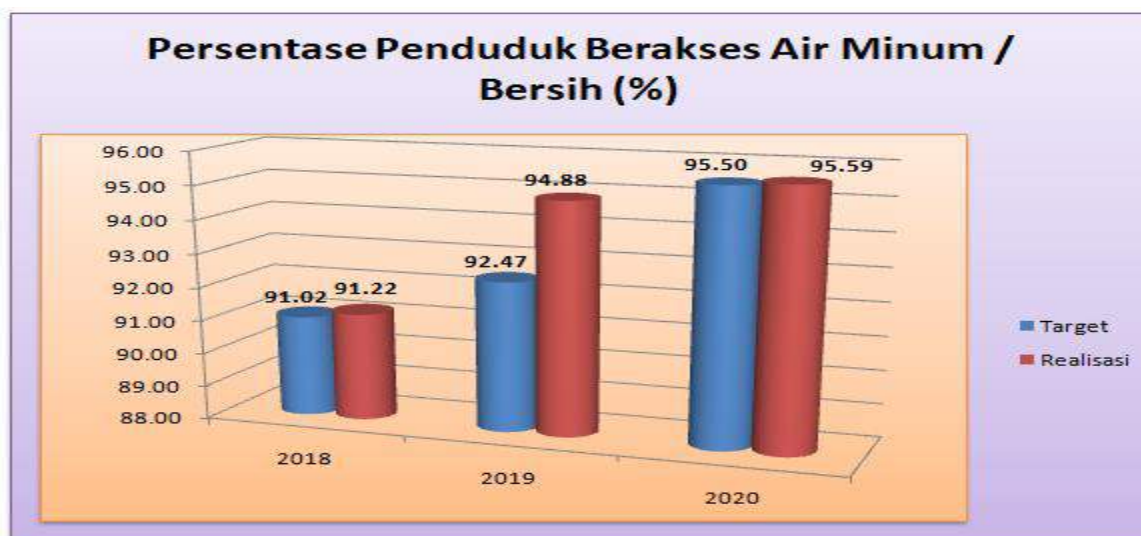
Berikut tabel 2.52, data cakupan penyediaan layanan air minum di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 yaitu:

Tabel 2.52
Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	KECAMATAN / NAGARI	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH TANGGA JP	JUMLAH RUMAH TANGGA NON JP	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN	
					JARINGAN PERPIPAAN		NON PERPIPAAN							
					PDAM		NON PDAM		(SGL + PMA + PAH)					
					(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)
	JUMLAH	107,610	26,863	80,747	22,778	21.17	20,724	19.26	59,364	55.17	102,866	95.59	4,744	4.41
I	SILAUT	3,552	0	3,552	-	-	2,042	57.49	1,453	40.91	3,495	98.40	57	1.60
II	LUNANG	5,065	0	5,065	-	-	2,335	46.10	2,673	52.77	5,008	98.87	57	1.13
III	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,246	494	2,752	362	11.15	273	8.41	2,549	78.53	3,184	98.09	62	1.91
IV	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,567	132	3,435	72	2.02	40	1.12	3,287	92.15	3,399	95.29	168	4.71
V	PANCUNG SOAL	6,236	1,457	4,779	1,173	18.81	1,015	16.28	3,842	61.61	6,030	96.70	206	3.30
VI	AIR PURA	3,770	807	2,963	521	13.82	62.00	1.64	3,034	80.48	3,617	95.94	153	4.06
VII	LINGGO SARI BAGANTI	10,632	2,285	8,347	1,686	15.86	1,076	10.12	7,602	71.50	10,364	97.48	268	2.52
VIII	RANAH PESISIR	7,132	1,401	5,731	1,113	15.61	1,166	16.35	4,603	64.54	6,882	96.49	250	3.51
IX	LENGAYANG	12,376	3,503	8,873	3,215	25.98	1,977	15.97	7,051	56.97	12,243	98.93	133	1.07
X	SUTERA	11,889	4,425	7,464	3,866	32.52	896	7.54	6,691	56.28	11,453	96.33	436	3.67
XI	BATANG KAPAS	7,407	2,192	5,215	1,977	26.69	1,098	14.82	3,912	52.81	6,987	94.33	420	5.67
XII	IV JURAI	10,942	6,316	4,626	5,817	53.16	2,109	19.27	2,317	21.18	10,243	93.61	699	6.39
XIII	BAYANG	8,655	2,964	5,691	2,365	27.33	1,423	16.44	4,030	46.56	7,818	90.33	837	9.67
XIV	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,713	221	1,492	183	10.68	803	46.88	544	31.76	1,530	89.32	183	10.68
XV	KOTO XI TARUSAN	11,428	666	10,762	428	3.75	4,409	38.58	5,776	50.54	10,613	92.87	815	7.13

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2020





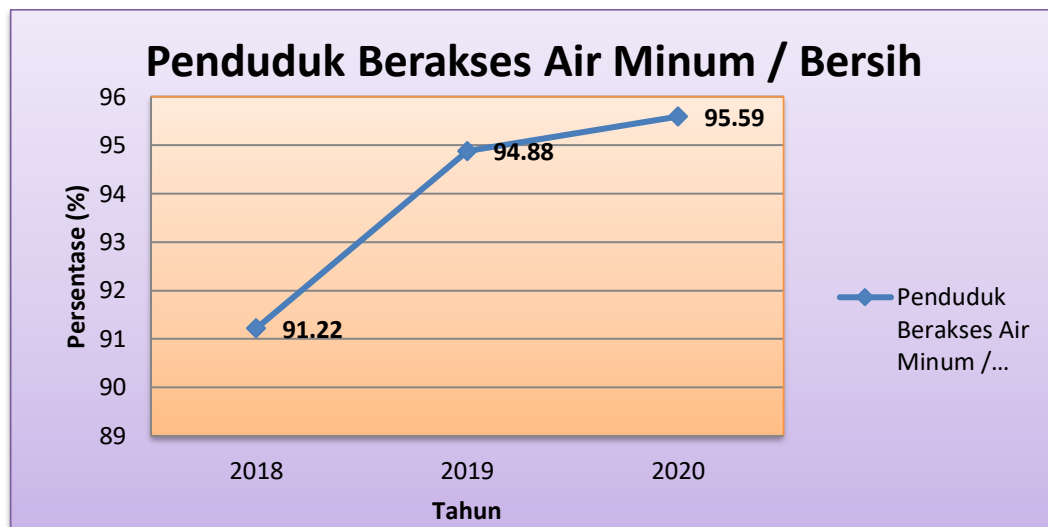
Gambar 2.12: Persentase Target dan Realisasi Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih Tahun 2018–2020 di Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.53
Target dan Realisasi Akses Air Minum/ Bersih
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 s.d. 2020

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian (%)	89,29	91,02	92,47	95,50	97,71
2	Realisasi (%)	87,86	91.22	94.88	95.59	-



Gambar 2.13 : Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Minum/Bersih Tahun 2018–2020 di Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 2.14 : Capaian Cakupan Penduduk Berakses Air Minum/Bersih Tahun 2018–2020 di Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan data dan informasi di atas dapat dijelaskan bahwa, akses aman air minum bagi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 102,866 ruta atau 95,59%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,744 ruta atau 4,41 % merupakan akses tidak aman air minum bagi penduduk. Artinya masih ada target dan tugas pemerintah untuk bisa menuntaskan akses tidak aman air minum menjadi akses aman air minum bagi penduduk dimasa yang akan datang.

Tabel 2.54
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Bersih	%	95,50	95,59	100,09

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih Tahun 2020 :	$\frac{95,59}{95,50}$	X	100%	=	100.09%
--	-----------------------	---	------	---	---------

Dilihat dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dari sisi realisasi indikator persentase penduduk berakses air minum/bersih mengalami peningkatan yaitu dari 91,22% pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 94,88%, sedangkan pada tahun 2020 Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih ditargetkan sebesar 95,50 dengan realisasi sebesar 95,59% atau 100,09%. Capaian indikator persentase penduduk berakses air minum/bersih pada tahun 2020 ini termasuk **Sangat Baik**.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain adalah:

- a. Koordinasi yang intens dengan *stakeholders*, khususnya dalam penyusunan perencanaan SPAM agar tidak ada persoalan yang akan menimbulkan konflik sosial akibat sulitnya mencari sumber air dengan debit yang besar serta dilakukan survey awal dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Memberdayakan Pokja Sanitasi Kabupaten dalam setiap kegiatan sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap pencapaian akses sanitasi kabupaten dapat terus ditingkatkan
- c. Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kedua kegiatan ini, dimana setiap keterlambatan pekerjaan oleh pelaksana segera ditindaklanjuti
- d. Adanya hubungan yang dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan sebagai upaya peningkatan akses sanitasi dengan perubahan perilaku melalui Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

5. Rasio Rumah Layak Huni

Rumaha layak merupakan dambaan setiap orang apalagi bila ditunjang dengan hunian yang layak secara bangunan maupun kesehatan penghuni. Sedangkan rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk pada tahun 2020.

Indikator Rasio Rumah Layak Huni merupakan indikator baru dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Indikator ini menjadi target dalam penetapan Perjanjian Kinerja Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dijelaskan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 11/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota, maka Rumah layak huni pengertiannya



adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun kriteria dari rumah layak huni tersebut antara lain :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi
 - a. Struktur bawah/pondasi;
 - b. Struktur tengah/kolom dan balok
 - c. Struktur atas
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
3. Memenuhi kecukupan luas minimum, 7,2 M²/orang sampai dengan 12 M²/orang

Berikut realisasi dan capaian indikator Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 seperti pada tabel 3.56 dibawah ini:

Tabel 2.55
Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Rumah Layak Huni
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio Rumah Layak Huni		0.2450	0.2461	100.45

Formulasi capaian indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019 : } \frac{0.2461}{0.2450} \times 100\% = 100.45\%$$

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 0.2450 dengan realisasi sebesar 0.2461 atau 100.45%. Capaian indikator persentase penduduk berakses air minum/bersih pada tahun 2020 ini termasuk **Sangat Baik**.

Dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2020 Anggaran Pelaksanaan Rumah Tidak layak huni untuk mewujudkan target kinerja rasio rumah layak huni untuk dana APBD akibat refocussing anggaran adanya wabah virus corona (Covid 19) kegiatan pelaksanaan RTLH dengan dana APBD tidak terlaksana. Capaian untuk penuntasan

RTLH dilaksanakan dengan dana APBN sebanyak 1145 unit, dari Nagari 304 Unit dan dari BAZ sebanyak 692 unit. sehingga total penanganan RTLH 2020 sebanyak 2.141 Unit. Untuk Tahun 2020 secara Target penanganan lima tahun dari target 6.387 unit Dinas Perkimtan sudah melaksanakan sebanyak 7282 unit. Apabila diporsentasekan penanganan RTLH oleh Dinas Perkimtan sudah mencapai 114.01 %.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Sosial antara lain :

1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
2. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan
5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp19,840,495,860,- terealisasi sebesar Rp 11,167,339,427,- atau 56,29%. Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp8.673.156.433,- atau 43,71 %.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pengamalan nilai nilai agama

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada table 2.56 berikut ini:

Tabel 2.56
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Mesjid yang memiliki TPQ Aktif	%	71,51	100	135,84
2.	Persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ	%	92	112,45	122,23
<i>Rata-rata Capaian</i>					131, 03

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 5 adalah sebesar 131,03%. Pencapaian dari sasaran strategis 5 termasuk kriteria keberhasilan dengan kategori ***Sangat Baik.***

1. Persentase Mesjid yang memiliki TPQ Aktif

Berpijak dari tanggung jawab, maka lahirlah berbagai bentuk pendidikan kemasyarakatan, seperti masjid, surau, TPQ, wirid remaja, kursus-kursus keislaman, pembinaan rohani, dan sebagainya. Salah satu yang menjadi indikator utama dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah indikator persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan kontribusi dalam pendidikan agama yang ada di sekitar lingkungan mereka. Taman Pendidikan Al Qur'an (disingkat (TPA/TPQ)) adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih tinggi. Kurikulum TPQ lebih ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al Qur'an serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. sebuah lembaga pendidikan luar sekolah yang menitikberatkan pengajaran pada pembelajaran membaca Al Qur'an dengan muatan tambahan yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan kepribadian islamiah.

Adapun strategi untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya yaitu dengan cara penguatan peran ulama, niniak mamak, bundo kanduang, cendikiawan dan generasi muda dalam pengembangan dan penerapan nilai-nilai ABS-SBK. Strategi ini didukung oleh beberapa arah kebijakan antara lain Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, pemangku adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, Peningkatan Pelaksanaan Event event keagamaan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Kehidupan bermasyarakat melahirkan beberapa lembaga pendidikan nonformal sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama.



Secara umum manfaat dari adanya lembaga pendidikan Al Qur'an seperti TPQ yaitu:

- a. Menciptakan generasi islam yang taat beribadah dan berakhlak mulia.
- b. Memakmurkan masjid.
- c. Menanamkan nilai- nilai budi pekerti yang baik dengan meneladani Rasulullah dan para sahabatnya.
- d. Membentuk masyarakat yang Qurani.
- e. Menanamkan nilai moral dan budi pekerti pada generasi muda.
- f. Memperdalam pengetahuan keagamaan di masyarakat.

Di Kabupaten Pesisir Selatan masjid yang aktif dalam mengelola lembaga pendidikan Al Qur'an sebanyak 536 masjid yang tersebar di 15 Kecamatan. Bentuk aktivitas yang dilaksanakan berupa :

- a. Memberikan wadah pendidikan yang berbasis Islam, khususnya pendidikan Al Qur'an untuk warga setempat.
- b. Berusaha untuk meningkatkan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat umum untuk dapat memperoleh pendidikan agama yang layak. Mengajarkan cara membaca Al Qur'an yang benar sesuai dengan tajwid kepada para santri.
- c. Diharapkan santri dapat menghafal dan mengamalkan sejumlah ayat-ayat pilihan, surat- surat pendek dan do'a harian.
- d. Para santri diajarkan gerakan- gerakan wudhu serta sholat, sehingga anak- anak dapat melaksanakan wudhu dan sholat dengan baik dan benar.
- e. Menanamkan nilai- nilai budi pekerti yang baik dengan meneladani Rasulullah dan para sahabatnya.

Berikut perkembangan jumlah masjid dan mushola di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020:

Tabel 2.57
Perkembangan Jumlah Masjid dan Mushola
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Masjid	Jumlah Mushola	Total
1	Kecamatan Koto XI Tarusan	40	80	120
2	Kecamatan Bayang	44	48	92
3	Kecamatan Bayang Utara	15	15	30
4	Kecamatan IV Jurai	49	91	140
5	Kecamatan Batang Kapas	34	88	122
6	Kecamatan Sutera	44	83	127
7	Kecamatan Lengayang	78	94	172
8	Kecamatan Ranah Pesisir	46	83	129
9	Kecamatan Linggo Sari Baganti	61	103	164



10	Kecamatan Pancung Soal	20	47	67
11	Kecamatan Air Pura	24	24	48
12	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	14	14	28
13	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	18	16	34
14	Kecamatan Lunang	25	63	88
15	Kecamatan Silaut	24	51	75
JUMLAH		536	900	1436

Sumber: Bagian Kesra Setda Kab. Pesisir Selatan, 2020

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini dikoordinir oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya memonitor dan mengevaluasi perkembangan lembaga TPQ pada mesjid-mesjid yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Evaluasi kegiatan TPQ dilakukan secara bertahap dan berkala. Hasil kegiatan akan diukur dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai titik tolak dalam pengembangan selanjutnya. Program pendukung lain yang dilaksanakan pada TPQ yaitu pembinaan bagi Lembaga Didikan Subuh (LDS) yang berjumlah 15 LDS di Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi dan capaian indikator persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif dapat dilihat pada tabel 2.58 dibawah ini:

Tabel 2.58
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Mesjid Yang Memiliki TPQ Aktif Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif	%	71,51	100	139,84

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase Persentase Mesjid Yang Memiliki TPQ

$$\frac{\text{Jumlah mesjid yang memiliki TPQ Aktif}}{\text{Jumlah mesjid di Kabupaten Pesisir Selatan}} \times 100\%$$

Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif Tahun 2020 : $\frac{100}{71,51} \times 100\% = 139.84$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 indikator Persentase Jumlah TPQ Aktif ditargetkan sebesar 69,55 dengan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 143,78 %. Realiasi pada tahun 2019 ini dilihat dari jumlah mesjid



yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 523 mesjid sementara TPQ yang aktif ada sebanyak 684 TPQ, sedangkan sisa TPQ aktif tersebut berada pada mushola–mushola yang saat ini berjumlah 757 mushola. Pencapaian indikator Persentase Mesjid Yang Memiliki TPQ menunjukkan bahwa program dan kegiatan pendukung capaian target TPQ aktif yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan, sehingga penguatan terhadap lembaga keagamaan dapat diwujudkan.

2. Persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ

Indikator kinerja persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ, ditargetkan 85% dan terealisasi sebesar 91% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107, 06%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **sangat berhasil** dengan kategori penilaian **sangat baik**.

Perhitungan dari potensi zakat pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp11.600.000.000,– (*sebelas milyar enam ratus juta rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp12.437.494.662,– (*dua belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian zakat yang dikelola BAZ sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan perlu terus ditingkatkan dimasa mendatang. Beberapa Potensi zakat yang dikelola oleh BAZ berasal dari PNS, karyawan swasta dan perorangan.

Tabel 2.59
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Potensi Zakat yang dikelola BAZ Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Potensi zakat yang dikelola oleh BAZ	%	92	112,45	122,23

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase potensi Zakat yang di kelola oleh BAZ

Jumlah zakat yg telah dikelola oleh BAZ	
Potensi zakat	X 100 %

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase Potensi zakat yang dikelola oleh BAZ Tahun 2020 :	$\frac{112,45}{92}$	X	100%	=	122,23%
--	---------------------	---	------	---	---------



Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ Tahun 2020 yaitu :

1. Melakukan sosialisasi yang inten sehingga tumbuh kesadaran muzaki untuk berzakat.
2. Penataan administrasi yang transparan dan akuntabel
3. Penyaluran tepat sasaran sehingga manfaatnya betul betul bisa dirasakan oleh masyarakat
4. Membuka akses bagi masyarakat yang ingin tahu seputar pengelolaan zakat
5. Terjalannya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam mengupayakan pencapaian target kinerja juga ditemukan berbagai permasalahan dan kendala diantaranya :

1. Masih ada muzaki yang membagikan zakatnya secara langsung tidak melalui BAZNAS
2. Masih ada sebagian muzaki yang enggan untuk berzakat
3. Pengetahuan dan kesadaran untuk berzakat masih kurang
4. Khususnya untuk ASN penghasilan tidak lagi mencukupi untuk dizakatkan karena sebelumnya sudah dipakai untuk keperluan lain.

Untuk melihat lebih jelas realisasi penerimaan BAZ Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.60 berikut ini :

Tabel 2.60
Realisasi Penerimaan BAZ Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018–2020

No.	Tahun	Realisasi
1	2018	Rp. 8.302.365.868, –
2	2019	Rp. 12.764.877.936, –
3	2020	Rp. 12.437.494.662, –

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi penerimaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari realisasi tahun 2019 terjadi peningkatan penerimaan BAZ sebesar Rp. 4,462,512,068,–. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp327,383,274,–. Adapun salah satu faktor terjadinya penurunan ini adalah adanya pengaruh wabah covid-19 yang melanda seluruh daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat secara global.



Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Pesisir Selatan dalam membayar zakat cukup tinggi dan potensi zakat yang menjadi target cukup besar. Namun karena disebabkan oleh beberapa faktor maka optimalisasi BAZ dalam menggali potensi zakat sedikit mengalami perlambatan. Perolehan zakat yang diterima oleh BAZ Kabupaten Pesisir Selatan telah dikelola untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial ekonomi kemasyarakatan yang direalisasikan dalam bentuk program-program kerja. Berikut realisasi program kerja yang sudah dilaksanakan oleh BAZ pada tahun 2017–2019 sebagaimana tercantum pada tabel 2.61 berikut ini:

Tabel 2.61
Program Kerja BAZ Kabupaten Pesisir Selatan sesuai
dengan Program BAZNAS Tahun 2018-2020

No.	Program	Vol.
Tahun 2018		
1.	Pessel Peduli	
	- Bedah/Rehab Rumah	181
	- Bantuan Biaya Hidup	4
	- Gharimin	1
	- Bantuan Kemanusiaan	1
2.	Pessel Cerdas	4,651
3.	Pessel Sehat	222
4.	Pessel Sejahtera	4
5.	Pessel Religius	20
Tahun 2019		
1.	Pessel Makmur (Bedah/Rehab rumah)	6.840
2.	Pessel Cerdas (Beasiswa Miskin)	658
3.	Pessel Peduli	493
4.	Pessel Sejahtera (Ekonomi)	114
5.	Pessel Religius	721
Tahun 2020		
1.	Pessel Peduli	551
2.	Pessel Cerdas (Pendidikan)	2311
3.	Pessel Sehat (Biaya berobat)	944
4.	Pessel Makmur (Modal usaha)	392
5.	Pessel Religius	10794

Sumber data : BAZ Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat program kerja BAZ Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada program BAZNAS, dimana program-program tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai-nilai agama, adat budaya dan kearifan lokal antara lain :

1. Program Peningkatan IMTAQ



2. Program BAZ

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp12,512,311,768,—, terealisasi sebesar Rp11,199,981,000,— atau 89,51%. Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.312.330.768,— atau 10,49 %

Sasaran 6 : Lestarinya Nilai nilai Adat dan Budaya Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.62 berikut ini:

Tabel 2.62
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Gotong Royong	tanpa satuan	Tinggi	sedang	65,66
Rata-rata Capaian					65,66

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 6 adalah sebesar 65,66%. Pencapaian dari sasaran strategis 5 termasuk kategori **Sangat Baik**.

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Gotong Royong

Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Gotong Royong ditargetkan tinggi (3) dan terealisasi juga tinggi (1.97) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 65,66%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk kategori **cukup**.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Gotong Royong ditentukan dengan klasifikasi penentuan kriteria swadaya masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a. Rendah : 0 – 1
- b. Sedang : 1 – 2
- c. Tinggi : 3 – 5

Berikut data realisasi dan capaian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Gotong Royong di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel 2.63 berikut ini:

Tabel 2.63
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Gotong Royong Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Gotong Royong	tanpa satuan	Tinggi	sedang	66,65

Capaian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Gotong Royong Tahun 2020 :	sedang (1.97) Tinggi (3)	X	100%	=	66,65%
---	-----------------------------------	---	------	---	--------

Adapun permasalahan dan kendala dalam pencapaian target kinerja Partisipasi Masyarakat Dalam Gotong Royong yaitu :

1. Adanya pengaruh covid 19 terhadap kegiatan dan partisipasi masyarakat dalam gotong royong
2. Aturan protokoler kesehatan yang melarang adanya aktivitas masyarakat yang bersifat keramaian
3. Recofusing anggaran terhadap semua perangkat daerah, termasuk OPD pembina kegiatan kemasyarakatan

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Lestarnya Nilai nilai Adat dan Budaya Daerah antara lain :

1. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat di Pedesaan
2. Program Pengelolaan kekayaan budaya

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp150,000,000,–, terealisasi sebesar Rp108,131,800,– atau 72,09%. Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp41.868.200,– atau 27,91 %

Sasaran 7 : Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan Serta Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada table 2.64 berikut ini:

Tabel 2.64
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Trilyun (Rp.)	3,65	3,49	95,62
<i>Rata-rata Capaian</i>					95,62

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 7 adalah sebesar 95,62%. Pencapaian dari sasaran strategis 7 termasuk ***Sangat Baik***.

Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian merupakan indikator baru dalam perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi daerah semakin penting dan strategis. Sektor pertanian pada negara berkembang dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial. Ada 4 (empat) kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan dan pembangunan yaitu:

1. Sektor pertanian merupakan ekspansi dari sektor ekonomi lainnya baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasok makanan yang secara kontinyu mengikuti pertumbuhan penduduk
2. Sektor pertanian berperan sebagai sumber permintaan domestik bagi produk produk sektor ekonomi dalam memberikan kontribusi pasar
3. Sebagai sumber modal untuk investasi, karena proses pembangunan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja dari pertanian ke industri
4. Sebagai sumber surplus neraca perdagangan, baik lewat ekspor hasil hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi pertanian

Terkait dengan capaian Nilai PDRB Sektor pertanian tahun 2020, dalam laporan ini akan dijabarkan beberapa sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi terhadap nilai PDRB. Nilai PDRB itu sendiri dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metoda-metoda tertentu dengan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur. Namun demikian ada beberapa indikator yang dapat digambarkan untuk menjawab pencapaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian yang berkaitan langsung dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut indikator indikator sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi diantaranya pada tabel 2.65 berikut ini:

Tabel 2.65
Capaian indikator kinerja Sub Sektor Pertanian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan produksi utama				
	a. Padi	ton	291,201	382,839	131.47
	b. Jagung	ton	129,108	241,163	186.79
	c. Daging	kg	3,783,640	5,486,815	145.01
	d. Telor	kg	1,740,637	2,135,136	122.66
	e. Ikan	ton	55,546	47,360.70	85.26
2.	Skor pola pangan harapan	%	82	86.4	105.37

1. Peningkatan Produksi Utama

Upaya Pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan pangan sampai tingkat rumah tangga yaitu dengan menyusun strategi menumbuhkembangkan berbagai usaha peningkatan produksi dan produktivitas padi dan jagung. Strategi pemerintah tersebut diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tani dalam desiminasi teknologi mulai dari budidaya tanaman pangan, teknologi pasca panen dan pengolahan hasil panen. Hasil pengukuran capaian kinerja atas upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dalam upaya peningkatan jumlah produksi dan jumlah produktivitas tananaman pangan unggulan.

a. Padi

Target produksi padi pada tahun 2020 adalah sebesar 291,201 ton dengan realisasi mencapai 382,839 ton atau dengan capaian 131,47%. Dibandingkan produksi tahun 2019 sebesar 343.824 ton terjadi peningkatan produksi sebesar 39. 015 ton. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mempengaruhi penurunan produksi padi secara umum. Faktor faktor tersebut antara lain yaitu:

1. Meningkatnya Luas Tambah Tanam dan Panen Padi

Tingginya capaian realisasi tanam dan panen padi disebabkan adanya program Upaya Khusus (UPSUS) untuk memacu Luas Tambah Tanam (LTT) komoditi padi yang merupakan salah satu program utama dari Kementerian Pertanian RI. Dalam melaksanakan program ini, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Setiap hari laporan tanam padi dicatat dan direkap di Kabupaten untuk dilaporkan ke Provinsi kemudian diteruskan ke Kementerian Pertanian. Percepatan tanam ini didukung Brigade Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang terpusat di Padang

Laban Kecamatan Ranah Pesisir sebanyak 50 unit, jika dibandingkan dengan Tahun 2019, realisasi tanam padi naik 5,37% dan realisasi panen naik 15,78%, sehingga dengan naiknya luas tanam dan panen padi tahun 2020 ini sangat berpengaruh sekali terhadap produksi tahun 2020.

b. Rehabilitasi dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier, Dam Parit Saluran, Embung dan Irigasi Perpompaan Besar

Pada Tahun 2020 dilakukan perbaikan irigasi dengan cakupan areal 1.000 Ha, pembangunan Dam Parit Saluran 4 unit, Embung 1 unit dan Irigasi Perpompaan Besar 3 unit. Akibat dari rehabilitasi dan pembangunan prasarana pertanian ini telah dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) padi menjadi 246 dari 232 pada Tahun 2019. Pada Tabel 2.66 dapat dilihat data rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier sebagai berikut :

Tabel 2.66
Data Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Koto XI Tarusan	50
2	Bayang	200
3	IV. Jurai	200
4	Batang Kapas	50
5	Sutera	150
6	Lengayang	100
7	Ranah Pesisir	100
8	Linggo Sari Baganti	100
9	Air Pura	50
Total (Ha)		1,000

Sumber : Seksi Lahan dan Irigasi, 2020

c. Peningkatan Penggunaan Benih Padi Unggul

Benih unggul bermutu menjadi syarat utama dalam memaksimalkan hasil produksi tanaman padi, selain dengan penanganan faktor-faktor agronomi. Benih bermutu merupakan benih dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi. Di Kabupaten Pesisir Selatan tingkat penggunaan benih unggul meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tabel 2.67 dapat dilihat penggunaan benih unggul padi dari tahun 2018 – 2020 sebagai berikut :



Tabel 2.67
Jumlah Penggunaan Benih Padi Unggul Di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018 – 2020

Komoditi	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Jumlah Penggunaan Benih (Ton)	Persentase Penggunaan (%)
Padi	2018	70,711	980	55.44
	2019	70,605	1,003	56.82
	2020	74,414	1,098	59.00

Sumber : Seksi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2020

d. Penggunaan Pupuk Yang Berimbang

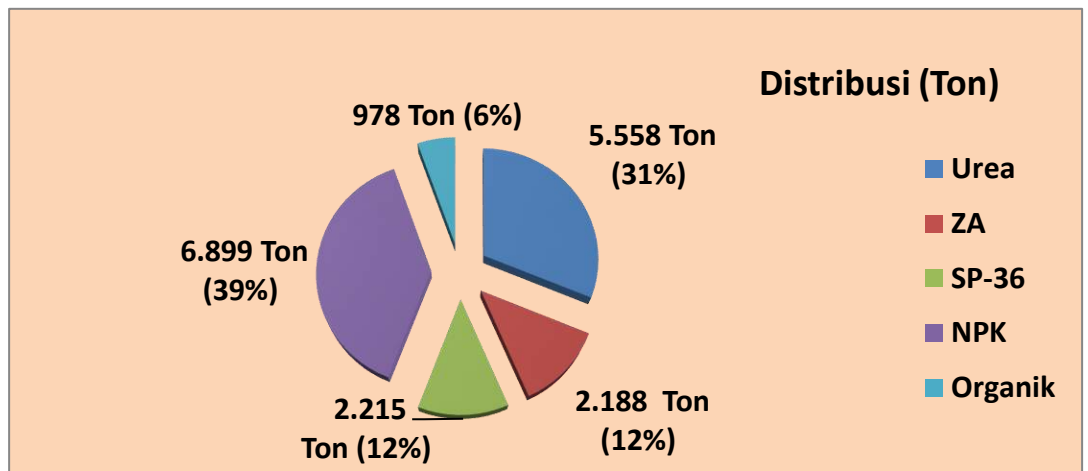
Pupuk merupakan faktor pendukung peningkatan produksi tanaman pangan. Pada dasarnya, pupuk merupakan makanan bagi tanaman. Seperti manusia, jika asupan gizi cukup, maka pertumbuhan manusia akan bagus dan kualitas dari manusia itupun juga akan bagus. Begitu juga dengan padi dan jagung, jika hara yang dibutuhkan lengkap maka peningkatan produksi juga akan lebih mudah tercapai. Dari total pupuk yang dialokasikan sebanyak 17.926 Ton, yang terdistribusi sebanyak 16.860 ton (94,05%). Artinya kebutuhan pupuk petani sudah terpenuhi hampir 100%.

Tabel 2.68
Data Penyaluran Pupuk Bersubsidi Oleh Distributor Ke Kios Pengecer
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Jenis Pupuk	Alokasi (Ton)	Distribusi (Ton)	Capaian (%)
1	Urea	6,021	5,558	92.31
2	ZA	2,526	2,188	86.62
3	SP-36	2,314	2,215	95.72
4	NPK	7,065	6,899	97.65
5	Organik	1,020	978	95.88
Jumlah		17,926	16,860	94.05

Sumber : Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, 2020





Gambar 2.15 : Grafik Distribusi Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Di Kabupaten Pesisir Selatan

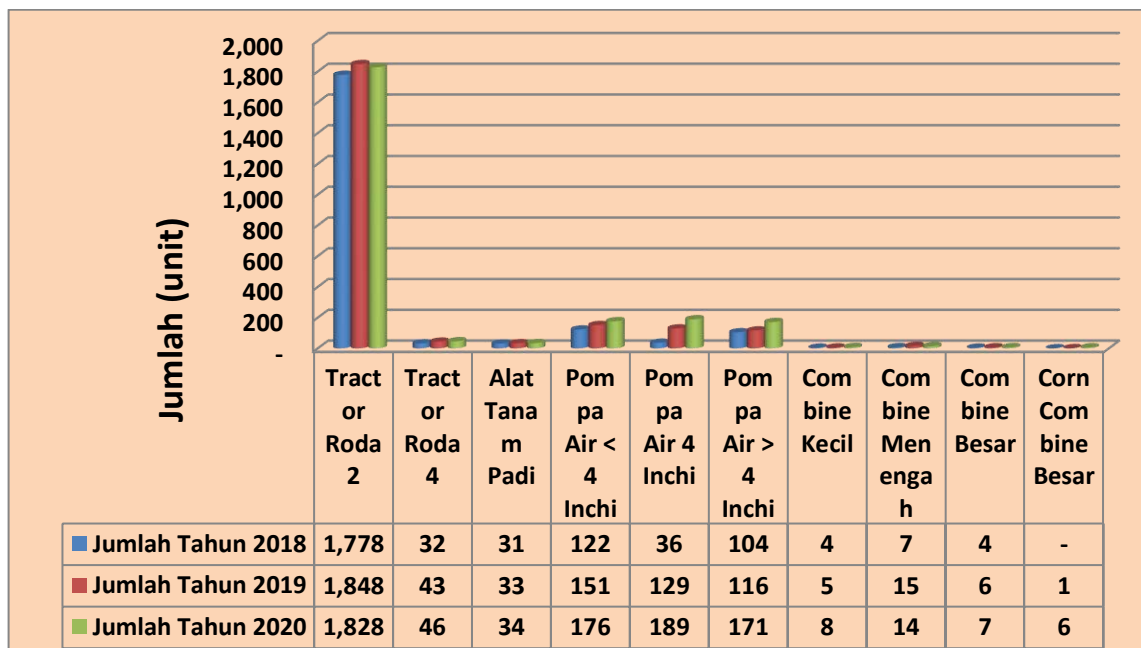
e. Ketersediaan dan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian

Ketersediaan dan Pemanfaatan alat dan mesin pertanian dapat mendorong petani dalam transformasi teknologi kearah yang lebih modern, efektif dan ramah lingkungan. Dengan penerapan mekanisasi pertanian, dapat meningkatkan mutu pengelolaan tanah, meningkatkan indeks pertanaman padi, mengurangi kehilangan hasil yang bermuara pada peningkatan pendapatan petani. Data ketersediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.69 dibawah ini

Tabel 2.69
Data Ketersediaan dan Pemanfaatan Alsintan Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2020

No	Jenis Alat	Jumlah (unit)		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Tractor Roda 2	1,778	1,848	1,828
2	Tractor Roda 4	32	43	46
3	Alat Tanam Padi (Rice Transplanter)	31	33	34
3	Pompa Air < 4 Inchi	122	151	176
4	Pompa Air 4 Inchi	36	129	189
5	Pompa Air > 4 Inchi	104	116	171
6	Combine Harvester Kecil	4	5	8
7	Combine Harvester Menengah	7	15	14
8	Combine Harvester Besar	4	6	7
9	Corn Combine Harvester Besar	-	1	6

Sumber : Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, 2020



Gambar 2.16 : Grafik Ketersediaan dan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018 – 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan

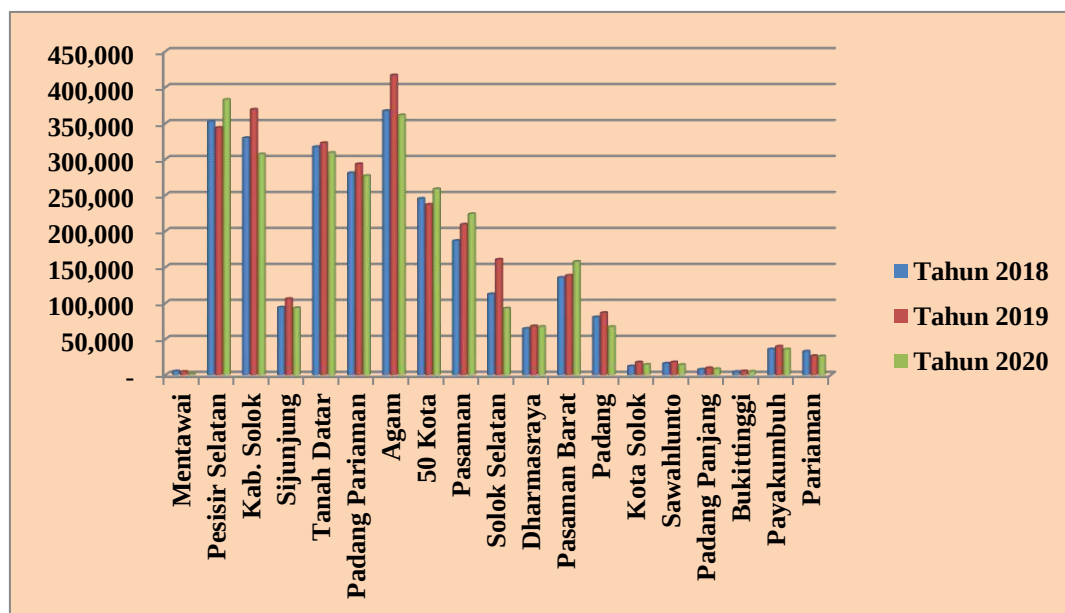
Jika dibandingkan dengan 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu Kabupaten yang menjadi penopang utama sebagai penyedia beras di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dan Provinsi Sumatera Barat umumnya. Hal ini terlihat pada Tabel 2.70 dibawah ini dimana Kabupaten Pesisir Selatan menjadi penyumbang terbesar padi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini.

**Tabel 2.70
Produksi Padi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020*)
1	Kab. Mentawai	5,389	4,697	1,262
2	Kab. Pesisir Selatan	352,386	343,824	382,843
3	Kab. Solok	329,621	369,175	307,084
4	Kab. Sijunjung	93,994	105,983	93,270
5	Kab. Tanah Datar	317,152	322,682	309,073
6	Kab. Padang Pariaman	280,892	293,360	276,957
7	Kab. Agam	367,284	416,828	361,289
8	Kab. Lima Puluh Kota	245,282	237,028	258,668
9	Kab. Pasaman	186,701	209,444	223,952
10	Kab. Solok Selatan	112,600	160,625	92,782
11	Kab. Dharmasraya	64,573	68,005	67,248
12	Kab. Pasaman Barat	135,397	138,322	157,773
13	Kota Padang	80,653	86,542	67,079
14	Kota Solok	12,346	17,823	14,590
15	Kota Sawahlunto	16,196	17,926	14,278
16	Kota Padang Panjang	7,822	9,810	8,493
17	Kota Bukittinggi	4,581	5,450	4,933
18	Kota Payakumbuh	35,932	39,800	35,826
19	Kota Pariaman	32,875	26,677	26,187
JUMLAH		2,681,676	2,874,001	2,703,586

Sumber :Subbag Program dan Pelaporan Distahortbun Prov. Sumbar, 2020

*) Angka Sementara



Gambar 2.17 : Perbandingan Produksi Padi Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2020

Berikut realisasi dan capaian peningkatan produksi utama padi pada tahun 2019

Tabel 2.71
Realisasi dan Capaian Peningkatan Produksi Utama Padi
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan produksi utama padi	Ton	291,201	382,839	131.47

Formulasi capaian indikator kinerja Peningkatan produksi utama padi

$$\frac{(\text{jumlah produksi padi tahun ini} - \text{jumlah produksi padi tahun lalu})}{\text{jumlah produksi padi tahun lalu}} \times 100 \%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Peningkatan Produksi Utama Padi Tahun 2020 :	$\frac{382,839 \text{ ton}}{291,201 \text{ ton}} \times 100\% = 131.47\%$
--	---

2. Jagung

Target produksi jagung pada tahun 2020 adalah sebesar 129.108 ton dengan realisasi mencapai 241.163 ton atau dengan capaian 186,79%. Dibandingkan produksi tahun 2019 sebesar 116.031 ton terjadi kenaikan produksi sebesar 125.132 ton. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu :

a. Meningkatnya Luas Tanam dan Panen Jagung

Tingginya capaian realisasi tanam dan panen jagung disebabkan adanya program Upaya Khusus (UPSUS) untuk memacu Luas Tambah Tanam (LTT) komoditi jagung yang merupakan salah satu program utama dari Kementerian Pertanian RI. Dalam melaksanakan program ini, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Setiap hari laporan tanam jagung dicatat dan direkap di Kabupaten untuk dilaporkan ke Provinsi kemudian diteruskan ke Kementerian Pertanian. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, realisasi tanam jagung naik 51.97% dan realisasi panen naik 87,24%, tingginya realisasi tanam tahun 2020 ini didukung adanya bantuan benih jagung hibrida dari Kementerian Pertanian seluas 9.436 Ha dengan jumlah benih sebanyak 141.540 Kg. Dan tingginya realisasi panen tahun 2020 karena bantuan benih jagung tahun 2019 seluas 7.725 Ha yang dialokasikan akhir tahun 2019 sehingga panennya

dilakukan pada tahun 2020, dengan naiknya luas tanam dan panen padi tahun 2020 ini sangat berpengaruh sekali terhadap produksi tahun 2020.

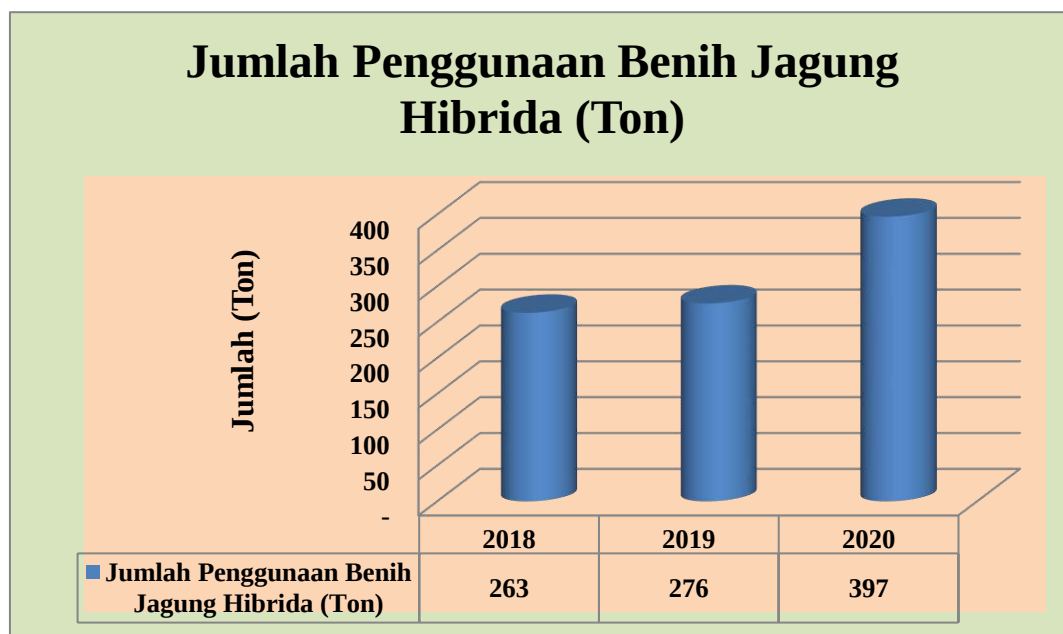
b. Peningkatan Penggunaan Benih Jagung Hibrida

Benih unggul bermutu menjadi syarat utama dalam memaksimalkan hasil produksi tanaman jagung, selain dengan penanganan faktor-faktor agronomi. Benih bermutu merupakan benih dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi. Di Kabupaten Pesisir Selatan tingkat penggunaan jagung hibrida 100%. Pada Tabel 3.11 dapat dilihat pemakaian benih jagung hibrida dari tahun 2018 – 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.72
Jumlah Penggunaan Benih Jagung Hibrida Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2020

Komoditi	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Jumlah Penggunaan Benih (Ton)	Persentase Penggunaan (%)
Jagung	2018	17.564	263	100,00
	2019	18.407	276	100,00
	2020	26.479	397	100,00

Sumber : Seksi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2020



Gambar 2.18 : Grafik Penggunaan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020

Kabupaten Pesisir Selatan memberikan kontribusi besar terhadap produksi jagung Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat pada Tabel 2.73

dibawah ini dimana Kabupaten Pesisir Selatan menjadi penyumbang terbesar kedua produksi jagung di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini.

Tabel 2.73
Produksi Jagung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2020

No.	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020*)
1	Kab. Mentawai	25	2,527	38
2	Kab. Pesisir Selatan	135,486	135,836	241,163
3	Kab. Solok	3,916	51,023	4,059
4	Kab. Swl Sijunjung	2,973	5,978	5,470
5	Kab. Tanah Datar	40,023	82,514	34,040
6	Kab. Padang Pariaman	60,524	63,125	35,007
7	Kab. Agam	119,378	200,279	106,580
8	Kab. Lima Puluh Kota	40,211	101,778	46,401
9	Kab. Pasaman	66,284	111,833	69,529
10	Kab. Solok Selatan	67,661	108,773	77,845
11	Kab. Dharmasraya	15,930	8,121	4,042
12	Kab. Pasaman Barat	367,865	329,594	262,284
13	Kota Padang	512	1,480	115
14	Kota Solok	418	2,351	904
15	Kota Sawahlunto	240	6,375	145
16	Kota Padang Panjang	-	76	-
17	Kota Bukittinggi	61	1,125	122
18	Kota Payakumbuh	1,987	6,003	1,534
19	Kota Pariaman	248	890	1,602
JUMLAH		923,742	1,219,681	890,880

Sumber : Subbag Program dan Pelaporan Distanshortbun Prov. Sumbar, 2020

*) : Angka Sementara

Berikut tabel 2.74, realisasi dan capaian indikator peningkatan produksi utama jagung pada tahun 2020

Tabel 2.74
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Utama Jagung Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan produksi utama Jagung	ton	129,108	241,163	186.79

Formulasi capaian indikator kinerja Peningkatan produksi utama jagung

$$\frac{(\text{jumlah produksi jagung tahun ini} - \text{jumlah produksi jagung tahun lalu})}{\text{jumlah produksi jagung tahun lalu}} \times 100 \%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Peningkatan Produksi Utama Jagung Tahun 2020 : } \frac{241,163 \text{ ton}}{129,108 \text{ ton}} \times 100\% = 189.79\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target indikator Peningkatan Produksi Utama Jagung Tahun 2020 adalah sebesar 129,108 ton dan terealisasi



sebesar 241.163 ton dengan capaian sebesar 186,79%. Berdasarkan pencapaiannya indikator ini diklasifikasikan ***Sangat Berhasil*** dan kategori penilaian kinerja adalah ***Sangat Baik***.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa realisasi produksi utama jagung di Kabupaten Pesisir Selatan mampu melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target produksi jagung tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

- a. Meningkatnya penggunaan bibit unggul ditingkat petani, baik bibit yang disalurkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, maupun bibit dari swadaya petani itu sendiri.
- b. Meningkatnya penggunaan alat dan mesin pertanian, terutama untuk budidaya padi sawah.
- c. Meningkatnya sekolah lapangan atau penyuluhan yang diberikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
- d. Sinergi antara program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- e. Khusus komoditi padi dan jagung, peningkatan produksi didorong melalui program luas tambah tanam yang dievaluasi setiap hari.

Beberapa permasalahan dan solusi yang terjadi dalam peningkatan produkdis jagung di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Banyaknya jaringan irigasi yang rusak,
2. Masih rendahnya pemakaian benih padi unggul dan bersertifikat dikarenakan masih kurangnya ketersediaan benih tersebut disaat petani turun kesawah secara serentak,
3. Tingginya harga benih jagung hibrida ditingkat pedagang pengecer,
4. Masih susah nya akses Petani/Kelompok Tani ke Perbankan untuk mendapatkan modal dalam usaha bidang pertanian.

Solusi

1. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi,
2. Pembangunan/rehabilitasi sumber-sumber air baru bagi pertanian,
3. Menumbuhkembangkan penangkar-penangkar benih unggul dan bersertifikat, dan
4. Mempermudah akses Petani/Kelompok Tani dalam memperoleh kredit dari Perbankan.

c. Daging

Peningkatan produksi daging selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan. Produksi daging dari tahun 2017-2019 secara berturut-turut yaitu 4.420.447 kg, 4.471.347 kg, 4.750.031 kg. Jika dilakukan perbandingan produksi antara tahun 2019 dengan 2018, maka terjadi peningkatan



sebanyak 278.684 kg. Untuk lebih jelasnya populasi ternak dan perkembangan produksi daging tahun 2017-2019 dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.75
Populasi Ternak dan Perkembangan Produksi Daging
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2018	2019	2020
1.	Produksi Daging		4.471.347	4.750.031	5.486.815
	a. Sapi Potong	kg	1.367.751	1.599.830	1,625,523
	b. Kerbau	kg	44.555	64.017	54,568
	c. Kambing	kg	45.407	44.358	38,676
	d. Ayam Buras	kg	971.172	1.043.560	922,165
	e. Ayam Potong	kg	1.868.640	1.971.753	2,677,012
	f. Ayam Ras Petelur	kg	77.949	70.468	63,352
	g. Itik	kg	95.873	102.421	105,519

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020

Secara umum produksi daging di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Data pemotongan ternak sapi tercatat pada tahun 2020 sebanyak 5.486.815 kg sedangkan tahun 2019 sebanyak 4.750.031 kg, ternak kerbau pada tahun 2020 sebanyak 54.568 kg, ternak kambing pada tahun 2020 sebanyak 38.676 kg. Berikut realisasi dan capaian indikator peningkatan produksi utama daging pada tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.76 berikut.

Tabel 2.76
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Utama
Daging Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan produksi utama daging	kg	3,783,640	5,486,815	145.01

Faktor keberhasilan:

1. Program UPSUS SIWAB = dalam rangka meningkatkan populasi ternak sapi
2. Adanya upaya pengembangan budidaya itik bayang dan ayam lokal melalui bantuan bibit telur itik bayang dan bibit telur ayam lokal yang didistribusikan ke masyarakat.
3. Adanya pembinaan (follow up) kepada kelompok tani ternak yang menerima bantuan berupa telur bibit ayam lokal/itik..

d. Telur

Produksi telur unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur dan Itik) menurun dari 2,241,776 kg di tahun 2019 menjadi 2.135.136 kg di tahun 2020. Terdapat penurunan produksi telur sebesar 106.640 kg. Perkembangan jumlah populasi ternak unggas tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.77 dibawah ini :



Tabel 2.77
Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak Unggas
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2018	2019	
A.	Produksi Telur Unggas	Kg	2.226.373	2.241.776	2.135.136
1.	Ayam Buras	Kg	506304	468.670	669,228
2.	Ayam Ras Petelor	Kg	824.970	816.875	480,755
3.	Itik	Kg	895.099	956.232	985,153

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2019

Berikut 2.78, realisasi dan capaian indikator peningkatan produksi utama telur pada tahun 2020:

Tabel 2.78
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Utama Telor
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan produksi utama Telor	Kg	1.740.637	2.135.136	122,66

Formulasi capaian indikator kinerja Peningkatan produksi utama telur

$$\frac{(\text{jumlah produksi telur tahun ini} - \text{jumlah produksi telur tahun lalu})}{\text{jumlah produksi telur tahun lalu}} \times 100 \%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Peningkatan Produksi Utama Telor Tahun 2019 :	$\frac{2.135.136 \text{ kg}}{1.740.637 \text{ kg}}$	X	100%	=	122.66%
---	---	---	------	---	---------

e. Ikan

Produksi perikanan terjadi peningkatan dari tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019 yaitu dari 57.745 ton menjadi 47.361 ton atau mengalami penurunan sebesar 17.98%. Peningkatan produksi perikanan ini dikarenakan meningkatnya jumlah tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan dan bantuan alat penangkapan seperti Perahu Jukung, Mesin tempel dan long tail, Alat tangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan baik bersumber APBD, APBD Provinsi dan DAK.

Capaian kinerja produksi perikanan budidaya terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 23,74 %, begitu juga dengan produksi perikanan tangkap dari tahun 2019 terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 15,82 %. Hal ini diakibatkan karena adanya Wabah Virus Corona (Covid 19) yang melanda Dunia



khususnya Indonesia yang berdampak pada kehidupan dan perekonomian masyarakat serta pengaruh musim, yang mengakibatkan terjadi Recofusing Anggaran sehingga target yang direncanakan tidak tercapai.

Capaian sasaran strategis 1 juga didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya :

1. Operasional Balai Benih Ikan (BBI)

Kegiatan Operasional Balai Benih Ikan (BBI) ini bertujuan agar tersedianya dan tercukupinya pasokan benih ikan air tawar terutama Lele dan Nila untuk lingkup Kab. Pesisir Selatan dan menghasilkan PAD untuk Kab. Pesisir Selatan.

Kegiatan yang dilakukan di BBI Pincuran Boga yaitu melaksanakan kegiatan pembenihan mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan dan panen benih untuk di jual. Selain untuk dijual ada juga yang didistribusikan untuk bantuan – bantuan berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Perikanan.

- a. Bantuan Induk Ikan Nila sebanyak 156.100 ekor ke PKK seluruh Kecamatan mulai dari Kec. Koto XI Tarusan s/d Kecamatan Silaut.
- b. Penjualan Benih Lele sebanyak 7.000 ekor dan benih Nila sebanyak 3.000 ekor yang mana hasil penjualan tersebut masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid 19)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan dan Pemulihan perekonomian masyarakat akibat dari Covid 19,. Kegiatan ini berupa bantuan yang diberikan ke kelompok pembudidaya ikan berupa bantuan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Benih Nila dan Pakan Ikan,
- b. Pengadaan Benih Lele dan Pakan Ikan,
- c. Pengadaan Paket Lele Terpal Bulat,
- d. Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Lele Terpal Bulat

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan (DAK Penugasan)

Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 , yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya,



Bantuan Sarana dan prasarana yang diberikan berupa :

- a. Rehabilitasi Kolam atau Bak Peminjahan seluas : 100 M²
- b. Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar) seluas 43 M²
- c. Penyediaan Calon Induk Unggul beserta pakan calon induk unggul sebanyak 2 paket
- d. Paket Percontohan Nila di kolam / tambak sebanyak 3 paket
- e. Paket Percontohan Budidaya Gurame sebanyak 3 paket
- f. Paket Budidaya lele di kolam sebanyak 3 paket

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil Perikanan (DAK Penugasan)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil Perikanan ini juga penentu dalam peningkatan Produksi Perikanan sebab tanpa didukung oleh sarana prasarna yang cukup maka dapat mempengaruhi Produksi Perikanan.

Bantuan Sarana dan Prasarana yang dibantu ini berasal dari dana DAK Penugasan tahun 2020 berupa :

No.	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
1.	Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran < 3 GT beserta mesin dan alat penangkap ikan serta alat bantu penangkapan	8 KUB/Koperasi	15 Paket kapal < 3GT Lengkap(Perahu jukung, mesin tempel yamaha 15 PK , jaring Monofilament dan life jacket, coolbox)	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Kesejahteraan Keluarga Nelayan.

5. Penanganan Covid 19 untuk nelayan (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid 19)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan dan Pemulihan perekonomian masyarakat akibat dari Covid 19,. Kegiatan ini berupa bantuan yang diberikan ke KUB berupa bantuan sebagai berikut :

- a. Mesin tempel 15 PK sebanyak 10 Unit
- b. Mesin longtail 8,3 PK sebanyak 8 Unit



c. Alat tangkap gillnet sebanyak 23 Unit

Dalam upaya pencapaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan didukung oleh Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Total Anggaran sebesar Rp. 4.977.695.750,- dan terealisasi sebesar Rp 4.615.966.950 atau mencapai 92,73 %.

Berikut table 2.79, realisasi dan capaian indikator peningkatan produksi utama Ikan pada tahun 2020:

Tabel 2.79
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Peningkatan Produksi Utama Ikan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan produksi utama Ikan (ton)	ton	55,546	47,362	85.26

Formulasi capaian indikator kinerja Peningkatan produksi utama ikan

$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan Tahun Ini} - \text{Jumlah Produksi Ikan Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Produksi Ikan Tahun Lalu}} \times 100\%$
--

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Peningkatan Produksi Utama Ikan Tahun 2020 :	$\frac{47,362 \text{ ton}}{55,546 \text{ ton}}$	X	100%	=	85,26%
--	---	---	------	---	--------

Keberhasilan peningkatan produksi ikan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas permasalahan dan kendala antara lain : Dalam jangka pendek, suksesnya Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diukur dari suksesnya bidang perikanan. Oleh karena itu program kerja Dinas Perikanan diarahkan untuk mendukung tercapainya sukses bidang perikanan.

2. Skor Pola Pangan Harapan

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui



kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya baik secara absolut maupun relative terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mencakup kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, aroma dan cita rasa. Definisi PPH konsumsi adalah proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keberagaman pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Jumlah skor PPH konsumsi maksimal 100.

Secara umum kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan 2018 s.d. 2020 cenderung semakin baik dan kondusif, dan kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) juga mengalami kenaikan menjadi 103,70% dari target yang ditetapkan. Urusan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020:

Tabel 2.80
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Pola Pangan
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Pola Pangan Harapan	ton	82	86.4	105.37

Formulasi capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan

$$\frac{\text{Jumlah skor PPH}}{\text{Jumlah skor maksimal PPH}} \times 100 \%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020 : } \frac{86.4}{82} \times 100\% = 105.37\%$$

Berdasarkan hasil capaian Skor PPH menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin baik. Namun, kondisi saat ini, konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam ditunjukkan dengan masih tingginya konsumsi

padi-padian, dan rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian.

Skor Pola Pangan Harapan tahun 2020 adalah 86.4% dibandingkan tahun 2019 sebesar 84%. Menurut ketentuan apabila skor aktual kelompok bahan pangan per-hari memang sudah diatas Angka Kecukupan Energi, namun keberagaman dan keseimbangan konsumsi masyarakat perlu dilakukan penyadaran kepada masyarakat tentang penting keragaman dalam pemenuhan zat gizi yang dibutuhkan tubuh karena tidak ada satu jenis pangan yang mampu memenuhi kebutuhan zat gizi tubuh yang sangat beragam.

Kelembagaan pemasaran bahan pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen dan sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Selain itu masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil diantara pelakunya. Selanjutnya informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untuk melihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam, melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan gejolak harga yang terjadi, sedangkan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolak harga pada saat-saat tertentu. Dengan demikian diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan tersebut, sehingga informasi harga sampai ke tangan produsen dan pemerintah tepat waktu.

Perbandingan perkembangan skor pola pangan harapan antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel 3.81 dibawah ini:

Tabel 2.81
Perkembangan Perbandingan Ketersediaan Pangan, Konsumsi Pangan dan
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2020

No	Uraian	Satuan	Kabupaten			Provinsi			Nasional		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	3,974.00	5,193.00	5,321	3,888.00	3,889.00	2,554.00	4,006.00	3,306.00	2,754.00
2.	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	86.10	69.91	83.45	109.26	109.13	80.78	92.75	83.92	81.57
3.	ketersediaan pangan utama	kg/kapita/tahun	143.03	153.67	153.67	109.70	284.31	149.69	185.97	145.14	121.69



4.	Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2,291.00	2,327.00	2,249.66	2,299.00	2,299.34	2,175.44	2,153.00	2,145.00	2,150.00
5.	Konsumsi Protein	gram/kapita/hari	59.60	61.86	60.29	62.60	62.61	60.10	61.45	60.25	62.91
6.	Skor Pola Pangan Harapan	%	80.50	84.00	86.40	86.30	86.30		88.00	90.70	

Sumber : Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan , 2020

Dalam pencapaian target indikator skor pola pangan harapan, ditemukan beberapa permasalahan dan kendala diantaranya Skor PPH yang dicapai pada tahun 2020 adalah 86.4 masih rendah dari target skor yang harus dicapai berdasarkan RPJMD tahun 2021 yaitu 82.

Dari angka tersebut terlihat dimana tingkat keragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan relatif masih rendah. Hal ini disebabkan masih tingginya konsumsi kelompok padi-padian khususnya beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi, sedangkan konsumsi 8 (delapan) kelompok pangan lainnya baik kuantitas, kualitas maupun tingkat keragamannya relatif masih kurang dan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masih rendah.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan antara lain :

1. Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan
5. Program Peningkatan, Penerapan Teknologi Pertanian Pertanian/Perkebunan
6. Program Peningkatan Produksi Pertanian
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
8. Program Peningkatan Produksi hasil peternakan
9. Program Peningkatan Pemasaran Produksi hasil peternakan
10. Program Peningkatan Agribisnis Peternakan
11. Program Peningkatan, Penerapan Teknologi Peternakan
12. Program Peningkatan Sarana Peternakan
13. Program pengembangan budidaya perikanan
14. Program pengembangan perikanan tangkap
15. Program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)
16. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat



Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan serta Kelautan dan Perikanan tersebut diatas didukung oleh dana sebesar Rp6,512,444,446,– terealisasi sebesar Rp5,776,353,346,– atau 88,70%. Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 736.091.100,– atau 11,30%

Sasaran 8 : Meningkatnya Peran Pengolahan dan Pemasaran terhadap Ekonomi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 8 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.82
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)	%	7,50	6.47	86,27
2.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)	%	12,50	12,25	98, 00
<i>Rata-rata Capaian</i>					92,13

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 8 adalah sebesar 92,13%. Rata-rata capaian sasaran strategis 8 termasuk ***Sangat Berhasil*** dengan kategori ***Sangat Baik***.

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)

Dalam rangka peningkatan Kontribusi Industri Terhadap PDRB, Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu Perangkat Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya peningkatan Kontribusi PDRB tersebut Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan perindustrian telah melakukan beberapa hal antara lain berupa:

- a. Meningkatkan keterjaminan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam hal kelayakan, keamanan, kehalalan dan higienitas melalui fasilitasi pengujian dan peningkatan kapasitas IPTEK pelaku IKM

- b. Mengikuti Promosi produk olahan di dalam dan luar daerah yang diprakarsai oleh Dekranasda sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pengembangan IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pelatihan diversifikasi produk kerajinan anyaman pandan
- d. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk melalui program GMP (Good Manufacturing Practices) dan GKM (Gugus Kendali Mutu)
- e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kemasan dan Pemasaran Digital
- f. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah
- g. Pembangunan gedung sentra IKM di Nagari Carocok Mandeh Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan.

Berikut data dukung terhadap perkembangan sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Tabel 2.83
Pertumbuhan Industri tahun 2018 – 2020 (%)

Uraian		2018	2019	2020
1	Jumlah Industri	2.252	2.473	2503
	Pertumbuhan Industri Kecil (%)	10,12	8,94	1,20

Sumber : Direktori IKM Diskoperindag Pessel, 2020

Tabel 2.84
Pertumbuhan dan Potensi Sentra IKM tahun 2018 – 2020

Uraian		2018	2019	2020
1	Jumlah Sentra IKM	3	3	3
2	Jumlah Kelompok Berpotensi Sentra	6	6	6

Tabel 2.85
Direktori Perusahaan Industri Kecil, menengah dan Besar tahun 2018 – 2020

NO	JENIS INDUSTRI	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	INDUSTRI KECIL	2.252	2473	2503
	a. Jumlah Tenaga Kerja	8.915	9641	9,796
	b. Nilai Investasi	93.833.646.000	99.380.171.000	100,412,401,000
	c. Nilai Produksi	381.321.017.000	428.314.415.000	433,303,325,000
	d. Nilai Bahan Baku	184.726.274.000	212.432.726.000	216,526,551,000
	e. Omset	438.519.169.550	459.561.577.250	498,905,842,550
2.	INDUSTRI BESAR	35	35	35

BERDASARKAN KLASIFIKASI INDUSTRI		TAHUN/JUMLAH		
NO.	KLASIFIKASI INDUSTRI	2018	2019	2020



1.	Sandang dan Kulit	229	276	280
2.	Pangan	886	1.031	1051
3.	Kerajinan	153	156	156
4.	Kimia dan Bangunan	888	910	913
5.	Logam dan Elektronika	96	100	103
	TOTAL JUMLAH	2252	2473	2,503

Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2020

Tabel 2.86
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)	%	7.50	6,47	86,27

Formulasi capaian indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)

$$\frac{\text{Nilai Tambah Sektor Industri}}{\text{Jumlah PDRB}} = X 100\%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Realisasi Kontribusi Sektor Industri terhadap target Kontribusi Tahun 2019 : } \frac{6,47}{7,50} \times 100\% = 86,27$$

Kontribusi PDRB sektor industri di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan nilai yang cukup baik. Pada tahun 2020 nilai kontribusi sektor industri mencapai 6,47%.

2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)

Dalam upaya peningkatan Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan perindustrian pada tahun 2020 melalui program dan kegiatan khususnya yang ada pada bidang perdagangan, koperasi, UMKM telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat-pusat perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengembangan potensi perdagangan dan jasa berupa pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana Pasar rakyat beserta fasilitasnya. Kegiatan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilakukan selama tahun 2019 adalah lanjutan pembangunan pasar rakyat mandeh, lanjutan pembangunan pasar rakyat tapan, revitalisasi pasar kambang, lanjutan pembangunan pasar rakyat balai selasa, pembangunan los pasar koto berapak, lanjutan pembangunan pasar



- batang kapas, pembangunan watertoren pasar kambang, rehab WC pasar painan, pembangunan pasar inderapura, pembangunan pasar sungai sirah silaut
2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelola pasar yang dilakukan melalui mantri pasar beserta perangkatnya.
 3. Pemantauan harga dalam rangka menjaga kestabilan harga di Kabupaten Pesisir Selatan.
 4. Pengawasan terhadap barang beredar untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen
 5. Pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya.
 6. Pengawasan dan pelayanan terhadap alat UTTP (Ukur, takar, timbang dan perlengkapan)
 7. Pembinaan dan Pengawasan terhadap koperasi
 8. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah melalui fasilitasi permodalan, pelatihan kewirausahaan.

Berikut data perkembangan sektor perdagangan, koperasi, UMKM yang menjadi urusan Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020:

Tabel 2.87
Data Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah Pasar rakyat dikelola Pemerintah Kabupaten	11 pasar
2	Jumlah Pasar rakyat dikelola Pemerintah Nagari	35 pasar
3	Jumlah pasar rakyat yang dikelola bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari	3 pasar

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, 2020

Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2020

Tabel 2.88
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan
terhadap PDRB Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)	%	12,50	12,25	98,00

Formulasi capaian indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)

$$\frac{\text{Jumlah kontribusi dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah



Capaian Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2020 :	$\frac{12,50}{12,25}$	X	100%	=	98,00%
--	-----------------------	---	------	---	--------

Adapun program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis atas Meningkatnya Peran Pengolahan dan Pemasaran terhadap Ekonomi Daerah antara lain :

1. Program pengembangan industri industri kecil dan menengah
2. Program pengembangan sentra sentra industri potensial
3. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
4. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis atas meningkatnya Peran Pengolahan dan Pemasaran terhadap Ekonomi Daerah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp9,339,590,087,- dengan Realisasi sebesar Rp9,015,485,685,- atau 96,53%. Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp324.104.402,- atau 3,47%

Sasaran 9: Terwujudnya Peran Pemerintah dan Struktur Sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 9 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.89
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kasus PERDA yang diselesaikan	%	90	100	111,11
<i>Rata-rata Capaian</i>					111,11

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 9 adalah sebesar 111,11%. Rata-rata capaian sasaran strategis 9 termasuk kategori **Sangat Baik**.

1. Persentase Kasus Perda yang diselesaikan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan, ketertiban umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan-peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Upaya meningkatkan kualitas Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Perda Nomor 1 tahun 2016 yang berisikan tentang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sebagai berikut :

- a. Tertib jalan dan angkutan Umum
- b. Tertib bangunan dan tata ruang
- c. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
- d. Tertib kebersihan lingkungan
- e. Tertib Pedagang Kaki lima
- f. Tertib Usaha dan Rumah Kos
- g. Tertib Sungai, Saluran, kolam dan pinggir pantai
- h. Tertib Kesehatan
- i. Tertib Sosial
- j. Tertib Tempat Hiburan, keramaian Orgen tunggal

Upaya untuk mengoptimalisasi pencapaian kinerja pada peran pemerintan dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat melalui penegakkan Perda. Sasaran ini secara teknis menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberhasilan capaian kinerja dan Persentase penurunan Gangguan Trantibum daerah ini didukung oleh:

1. Membentuk Tim SK 4 (beranggota instansi terkait yakni Satpol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Daerah, Korem,, POM, dan lain-lain).
2. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan dengan Camat dan walinagari serta tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan gangguan tibum dan tranmas.
3. Meminta peran serta masyarakat untuk selalu memberikan informasi-informasi tentang pelanggaran Peraturan Daerah.

Upaya penurunan pelanggaran Perda

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan Penegakan Peraturan Daerah secara optimal dengan keterbatasan



anggaran yang ketersediaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terus melaksanakan tugasnya sebagai penegakan peraturan daerah tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada berakibat kurangnya pelaksanaan kegiatan penegakan perda. Dengan melakukan Patroli rutin dan operasi penegakan Perda di beberapa wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, serta bantuan kerjasama instansi lain yang dapat mengurangi pelanggaran Perda.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target penegakan perda antara lain :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kegiatan Forum Penegakan Perda.

Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase kasus Perda yang diselesaikan Tahun 2020

Tabel 2.90
Realisasi dan Capaian Persentase kasus Perda yang diselesaikan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kasus Perda yang diselesaikan	%	90	100	111,11

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase kasus Perda yang diselesaikan

Penyelesaian penegakkan PERDA	X 100 %
Jumlah pelanggaran PERDA	

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase kasus Perda yang diselesaikan Tahun 2020 :	90								
	100	X	100%	=	111,11%				

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Peran Pemerintah dan Struktur Sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat antara lain :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kegiatan Forum Penegakan Perda.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Peran Pemerintah dan Struktur Sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat tersebut diatas didukung oleh dana sebesar Rp9,690,292,686,- terealisasi sebesar Rp8,560,935,499,- atau 88,35%. Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.129.357.187,- atau 11,65%.

Sasaran 10 :Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 10 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.91
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	%	75	100	133,33
2.	Jumlah Dasa Wisma Maju	unit	645	545	84,50
Rata-rata Capaian					108,91

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 11 adalah sebesar 108,91%. Rata-rata capaian sasaran strategis 11 termasuk kategori ***Sangat Baik***.

1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi sasaran dalam capaian indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2020 antara lain :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) 53 unit dari 182 LPMN di Nagari.
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nagari sebanyak 160 unit dari 182 PKK Nagari, dan
3. Badan Kerja sama Antar Nagari (BKAN) sebanyak 15 unit dari 15 unit yang ada Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif Tahun 2019

Tabel 2.92
Realisasi dan Capaian Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif membina kelompok Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	%	75	100	133,33

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif

Lembaga Pemberdayaan yg aktif	X 100 %
Lembaga Pemberdayaan yg ada	

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif Tahun 2020 :	$\frac{100}{75}$	X	100%	=	133,33%
--	------------------	---	------	---	---------

2. Jumlah Dasa Wisma Maju

Kelompok Dasawisma merupakan salah satu kelompok sosial yang ada di pedesaan. Kelompok sosial tersebut termasuk dalam kelompok sosial yang teratur (informal, sekunder). Kelompok tersebut termasuk kelompok informal karena kelompok tersebut tidak hanya mempunyai satu kegiatan misalnya arisan, namun 9 mempunyai kegiatan lain diantaranya Sharing (tukar pendapat), pengajian ibu-ibu dan kegiatan ibu-ibu dasawisma lainnya. Dari beberapa kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan rasa solidaritas diantara ibu-ibu Dasa Wisma di kelompok tersebut. Kelompok sosial ini juga disebut kelompok sosial sekunder karena kelompok sosial ini termasuk kelompok yang terbuka dan tidak hanya terdiri dari satu keluarga tertentu. Anggotanya pun juga bermacam-macam mulai dari golongan atas sampai golongan menengah kebawah, dan mereka saling membaaur tanpa memandang status sosial maupun ekonomi dalam kelompok ini. Ciri khusus dari kelompok sosial ibu-ibu Dasa Wisma ini adalah berkumpul setiap 1 bulan sekali di rumah anggotanya secara bergiliran, mereka terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan pegawai dengan usia rata-rata di atas 39 tahun, ciri lainnya yaitu setiap acara arisan di rumah salah satu anggota selalu dihidangkan aneka makanan, dan uang yang digunakan untuk memasak makanan tersebut berasal dari uang hasil arisan. Sehingga, sikap atau karakteristik dari ibuibu Dasa Wisma tetap memiliki rasa solidaritas dan loyalitas yang tinggi pada organisasi tersebut.

2.1.3 Fungsi Pokok Dasa.

Kelompok dasa wisma merupakan unit terkecil dari kelompok PKK yang terdiri dari 10 sampai 20 Kepala Keluarga (KK) dalam satu wilayah Rukun Tetangga (RT). Dari 10 anggota itu, ada seorang penanggung jawab untuk memantau kondisi rumah tangga yang lain. Prinsip dasawisma adalah pengawasan dan pemberdayaan hingga ke masyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil, yakni keluarga.

Fungsi kelompok Dasa Wisma ini adalah sebagai penggerak dan pembina masyarakat di lingkungannya untuk turut mensukseskan pelaksanaan program pokok PKK. Sedangkan tugas kelompok dasa wisma itu adalah mencatat dan membuat laporan dengan mengunjungi rumah – rumah dan menanyakan tentang data keluarga. Data tersebut yang mencakup data keluarga, ibu hamil, kelahiran serta kematian yang terjadi di lingkungannya. Selain itu, tugas kelompok dasa wisma juga memberikan penyuluhan kepada anggota kelompok dasawisma lainnya. Penyuluhan tersebut seperti penyuluhan mengenai Keluarga Berencana (KB), kesehatan, mengingatkan agar ibu hamil memeriksakan diri ke dokter secara berkala dan membawa balita ke posyandu secara rutin, penyuluhan tentang gizi serta penyuluhan lainnya. Berikut data dasa wisma di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 berdasarkan klasifikasi:

Tabel 2.93
Jumlah Dasa wisma berdasarkan klasifikasi kelompok Dasawisma
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	JUMLAH DASAWISMA	KLARIFIKASI PERKEMBANGAN KELOMPOK DASAWISMA		
				TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU
1	KOTO XI TARUSAN	23	595	200	320	75
2	BAYANG	17	503	179	273	51
3	IV BAYANG UTARA	6	80	15	43	22
4	IV JURAI	20	202	32	88	82
5	BATANG KAPAS	9	387	88	267	32
6	SUTERA	12	295	98	167	30
7	LENGAYANG	9	495	125	324	46
8	RANAH PESISIR	10	215	67	118	30
9	LINGGO SARI BAGANTI	16	574	217	318	39
10	AIR PURA	10	187	50	114	23
11	RANAH AMPEK HULU TAPAN	10	172	66	85	22
12	PANCUNG SOAL	10	285	90	172	23
13	BAB TAPAN	10	167	63	83	21
14	LUNANG	10	184	55	102	27
15	SILAUT	10	174	40	112	22
Jumlah		182	4.515	1.385	2.586	545

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Dasa wisma di kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 4.515 yang tersebar di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk klasifikasi maju sebanyak 545. Pengelompokan klasifikasi

dasawisma berdasarkan tingkat perkembangan berdasarkan klasifikasinya dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tumbuh

Dasawisma di katakan tumbuh mempunyai ciri ciri sebagai berikut:

1. Kelompok Sudah terbentuk dan punya SK
2. Belum ada pengelolaan administrasi kelompok dasawisma
3. Belum Punya peta Dasawisma
4. Kegiatan 1 program pokok PKK hanya dilaksanakan secara insidentil
5. Belum terlihat kegiatan HATINYA PKK

2. Berkembang

Dasawisma di katakan tumbuh mempunyai ciri ciri sebagai berikut:

1. Kelompok Sudah terbentuk dan telah punya DK
2. Pengelolaan administrasi kelompok dasawisma sudah
3. Sudah punya peta dasawisma
4. Kegiatan 10 program PKK hanya dilaksanakan secara rutin
5. Sudah terlihat kegiatan HATINYA PKK disebahagian perkarangan rumah

3. Maju

Dasawisma di katakan tumbuh mempunyai ciri ciri sebagai berikut:

- a. Kelompok sudah terbentuk dan telah punya SK
- b. Pengelolaan administrasi kelompok dasawisma
- c. Sudah punya peta dan profil kelompok dasawisma
- d. Kegiatan 10 program Pokok PKK telah mempunyai buku catatan kegiatan
- e. Sudah ada kegiatan HATINYA PKK disetiap perkarangan rumah dan sudah punya kebun kelompok dasawisma

Adapun program yang menunjang sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat antara lain Program Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat nagari. Program-program diatas tersebut dilaksanakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pendudukan dan KB Kabupaten Pesisir Selatan. Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp11,831,081,978,- terealisasi sebesar Rp9,531,368,180,- atau 80,56%. Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran lebih kurang Rp2.299.713.798,- atau 19,44%.

Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 10 (sepuluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja



Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tercantum pada tabel 2.94 dibawah ini:

Tabel 2.94
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	20,610,988,423	19,777,928,533	95.96
2	Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	747,446,237,111	720,191,629,052	96.35
3	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi secara Berkelanjutan	145,733,394,850	137,730,119,413	94.51
4	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial secara berkelanjutan dan menurunkan ketimpangan	19,840,495,860	11,167,339,427	56.29
5	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan peran lembaga adat	12,512,311,768	11,199,981,000	89.51
6	Lestarnya Nilai nilai Adat dan Budaya Daerah	150,000,000	108,131,800	72.09
7	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan	6,512,444,446	5,776,353,346	88.70
8	Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah	9,339,590,087	9,015,485,685	96.53
9	Terwujudnya Peran Pemerintah dan Struktur Sosial dalam Pengurangan Penyakit Masyarakat	9,690,292,686	8,560,935,499	88.35
10	Meningkatnya Keberdayaan Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	11,831,081,978	9,531,368,180	80.56
TOTAL		983,666,837,209	933,059,271,935	94.86

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk menunjang pencapaian 10 (sepuluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2020 sebesar Rp983.666.837.209,- terealisasi sebesar Rp933.059.271.935,- atau 94,86%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 11 (sebelas) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.607.565.274,- atau 5,14%.





BAB 3

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020**

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dasar hukum pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah Peraturan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan TA 2020 dilaksanakan dalam bentuk program PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lakitan.
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Adapun target pelaksanaan tugas pembantuan adalah terlaksananya pembangunan Pasar Rakyat Lakitan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.570.425.462 (86%) dari nilai anggaran dengan realisasi fisik 100%.



Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Perdagangan RI	Peraturan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020	1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 2. Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Kapasitas Logistik 3. Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lakitan	Kecamatan Lengayang I	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Rp.3.000.000.000	Rp. 2.570.425.462	86 %	1 Unit Pasar Lakitan	100%	



B. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.010.930.000,00 dengan realisasi Rp. 1.972.981.000,00 (98,11%)

1. Target Kinerja

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - tersedianya benih padi inbrida seluas 1944 Ha
 - tersedianya benih jagung seluas 1925 Ha
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 600 Ha
 - terlaksananya pembangunan irigasi perpompaan besar wilayah barat sebanyak 3 unit
 - Fasilitasi pembiayaan pertanian
 - 1) Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) selama 1 tahun
 - 2) Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) selama 1 tahun

2. Realisasi

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - tersalurnya benih padi inbrida sebanyak 48.600 Kg pada kelompok tani se Kab. Pessel
 - tersalurnya benih jagung sebanyak 28.875 Kg pada kelompok tani se Kab. Pessel
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - terehabnya jaringan irigasi tersier seluas 600 Ha di Kab. Pessel
 - terbangunnya irigasi perpompaan besar wilayah barat sebanyak 3 unit di Kab. Pessel
 - Fasilitasi pembiayaan pertanian
 - 1) Terfasilitasinya kegiatan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) selama 1 tahun
 - 2) Terfasilitasinya kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) selama 1 tahun



Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan Provinsi, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2020

NO	BIDANG URUS	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Bidang Pertanian	Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No: 218/HK.310/12/2019 Tentang: Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan TA. 2020	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pesisir Selatan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	717.380.000	682.016.000	95,07	1. 48.600 Kg be nihil padi inbrida 2. 28.875 Kg be nihil jagung		
2.	Bidang Pertanian	1. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No: 40/Kpts/RC.210/B/12/2019 Tentang: Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2020 2. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No: 42/Kpts/RC.210/B/12/2019 Tentang: Petunjuk	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pesisir Selatan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1.293.550.000	1.290.965.000	99,80	3 Unit 600 Ha		



		Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2020									
		3. Keputusan Menteri Pertanian RI No: 02/Kpts/SR.230/B/01/2020 Tentang Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usahatani Padi							Terfasilitasi selama 1 tahun		
		4. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No: 40/Kpts/RC.210/B/12/2019 Tentang: Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2020 Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) TA. 2020							Terfasilitasi selama 1 tahun		
		Total				2.010.930.000	1.972.981.000				

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan 2020



3. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a) Seringnya dilakukan revisi DIPA dan POK sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat; dan
- b) Standar biaya yang terdapat dalam POK tidak relevan dengan standar harga barang di Pesisir Selatan khususnya dan Sumatera Barat umumnya, seperti harga benih padi yang hanya Rp.10.000,00 per kg sedangkan harga benih di Sumatera Barat antara Rp.11.500,00 s/d 12.500,00 per kg.

4. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) Jika revisi DIPA dan POK telah di sahkan, sesegera mungkin didistribusikan ke Kabupaten/Kota; dan
- b) Disarankan kepada Kementerian Pertanian untuk menetapkan harga benih sesuai dengan harga di Sumatera Barat.





BAB 4

PENERAPAN DAN PENCAMPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap urusan wajib terkait pelayanan dasar disajikan berupa target indikator SPM, realisasi dan pencapaian SPM serta analisis pencapaiannya yang dikelompokkan berdasarkan SPM urusan wajib terkait pelayanan dasar.

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis pelayanan dasar

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan



urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Pendidikan Dasar terdiri atas:



- a. Sekolah Dasar, dan
- b. Sekolah Menengah Pertama.

3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target pencapaian SPM oleh Daerah

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai SPM Pendidikan selama kurun waktu tertentu bisa dilihat pada Tabel 1 berikut:

NO	Kelompok Usia	Capaian (%)	Target (%)	
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	4 tahun			
2	5-6 tahun	80,70%	90%	91%
3	7-12 tahun	98,97%	99,5%	99,7%
4	13-15 Tahun	98,77%	99,5%	99,7%

4.1.3 Realisasi

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan:

1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
 - a. Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan



- c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
 - a. Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas);
 - b. Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
 - c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
 - a. Menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - b. Menghitung jumlah anak usia 12 (duabelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
 - a. Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas);
 - b. Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
 - c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO	Kelompok Usia	Jumlah Anak	Sedang Bersekolah							Capaian (%)
			TK/RA/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs / Sederajat	SMA/SMK/ MA/ Sederajat	SLB	Kesetaraan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4 tahun									
2	5-6 tahun	18.592	12.329	2.670	-		5		15.004	80,70%
3	7-12 tahun	57.317	-	54.957	1.504		258	9	56.728	98,97%
4	13-15 Tahun	29.595	-	1.839	23.173	3.962	177	80	29.231	98,77%
5	16 - 18 Tahun	29.924	-	131	1.327	20.370	139	506	22.473	75,10%
	CAPAIAN (%)						100%	100%		

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah tahun 2020 yaitu pemberian Beasiswa bagi peserta didik miskin yaitu:

1. Beasiswa PIP sebesar Rp. 10.099.500.000,- bersumber dari APBN.
2. Beasiswa BAZNAS sebesar Rp. 1.080.900.000,- bersumber dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

4.1.5 Dukungan Personil

Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan penyelenggaraan tugas perbantuan, pejabat dan staf di Bidang PAUDNI, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi



Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah belum maksimalnya alokasi anggaran dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan. Hal ini dikarenakan SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan pada tahun 2018, sementara Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan pada tahun 2016. Solusinya adalah pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagai prioritas belanja daerah ditetapkan dalam Renstra yang baru pada tahun 2021-2025.

4.2 URUSAN WAJIB KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dinas Kesehatan; dan
2. Rumah Sakit Umum Daerah.

Penyelenggaraan urusan wajib tersebut akan diuraikan satu persatu berdasarkan Perangkat Daerah penyelenggara sebagai berikut:

4.2.a Dinas Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan terdiri dari 12 indikator :

1. Pelayanan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat



11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency virus)

4.2.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

NO	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Penerima Layanan Dasar	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10 T	Ibu Hamil	90%	84,75%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar	Ibu Bersalin	90%	86,78%
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar	Bayi baru lahir	90%	99,40%
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	Balita	65%	72,26%
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan standar.	Anak usia Pendidikan	100%	84,21%
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara usia 15 th s/d 59 th mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Warga negara usia 15 s/d 59 th	20%	21,18%
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 th ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Warga negara usia 60 th keatas	70%	70,75%
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan	Penderita Hipertensi	60%	24,52%



		pelayanan kesehatan sesuai standar			
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes	70%	87,67%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa berat	90%	97,67%
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi	Setiap orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang terduga tuberculosi (TBC)	100%	121,7%
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang dengan resiko terinfeksi HIV	50%	24,7%

4.2.3 Alokasi Anggaran

Tabel
Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan untuk Pembiayaan Kegiatan
Yang Mendukung SPM Kesehatan Tahun 2020

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran 2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	17,220,500,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak (Jaminan Persalinan)	1,073,333,000,00
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	17,220,500,00
4	Pelayanan Kesehatan balita	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	17,220,500,00



5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah (Prasekdam Usek)	1,817,750,00
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak menular (PTM)	85,706,277,00
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	7,593,000,00
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	85,706,277,00
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	85,706,277,00
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	32,690,903,00
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	363,237,687,00
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik	363,237,687,00

4.2.4 Dukungan Personil

Standar jumlah dan kualitas personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan :

1. Tenaga Kesehatan

- Dokter
- Perawat
- Bidan
- Tenaga Kesehatan Masyarakat

2. Tenaga Non Kesehatan



4.2.5 Permasalahan dan Solusi

Dari 12 indikator SPM Kesehatan, sudah ada 7 indikator SPM yang mencapai target bahkan ada yang melebihi target. Adapun Permasalahan yang ada pada Dinas Kesehatan dapat dilihat dari beberapa aspek :

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan,

Kondisi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas pada saat ini masih dalam kondisi kurang. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu dengan melibatkan tenaga honor dan sukarela yang ada di Puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan.

2. Sarana dan Prasarana Puskesmas

Dalam Permenkes 75 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 disebutkan Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Kondisi saat ini semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sudah ada Puskesmas, bahkan ada satu kecamatan yang punya 2 Puskesmas. Permasalahan yang ada saat ini ada beberapa wilayah yang jarak Puskesmas ke rumah penduduk yang lumayan jauh, tetapi hal ini di atasi dengan adanya Puskesmas Pembantu dan Poskesri yang menyebar pada setiap Nagari.

3. Penganggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM pada tahun 2020 ini seperti yang dapat dilihat pada table diatas terlihat masih rendah atau sedikit. Padahal biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut relative besar. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran pada Dinas Kesehatan yang disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19



4.2.b

Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein

NO	JENIS PELAYANAN	Uraian	STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
			STANDAR	2020	KETERANGAN			
No	JENIS PELAYANAN	URAIAN	STANDAR	TARGET	REALISASI	LOKASI ANGGARAN	DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Pelayanan Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani <i>live saving</i>	100%	100%	Sesuai standar, karena peralatan kegawatdaruratan tersedia dengan kondisi siap pakai			
		2. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	100%	95%	Realisasi : 90,74, Belum sesuai standar, karena masih ada staf yang tidak punya salah satu sertifikat yang disyaratkan, staf ini adalah staf yang baru. Hal ini perlu menjadi perhatian saat melakukan rotasi staf.			
		3. Ketersediaan tim penanganan bencana	1 Tim	1 Tim	Sesuai standar karena tim penanganan bencana sudah tersedia			
		4. Pemakaian PIN identitas petugas selama pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunnya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		5. Hand hygiene						
		Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			



	Sebelum melakukan tindakan aseptik	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	6. Jam buka 24 jam	24 jam	24 jam	Sesuai standar, pelayanan IGD dilaksanakan selama 24 jam			
	7. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	≤ 5 Mnt terlayani setelah pasien datang	≤ 3-5 Mnt	Rata-rata 2-4 menit, Sesuai standar, karena sesuai SPO setiap pasien yang datang respon time tidak boleh melebihi 5 menit dan setiap pasien ada perawat yang bertanggungjawab yang segera melaporkan bila ada pasien baru ke dokter jaga IGD			
	8. Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100%	Realisasi 100% Sesuai target pencapaian, karena tidak ada pasien yang harus membayar uang muka terlebih dahulu sebelum mendapatkan pelayanan			



		9. Kematian pasien di IGD	≤ 2 perseribu	$\leq 2/1000$	Realisasi 0,09 : Sesuai target pencapaian			
		10. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat/mati	100 %	100 %	sesuai standar			
		11. Kepuasan pelanggan IGD	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	Sesuai standar			
2	Pelayanan Rawat Jalan	1. Ketersediaan pelayanan sesuai dengan kelas RS	a.Klinik Anak b.Klink PD c.Klinik bedah d.Klinik Obsgyn	a. Klinik Anak b.Klink PD c.Klinik bedah d.Klinik Obsgyn	Sesuai standar dan untuk saat ini telah tersedia spesialis lain diluar 4 spesialis dasar, yaitu : Mata, THT, Neurologi, Jiwa, Paru, dan Jantung dan Bedah Syaraf			
		2. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100 % dokter Spesialis	100%	Sesuai standar , dengan telah tersedianya dokter spesialis lebih dari 1 orang dimasing-masing spesialisasi			
		3. Pemakaian PIN identitas petugas selama pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		4. Hand hygiene						
		Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			



		Sebelum melakukan tindakan aseptik	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Jam buka pelayanan sesuai ketentuan : 08.00-14.00 wib setiap hari kerja, kecuali Jum'at : 08.00-11.00 wib	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja kecuali Jum'at 08.00 s/d 11.00	100%	Sesuai standar			
		5. Waktu tunggu Rawat Jalan	≤ 60 menit	120 menit	Realisasi rata-rata 150 menit, walaupun ada beberapa spesialis yang rutin pelayanan mulai jam 08.00 atau jam 09.00 wib yaitu : 1. Klinik Paru 2. Klinik Neurologi			



					3. Klinik Bedah			
		6. a. Penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%	95%	Realisasi 56,88%, kemungkinan disebabkan oleh : - Faktor pasien dimana sputum tidak dapat didapatkan - Pemeriksaan sputum telah dilakukan dengan hasil negative, tetapi dari tanda gejala dan pemeriksaan radiologi pasien terdiagnosa TBC			
		b. Pasien rawat jalan TB yang dilayani dengan strategi DOTS	100%	100%	Realisasi 100%, dengan adanya Klinik Paru dan petugas DOTS			
		7. Ketersediaan pelayanan VCT (HIV), PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan)	Tersedia	Tersedia	Sesuai target pencapaian, karena mulai bulan Januari 2020 telah dibuka klinik PDP untuk pelayanan penderita HIV			
		8. Peresepan obat sesuai formularium	100%	95%	Realisasi 100%, karena setiap pengadaan obat selalu melalui usulan dokter spesialis yang berpedoman pada formularium rumah sakit			
		9. Pencatatan, pelaporan TBC di rumah sakit	100%	95%	Realisasi 100%, dengan adanya Klinik Paru dan petugas DOTS, dan petugas khusus pelaporan TBC			
		10. Kepuasan pelanggan di rawat jalan	≥ 90%	90%	- Belum sesuai target pencapaian, salah satunya kemungkinan disebabkan oleh ruang tunggu yang tidak dapat penampung pasien, sehingga banyak pasien tidak dapat tempat duduk dan mengeluhkan tidak nyaman - Pendingin ruangan juga tidak memadai, sehingga ruang tunggu terasa panas	-	-	-



					- Untuk petugas pendaftaran, walaupun belum mencapai angka 90%, namun sudah pada angka 81%			
3	Pelayanan Rawat Inap (Ranap)	1. Ketersediaan pelayanan sesuai kelas RS	a. Bedah b. Penyakit Dalam c. Bedah d. Kebidanan	a. Bedah b. Penyakit Dalam c. Bedah d. Kebidanan	Sesuai standar dan saat ini sudah tersedia rawat inap untuk pasien Neurologi, Paru dan Jantung			
		2. Pemberi pelayanan : dokter spesialis, dokter umum	Dokter spesialis Dokter umum Tenaga	100%	Untuk spesialis sudah sesuai pencapaian target 100%, dan setiap rawat inap telah mempunyai 1 (satu) orang dokter umum			
		3. Pemberi pelayanan : perawat minimal D3	Perawat Minimal D3	99%	Realisasi 99%, karena masih ada 2 orang staf perawat yang berpendidikan SPK, namun saat ini 1 (satu) orang sedang melanjutkan pendidikan			
		4. Tempat tidur dengan pengaman	100%	100%	Sesuai target pencapaian			
		5. Pengaman tempat tidur selalu terpasang pada pasien resiko jatuh (lansia, anak-anak, pasien penurunan kesadaran)	100%	90%	Realisasi 99%, karena masih ditemukan pada beberapa pasien resiko jatuh yang sedang ditunggu keluarga tidak terpasang pagar pengaman tempat tidur, namun tetap dipasangkan kembali dengan pemberian edukasi pada keluarga tentang pentingnya memasang pagar tempat tidur pada pasien resiko jatuh.			
		6. Kamar mandi dengan	100%	100%	Sesuai standar			



		pengaman pegangan						
		7. Dokter spesialis DPJP pasien rawat inap	100%	100%	Sesuai standar			
		8. Pemakaian PIN identitas petugas selama pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		9. Hand hygiene						
		Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Sebelum melakukan tindakan aseptik	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			



		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		10. Jam visite spesialis, sesuai ketentuan : 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	100%	Belum sesuai standar, karena masih ditemukan ada dokter yang melakukan kunjungan (visite) diatas jam 14.00 wib dan ada dokter spesialis yang tidak tiap hari (hari kerja) melakukan visite, namun dokter yang bersangkutan telah diingatkan kembali tentang jam visite			
		11. Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	95%	Realisasi 100%, karena telah ada petugas khusus TB DOTS			
		12. Pencatatan dan pelaporan TB	100%	95%	Realisasi 100%, karena telah ada petugas khusus TB DOTS			
		13. Kejadian infeksi pasca operasi : $\leq 1.5\%$	$\leq 1.5\%$	$\leq 1.5\%$	Realisasi 0,15 %, karena telah dilaksanakan SPO PPI dan dilakukan pengawasan oleh IPCN			
		14. Angka kejadian HAIs : $\leq 9\%$	$\leq 9\%$	$\leq 9\%$	Realisasi : VAP : 0, HAP : 0, IADP : 0, ISK : 0, Phelebitis : 0,26%			
		15. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	100%	100 %	Sesuai standar			
		16. Kematian pasien ≤ 48 jam	$\leq 25/1000$	$\leq 25/1000$ $\leq 25/1000$	Realisasi 22,54/1000			



		Kematian pasien > 48 jam			Realisasi 37,84/1000, tidak sesuai target pencapaian, kemungkinan disebabkan kondisi pasien yang dirawat sudah dalam fase terminal karena rumah sakit painan merupakan rumah sakit rawatan tingkat lanjut			
		17. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh	≤5%	≤5%	Realisasi 7,05, angka pulang paksa tertinggi ada pada ruang Perinatologi, Bedah dan Interne kemungkinan disebabkan oleh : - Masa rawatan bayi yang lama membuat keluarga jenuh menunggu bayi, akhirnya minta pulang walaupun bayi belum boleh dibawa pulang - Keinginan pasien pulang karena pada beberapa kondisi pasien sudah tidak mau lagi dirawat, atau tidak punya biaya untuk keluarga yang menunggu. - Adanya pandemi COVID-19, saat pasien menjadi PDP (Pasien Dalam Pengawasan) keluarga menolak dan membawa pasien pulang			
		18. Kepuasan pelanggan	≥90% (target 2019 : 80%)	76.10% (Hasil Survey tahun 2019)	Belum sesuai standar, kemungkinan disebabkan : - Aturan-aturan yang berlaku dalam rangka memenuhi standar akreditasi, seperti harus adanya ketentuan jam kunjungan, pengamanan pasien, sehingga diberlakukan pembatasan jumlah penunggu pasien dan pembatasan jam berkunjung - Hampir 90% pasien adalah peserta jaminan kesehatan (BPJS), kelengkapan syarat administrasi BPJS juga menimbulkan kesan			



					pasien dipersulit terutama pada pasien-pasien yang status kepersertaannya bermasalah seperti nuggak pembayaran dan lain-lain			
4	Pelayanan Kamar Operasi	1. Ketersediaan tim bedah (sesuai dengan RS Tipe C) - Dokter Operator - Dokter Anastesi - Asisten - Instrumen - Runner	100%	90%	Realisasi 90%, Sesuai target pencapaian, dengan adanya penambahan 1 (satu) orang dokter Anastesi, sehingga jumlah dokter anastesi saat ini 2 (dua) orang.			
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi (sesuai dengan RS Tipe C)	100%	100%	Sesuai standar			
		3. Kemampuan melakukan tindakan operasi (sesuai dengan RS Tipe C)	100%	100%	Sesuai standar			
		4. Hand hygiene						
		5. Sebelum kontak dengan pasien	100%	100%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			



	6. Sebelum melakukan tindakan aseptik	100%	100%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	7. Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	100%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	8. Setelah kontak dengan pasien	100%	100%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	9. Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	100%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	10. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	≤ 2 hari	Realisasi 1 hari, dengan jumlah dokter bedah dan spesialis Anastesi yang sudah memadai			
	11. Pelaksanaan operasi diawali dengan sign in	100%	100%	Sesuai standar			
	12. Pelaksanaan operasi diawali dengan time in	100%	100%	Sesuai standar			
	13. Pelaksanaan operasi ditutup dengan sign out	100%	100%	Sesuai standar			



	14. Kejadian kematian di meja operasi	≤1%	0%	Sesuai standar			
	15. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	Sesuai standar, karena tidak ada kejadian operasi salah sisi, sesuai dengan SPO pasien yang akan menjalani operasi harus dilakukan penandaan lokasi operasi			
	16. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	Sesuai standar, dengan diberlakukannya SPO identifikasi pasien, yaitu setiap pasien yang dirawat dipasang gelang identitas, maka kejadian operasi salah orang dapat dihindari			
	17. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	Sesuai standar, dengan diberlakukannya SPO tim in sebelum tindakan operasi dimulai, maka kejadian salah tindakan pada operasi dapat dihindari			
	18. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	Sesuai standar, dengan diberlakukannya SPO tim out setelah tindakan operasi, yaitu menghitung semua peralatan dan bahan yang dipakai selama kegiatan operasi selesai, maka kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi dapat dihindari			
	19. Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6%	0%	Sesuai standar, karena sebelum dilakukan operasi dilakukan penimbangan Berat Badan pasien untuk menentukan dosis obat yang akan diberikan dan selama dalam masa pembedahan dan pembiusan dilakukan monitoring dan pengawasan oleh dokter anastesi ataupun perawat anastesi			
	20. Kepuasan pelanggan	≥80%	80%	Belum sesuai target pencapaian			



5	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	1. Pemberi pelayanan persalinan normal : Dokter Spesialis/Dokter umum (terlatih Asuhan Persalinan Normal)/Bidan	100%	100%	Sesuai standar, karena Sp.OG berjumlah 3 orang, dokter umum sudah mendapat pelatihan APN dan petugas yang dinas 100% bidan dengan pendidikan D.III Kebidanan			
		2. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit :Tim PONEK yang terlatih	100%	100%	Sesuai standar, karena : - Pemberi pelayanan penyulit (tim PONEK) adalah : dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat terlatih - Tim PONEK sudah mendapatkan pelatihan PONEK			
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi						
		a. Dokter Sp.OG	100%	100%	Sesuai standar, karena hanya dokter spesialis obstetry ginekology yang boleh melakukan tindakan operasi			
		b. Dokter Anak	100%	0%	Belum sesuai standar			
		c. Dokter Anastesi	100%	90%	Realisasi 63,60%			
		4. Kemampuan menangani BBLR 1.500-2.500 gr	100%	95%	Realisasi 83,91, Belum sesuai target pencapaian, kemungkinan disebabkan oleh : bayi sudah dalam kondisi berat			



		5. Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia	100%	95%	Realisasi 76,47% Belum sesuai target pencapaian, kemungkinan disebabkan bayi dalam kondisi asfiksia berat			
		6. Pemakaian Pin Identitas Petugas selama Pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunnya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		7. Hand Hygiene				8.	9.	10.
		Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Sebelum melakukan tindakan aseptik	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap			



					protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		10. Pertolongan persalinan melalui Seksio Cesaria	$\leq 20\%$	25%	Realisasi 20,57%, kemungkinan disebabkan oleh : - Keberadaan Bidan/Puskesmas saat ini sudah mencukupi dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga ibu-ibu hamil tanpa penyulit tidak akan datang ke rumah sakit untuk melahirkan. - Dalam era BPJS dan Program Jampersal, pasien melahirkan yang boleh dirujuk ke RS Painan adalah pasien dengan kondisi penyulit dan tidak bisa dilakukan persalinan oleh Bidan, walaupun pasien sebelumnya telah melakukan pemeriksaan kehamilan /ANC (Ante Natala Care) di RSUD. Painan			
		11. Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SPOG atau SPB, atau dokter umum terlatih	100%	100%	Sesuai standar, karena setiap tindakan kontrasepsi mantap hanya dilakukan oleh dokter spesialis obstetri ginekology			
		12. Konseling peserta KB mantap oleh Bidan terlatih	100%	100%	Sesuai standar, setiap pasien KB mantap mendapat konseling			
		13. Kejadian kematian Ibu karena Persalinan						
		Pendarahan	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	Realisasi 0			
		Preeklamsi	$\leq 30\%$	$\leq 30\%$	Realisasi 0			
		Sepsis	$\leq 0,2\%$	$\leq 0,2\%$	Realisasi 0			



		14. Kepuasan pelanggan	≥80%	≥80%	Belum sesuai target pencapaian, kemungkinan disebabkan masih ada pasien yang tidak puas terhadap pelayanan petugas dan fasilitas yang tersedia, ditambah prosedur administrasi kepesertaan BPJS yang harus dipenuhi oleh pasien. Angka kepuasan terhadap dokter 78,86 dan perawat 77,32			
6	Pelayanan ICU (Intensive care unit)	1. Pemberi Pelayanan Intensif						
		2. Dokter spesialis anastesi	100%	100%	Realisasi 100%, sehubungan dengan adanya penambahan 1 (satu) orang dokter spesialis Anastesi			
		3. D3 dengan sertifikasi ICU	100%	80%	Realisasi 0%, pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan resmi secara magang selama 4-6 bulan dan ini membutuhkan biaya yang cukup besar			Membutuhkan biaya ± Rp.30.000.000/orang
		4. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU (sesuai dengan tipe C)	100%	95%	Realisasi 90% Belum sesuai dengan target pencapaian, sehubungan belum tersedia fasilitas sesuai kebutuhan salah satunya alat rontgen Portable yang dibutuhkan oleh pasien dengan penurunan kesadaran			
		5. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator	100%	100%	Realisasi 100%			
		6. Pemakaian Pin Identitas Petugas	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunnya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan			



		selama Pelayanan			standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		7. Hand Hygiene						
		Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Sebelum melakukan tindakan aseptik	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		5. Rata- rata pasien yang kembali perawatan Intensive Care Unit (ICU)	≤ 3%	≤ 3%	Realisasi 0			



		dengan kasus yang sama < 72 jam						
		6. Kejadian Infeksi HAIs di ICU	≤ 21%	≤ 21%	Realisasi 0			
		7. Kepuasan Pelanggan	≥70%	≥70%	Sesuai target pencapaian			
7.	Pelayanan Radiologi	1. Pemberi Pelayanan Radiologi : Dokter spesialis Radiologi	100%	50%	Realisasi 15%, sehubungan dokter spesialis radiologi masih referral 1 kali seminggu			Mengirimkan peserta pendidikan spesialis Radiologi atau dilakukan Rekrutmen lulusan spesialis Radiologi
		2. Pemberi Pelayanan Radiologi: Radiografer	100%	100%	Sesuai standar			
		3. Pelaksana expertisi hasil pemeriksaan rontgen adalah Dokter Sp. Rad	100%	60%	Realisasi 6,56%, sehubungan dokter spesialis radiologi masih referral 1 kali seminggu			
		3. Pemakaian Pin Identitas Petugas selama Pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunnya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		4. Hand Hygiene						



		Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Sebelum melakukan tindakan	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		5. Waktu tunggu hasil pelayanan foto torax	≤ 3 jam	≤ 3 jam	Realisasi 15 menit			
		6. Tidak ada kesalahan pemberian label	100%	0	Realisasi 0			
		7. Kerusakan foto	≤ 2%	≤ 2%	Realisasi 1,1%			
		8. Kepuasan Pelanggan	≥80%	-	Belum dilakukan survey			



8.	Pelayanan Laboratorium	1. Pemberi Pelayanan di Laboratorium : Dokter Patologi Klinik	100%	100%	Sesuai target pencapaian			
		2. Pemberi Pelayanan di Laboratorium : D3 Analis Kesehatan	100%	98%	Belum sesuai target pencapaian, karena masih ada 2 (dua) orang petugas dengan latar pendidikan D.I Analis			
		3. Pelaksana expertisi hasil pemeriksaan Laboratorium adalah Dokter Sp. PK	100%	100%	Sesuai standar, sehubungan dengan dokter spesialis Patologi Klinik menetap sudah tersedia			
		4. Ketersediaan Fasilitas dan peralatan Laboratorium	100%	100%	Realisasi 90%, karena masih ditemukan beberapa kasus dilakukan pemeriksaan ke luar sehubungan reagen yang tidak tersedia.			
		5. Pemakaian Pin Identitas petugas selama Pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		6. Hand Hygiene						
		Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			



	Sebelum melakukan tindakan aseptik	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	7. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium rutin dan kimia darah	≤ 140 menit	118 menit	Realisasi 45,76			
	8. Tidak adanya kejadian tertukar, spesimen pemeriksaan laboratorium	100%	100%	Realisasi 99,99%, kemungkinan karena kurang ketelitian dari petugas dan jumlah pasien yang dilayani tidak sebanding dengan petugas yang ada			
	9. Kemampuan pemeriksa HIV	Tersedia	Tersedia	Sesuai standar			



		AIDS : tersedianya tenaga, peralatan dan reagen						
		10. Kemampuan mikroskopis TB Paru	Tersedia	Tersedia	Sesuai standar			
		11. Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	0	Realisasi 99,99%, kemungkinan karena kurang ketelitian dari petugas dan jumlah pasien yang dilayani tidak sebanding dengan petugas yang ada			
		12. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	100%	89,9%	Realisasi 83,88% - Kemungkinan disebabkan oleh reagen kreatinin mudah terkontaminasi bila terlalu lama di luar lemari pendingin dan reagen ini tidak bisa didalam alat lebih dari 15 hari. - Rentang nilai kontrol kreatinin sangat pendek. - Eritrosit dan MCH tidak sesuai dengan baku mutu eksternal, kemungkinan suhu pada saat pengiriman sampel tidak sesuai dan jangka waktu yang terlalu lama karena jarak antara Pesisir Selatan dan Pelembang			Tindak lanjut : - Pemakaian 1 botol reagen kreatinin harus dipisahkan untuk menghindari terlalu lamanya reagen kreatinin diluar lemari pendingin atau alat Pemantapan mutu internal untuk parameter kreatini dilaksanakan terpisah



		13. Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	80%	Belum sesuai target pencapaian, kemungkinan masih disebabkan oleh sikap petugas			
9.	Pelayanan Rehabilitasi Medik	1. Pemberi pelayanan Rehabilitasi medik : Dokter spesialis Rehab Medik	100%	0%	Realisasi 0%, sehubungan dokter spesialis Rehabilitasi Medis belum ada di RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan			Mengirimkan peserta pendidikan spesialis Rehabilitasi Medis atau dilakukan Rekrutmen lulusan spesialis Rehabilitasi Medis
		2. Pemberi pelayanan Rehabilitasi medik : D.III Fisioterapi	100%	100%	Sesuai standar, karena pelayanan dilakukan oleh D.III Fisioterapi			
		3. Ketersediaan alat rehab medik	100%	95%	Sesuai standar, karena telah tersedia alat rehab medik sesuai dengan kemampuan pelayanan sebagai RS tipe C			
		4. Pemakaian Pin Identitas petugas selama Pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunnya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		5. Hand Hygiene						
		Sebelum kontak dengan pasien	100%	85%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-19, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			



		Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		6. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehab yang direncanakan	≤ 50%	≤ 50%	Realisasi 6%			
		7. Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehab medik	100%	100%	Realisasi 100%			
		8. Kepuasan pelanggan	≥80%	70%	Belum sesuai target pencapaian, namun terget 70% tahun 2019 telah tercapai			
10.	Pelayanan Farmasi	1. Pemberi pelayanan farmasi : Apoteker	100%	100%	Sesuai target pencapaian			
		2. Pemberi pelayanan farmasi : D.III Farmasi	100%	90	Realisasi 84%, karena dari 25 orang staf farmasi, sebanyak 4 orang masih dengan pendidikan SMF			Kendala : 3 orang akan memasuki masa pensiun 1 orang akan dimotivasi untuk



								melanjutkan pendidikan
		3. Ketersediaan fasilitasn dan peralatan pelayanan farmasi	100%	100%	Sesuai target pencapaian			
		4. Ketersediaan formularium	Tersedia dan update paling lama 3 tahun	Tersedia	Sesuai standar			
		5. Pemakaian Pin Identitas petugas selama pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		6. Hand Hygiene						
		Sebelum kontak dengan pasien	100%	85%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	100%	100%	Sesuai target pencapaian (Target 2019 adalah : 80%), sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap			



					protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		7. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	≤ 30 menit	Realisasi 15 menit			
		8. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	±60 menit	Realisasi 60 menit			
		9. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	Realisasi 99,99%, kemungkinan disebabkan oleh kurang ketelitian dari petugas dan jumlah petugas tidak sesuai dengan jumlah pasien yang dilayani			
		10. Kepuasan Pelanggan	≥80%	≥75%	Belum sesuai target pencapaian			
11.	Pelayanan Gizi	1. Pemberi pelayanan Gizi : D. III Gizi	100%	100%	Sesuai standar			
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan Gizi	100%	90%	Realisasi 95%, walaupun fasilitas AC belum memadai			
		3. Pemakaian Pin Identitas petugas selama pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunnya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		4. Hand Hygiene						



	Sebelum kontak dengan pasien	45%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	Setelah kontak dengan pasien	80%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	Setelah kontak dengan lingkungan pasien	65%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	5. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥90%	100%	Realisasi 100%, karena system pengaturan kerja dan pembagian tugas yang jelas penyiapan makanan bagi pasien dapat tepat waktu			
	6. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien ≤20 %	≤ 20%	≤ 20%	Realisasi 70,18% makanan yang dimakan habis dan masih ditemukan 29,82% makanan yang tidak termakan oleh pasien, kemungkinan disebabkan oleh selera makan pasien yang berkurang karena sakit.			
	7. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	100%	Realisasi 100%			
	8. Kepuasan pelanggan	≥80%	≥80%	Belum sesuai target pencapaian			



12.	Pelayanan Transfusi Darah	1. Tenaga penyedia pelayanan Unit Transfusi Darah	100%	90%	Realisasi 16,67% (2 dari 12 orang) yang mendapat pelatihan tentang Transfusi Darah. Anggaran yang tidak memadai dan Pandemi COVID-19 menyebabkan staf tidak dapat mengikuti pelatihan tentang Transfusi Darah			Membutuhkan biaya ± Rp.6.000.000/orang
		2. Ketersedian fasilitas dan peralatan UTD	100%	95%	Realisasi 90%, sehubungan masih ada alat untuk pemutar darah yang belum tersedia			
		3. Pemakaian Pin Identitas Petugas selama Pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunnya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		4. Hand Hygiene						
		Sebelum kontak dengan pasien	45%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Sebelum melakukan tindakan aseptik	75%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah terkena cairan tubuh pasien	90%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	80%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap			



					protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	65%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		5. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	Realisasi 93,17, karena akibat pandemic COVID-2019 kegiatan donor darah masal yang menjadi kalender rutin tiap 3 bulan tidak dapat dilakukan			Menyusun kembali kalender rutin untuk donor darah masal tiap 2 bulan dan membuat surat ke instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk permintaan donor
		6. Kejadian reaksi transfusi : $\leq 0,01\%$	$\leq 0,01\%$	$\leq 0,01\%$	Realisasi 0,02%, kemungkinan disebabkan oleh reaksi tubuh pasien terhadap darah yang masuk			
		7. Kepuasan Pelanggan	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	Belum sesuai target pencapaian			
13.	Pelayanan Pasien Keluarga Miskin	1. Ketersedian pelayanan untuk keluarga miskin sesuai kelas III	Tersedia	Tersedia	Sesuai standar, karena tersedia anggaran yang ditujukan untuk pasien miskin dengan fasilitas rawatan pada ruang kelas III serta adanya ketentuan persyaratan			
		2. Adanya kebijakan rumah sakit untuk pelayanan keluarga miskin	Tersedia	Tersedia	Sesuai standar, kebijakan dalam bentuk SK direktur			



		3. Pemakaian Pin Identitas Petugas selama Pelayanan	100%	100%	Sesuai standar pencapaian			
		4. Waktu tunggu verifikasi kepersetaan pasien keluarga miskin	≤ 15 menit	10-15 menit	Sesuai standar			
		5. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	100%	Realisasi 80%, karena bagi pasien yang membawa surat keterangan miskin masih dikenakan biaya tambahan, sebab anggaran yang disediakan tidak mencukup untuk membantu jumlah pasien miskin yang berobat			
		6. Pasien keluarga miskin yang dilayani	100%	100%	Sesuai standar			
		7. Kepuasan Pelanggan	≥80%	≥80%	Belum sesuai standar, kemungkinan disebabkan : - Aturan-aturan yang berlaku dalam rangka memenuhi standar akreditasi, seperti harus adanya ketentuan jam kunjungan, pengamanan pasien, sehingga diberlakukan pembatasan jumlah penunggu pasien dan pembatasan jam berkunjung - Tidak dipenuhi seluruh biaya pengobatan dan perawatan (masih ada biaya tambahan yang ditagih) juga menjadi salah satu penyebab			
14.	Pelayanan Rekam Medik	1. Pemberian Pelayanan Medik ; D. III Rekam Medik	100%	90%	Realisasi 69,23 Belum sesuai target pencapaian, dari 13 orang petugas hanya 9 orang dengan latar belakang pendidikan D.III Rekam Medis			



		2. Kelengkapan fasilitas dan peralatan	100%	95%	Realisasi 95%, karena ada beberapa peralatan yang belum tersedia, seperti tangga, termometer suhu ruangan			
		3. Pemakaian Pin Identitas Petugas selama Pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		4. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik Pelayanan rawat jalan ≤10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	Realisasi 15-20 menit, sehubungan dengan ruangan penyimpanan tidak sesuai kapasitas, sehingga ada rekam medis yang tidak ditempatkan dalam rak penyimpanan, namun telah diupayakan melalui proses penyusutan berkas rekam medis			
		5. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat inap ≤ 15 Menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	Realisasi 10-15 menit			
		6. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	95%	Realisasi 65,94%, karena dokter yang tidak patuh dalam kecepatan pengisian rekam medis			
		7. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	100%	Realisasi 100%, karena setiap pasien yang akan menjalani tindakan medis harus terlebih dahulu menandatangani informed consent. Serah terima pasien di kamar operasi salah satu yang harus diserahkan dengan blangko check list antar			



					petugas ruangan dengan petugas kamar operasi adalah informed concent			
		8. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	Belum sesuai target pencapaian, kemungkinan disebabkan keterlambatan penyediaan rekam medis			
15	Penyehatan Lingkungan	1. Adanya penanggungjawab pengelola limbah rumah sakit : adanya SK direktur	Tersedia	Tersedia	Sesuai standar, karena ada instalasi sebagai penanggungjawab yaitu IPLRS			
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit : padat, cair	Tersedia	Tersedia	Sesuai standar, dengan kerjasama pihak ketiga			
		3. Ketepatan pelaksanaan periode pemeriksaan sampel	100%	100%	Sesuai standar			
		4. Pengelolaan limbah cair	100%	100%	Realisasi 100%, sehubungan sudah adanya insenerator dan petugas khusus untuk pengolahan limbah berbahaya			
		5. Pengelolaan limbah padat	100%	100%	Realisasi 100%, Sesuai standar, dengan kerjasama pihak ketiga			
		Baku mutu limbah cair						
		BOD : < 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	2,17 mg/l			
		COD : < 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 9,91 mg/l			



		TSS : < 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	7,75			
		PH : 6-9	6-9	6-9	7,64			
		6. Pantauan dampak pencemaran lingkungan	100%	100%	Sesuai standar , dengan diterapkannya pengendalian limbah dan pengawasan lingkungan oleh IPLRS			
16	Administrasi dan Manajemen	1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi	≥ 90 %	≥ 90 %	Realisasi 100%			
		2. Adanya peraturan internal rumah sakit	Ada	Ada	Sesuai standar			
		3. Adanya peraturan karyawan rumah sakit	Ada	Ada	Sesuai standar			
		4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada	Sesuai standar			
		5. Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit	Ada	Ada	Sesuai standar			
		6. Adanya perencanaan pengembangan SDM	Ada	Ada	Sesuai standar			
		7. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien	≤ 2 jam	30 menit	Realisasi 30 menit sehubungan dengan semua tindakan langsung di input pada SIMRS yang link kebagian kasir			



		Rawat Inap $\leq$ 2 Jam						
		8. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat manajemen	100%	80%	Realisasi 70%, beberapa hasil pertemuan penyelesaiannya terkait dengan anggaran			
		9. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	Sesuai standar, periode April dan Oktober			
		10. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	Sesuai standar			
		11. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	100 %	Sesuai standar			
		12. Adanya rencana pengembangan SDM	Tersedia	Tersedia	Sesuai standar			
		13. Cost Recovery	≥ 60 %	100%	Realisasi 62.04%,			
		14. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	Sesuai standar			
		15. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	≥ 60 %	≥ 60 %	Realisasi 8,36%, dampak COVID-19 seluruh bentuk pertemuan yang melibatkan banyak peserta ditiadakan			



		16. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	Realisasi 100%			
17.	Ambulance / Mobil Jenazah	1. Ketersediaan pelayanan ambulance dan mobil jenazah	24 jam	24 Jam	Sesuai standar			
		2. Penyedia pelayanan ambulance dan mobil jenazah : Sopir ambulance terlatih	100%	90%	Realisasi 100%, dari 6 (enam) orang sopir ambulance semuanya telah mendapat pelatihan ambulance dan mobil jenazah			
		3. Ketersediaan mobil ambulance	100%	100%	Realisasi 100%, karena saat ini RSUD. Painan telah memiliki 4 mobil ambulance dan 1 Ambulance milik Koperasi karyawan RSUD Painan			
		4. Ketersediaan mobil jenazah	100%	100%	Realisasi 25%, karena mobil jenazah hanya tersedia 1 unit, sehingga jenazah sering masih dibawa dengan ambulance			
		5. Pemakaian Pin identitas petugas selama pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		6. Hand hygiene						



		Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		7. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/mobil jenazah di rumah sakit	≤ 30 Menit	10-15 Menit	Sesuai standar			
		8. Waktu tanggap pelayanan pelayanan ambulance kepada masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 Menit	10-15 Menit	Sesuai standar ,			

		9. Tidak terjadinya kecelakaan ambulance/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian	100 %	100%	Sesuai standar			
		10. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	Belum dilakukan survey			
18	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	1. Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah	24 jam	24 jam	Realisasi 24 jam, dan telah dilakukan penambahan 1 (satu) orang petugas lagi, dan saat ini petugas pemulasaran jenazah juga menyelenggarakan Jenazah Pasien COVID-19			
		2. Ketersediaan fasilitas kamar jenazah	100%	80%	Realisasi 100%, telah tersedia Lemari Pendingin bagi jenazah yang dititip sementara			
		3. Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah	Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	Sesuai standar			
		4. Pemakaian Pin identitas petugas selama pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunnya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		5. Hand hygiene						
		Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			



		Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		6. Waktu tanggap pelayanan pemulasaran	≤ 2 jam	≥ 2 jam	Realisasi 10-15 menit			
		7. Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution	100%	100%	Sesuai standar			
		8. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah	100%	100%	Realisasi 100%			
		9. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %				
19	Laundry	1. Ketersediaan pelayanan laundry	Tersedia	Tersedia	Sesuai standar			
		2. Adanya penanggungjawab pelayanan laundry	Ada SK direktur	Ada SK direktur	Sesuai standar			



	3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry	100%	95%	Realisasi 90%, karena masih ada beberapa fasilitas lagi yang belum tersedia seperti timbangan kain, mesin setrika, sehingga setrika masih dilakukan dengan setrika rumah tangga			
	4. Waktu tanggap pelayanan laundry : maksimal 30 menit	30 menit	30 s/d 90 menit	Belum sesuai target pencapaian, system laundry yang belum memenuhi persyaratan sebuah laundry, menyebabkan kebutuhan linen belum dapat dipenuhi. Ada beberapa kondisi pencucian dengan cara manual, seperti dalam keadaan mesin cuci rusak			
	5. Hand hygiene						
	Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	Setelah terkena cairan tubuh pasien yang nempel pada laken	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
	Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			



		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		6. Ketepatan pengelolaan linen infeksius	100 %	100%	Sesuai standar, karena linen infeksius telah langsung dipisah oleh perawat, dan cara pencucian dilakukan sesuai dengan SPO pengelolaan linen infeksius			
		7. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %	97%	Realisasi 90% masih sering terjadi kehilangan linen, walaupun setiap serah terima linen ini sudah dengan bukti serah terima antara petugas laundry dengan petugas ruangan.			
		8. Ketersediaan linen : 2,5 – 3 set x jumlah TT	100%	90%	Realisasi 65%, karena belum terakomodir oleh anggaran			
		9. Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi	100%	100%	Sesuai target pencapaian, karena belum terakomodir oleh anggaran			
		10. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	Realisasi 76,10%, Belum sesuai target pencapaian			
20	Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1. Adanya penanggungjawab IPSRS	Ada SK direktur	Ada SK direktur	Sesuai standar			
		2. Ketersediaan bengkel kerja	Tersedia	Tersedia	Sesuai target pencapaian,			



		3. Waktu tanggap kecepatan menanggapi kerusakan alat : 15 menit	≥80%	79%	Realisasi 93% untuk alat medis, dan 45% untuk alat non medis, karena petugas yang tidak segera datang saat ada laporan kerusakan alat			
		4. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan	100%	90%	Realisasi 91% untuk alat medis, dan 30% untuk alat non medis			
		5. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%	95 %	Realisasi 30%, dampak pandemic menyebabkan tim kalibrasi tidak bisa datang sesuai permintaan (jadwal) kalibrasi RS Painan			
		6. Peralatan laboratorium (dan alat ukur lain), yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	95 %	Realisasi 81,39%, anggaran belum dapat mengakomodir biaya kalibrasi semua alat			
		7. Ketersediaan alat siap pakai	100%	100%	Realisasi 80%, karena pemeliharaan yang tidak tepat waktu			
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	1. Tersedianya Tim PPI yang terlatih	≥ 75 %	100%	Sesuai target pencapaian, semua anggota telah mengikuti pelatihan PPI			
		2. Ketersediaan APD disetiap instalasi	≥ 75 %	100%	Sesuai standar			



		3. Rencana program PPI	Ada	Ada	Sesuai standar			
		4. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana	100%	90%	Realisasi 100%,			
		5. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100%	90%	Realisasi 100%, dampak pandemic COVID-19 terjadi kepatuhan dalam penggunaan APD			
		6. Kegiatan Pencatatan Pelaporan Infeksi HAIs di RS	75 %	100%	Realisasi 100% karena telah dilakukan pemantauan infeksi nasokomial disemua instalasi rawat inap terhadap indikator, infeksi jarum infus, infeksi luka operasi, infeksi luka tirah baring dan infeksi tali pusat, data telah dianalisa setiap 3 bulan			
		7. Terpantaunya kejadian HAIs di rumah sakit	100 %	100%	Sesuai target pencapaian, setiap kejadian HAIs terpantau oleh petugas PPI dan IPCN			
22	Pelayanan Keamanan	1. Jam tugas satuan pengamanan : 24 jam	100%	100%	Sesuai standar			
		2. Petugas keamanan bersertifikat pengamanan	100%	100%	Sesuai standar			
		3. Sistem pengamanan	Ada	Ada	Sesuai standar			



		4. Pemakaian Pin identitas petugas selama pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		5. Petugas keamanan melakukan keliling rumah sakit : setiap jam	100%	90%	Realisasi 75%, karena jumlah petugas keamanan belum memadai sesuai dengan area RS			
		6. Evaluasi terhadap system pengamanan	100%	95%	Realisasi 100%, karena telah ditetapkan penanggungjawab keamanan yang mengkoordinir dan melakukan evaluasi terhadap system pengamanan			
		7. Waktu Tanggap Pelayanan Keamanan	≤ 10 menit	15-20 menit	Realisasi 15-20 menit, kemungkinan disebabkan oleh : - Masih kurang jumlah personil keamanan - Kinerja petugas keamanan yang masih rendah			
		8. Kegiatan Pencatatan Pelaporan Jaga	100%	100%	Sesuai target pencapaian			
		9. Tidak adanya kejadian kehilangan barang (pasien, pengunjung, karyawan)	100%	95%	Realisasi 100%.			



		10. Kegiatan pencatatan dan pelaporan kehilangan	100%	100%	Sesuai standar			
		11. Kepuasan pasien	≥ 90 %	≥ 90 %	Realisasi 76,10%, Belum sesuai target pencapaian			
23	Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	1. Adanya penanggungjawab PKRS	Ada SK direktur	Ada SK direktur	Sesuai standar			
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan PKRS	100%	90%	Realisasi 80%, masih ada beberapa fasilitas PKRS yang belum tersedia, seperti ruang pameran dan ruang kerja			Kendala : area RS Painan tidak memadai lagi bagi penambahan ruangan baru, sehingga kegiatan PKRS dilakukan melalui metode lain, seperti spanduk dan papan informasi
		3. Pemakaian Pin identitas petugas selama pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		4. Pemberian informasi dan edukasi minimal 3 kali 1 hari	100%	100%	Realisasi 100%, karena pemberian informasi dan edukasi selain langsung juga disampaikan melalui sound system			



					yang dapat didengar sampai area pelayanan			
		5. Adanya pojok informasi di rawat jalan dan setiap ruang rawat	100%	100%	Realisasi 70%, sehubungan karena terbatasnya area			Kendala : area RS Painan tidak memadai lagi bagi penambahan ruangan baru, sehingga kegiatan PKRS dilakukan melalui metode lain, seperti spanduk dan papan informasi
		6. Terlaksananya pemberian informasi hak dan kewajiban pasien	≥ 80 %	100%	Realisasi 100%, karena selain dijelaskan oleh petugas admisi dan petugas rawat inap pada pasien yang dirawat, banner tentang hak dan kewajiban pasien juga dipajang pada beberapa tempat yang mudah diakses oleh pasien/keluarga			
		7. Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah sakit - Membuang sampah pada tempatnya - Cuci Tangan	≥ 80 %	≥ 80 %	Realisasi 99%, karena setiap petugas keamanan, petugas PKRS dan karyawan rumah sakit mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi perilaku pasien dan pengunjung di RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan			



		- Tidak membuang dahak sembarangan - Tidak merokok dilingkungan rumah sakit						
		8. Kepuasan pasien	≥ 90 %	≥ 90 %	Realisasi 76,10%, Belum sesuai target pencapaian			
24	Pelayanan Hemodialisa	1. Pemberi pelayanan hemodialisa				2.	3.	4.
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan pelatihan hemodialisa (Min 1 orang dokter)	100 %	100%	Sesuai standar			
		D3 dengan Sertifikasi Hemodialisa	100 %	100%	Sesuai standar			
		5. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang Hemodialisa	100%	100%	Sesuai standar			
		6. Ketersediaan, Trolley, Alat dan Obat Emergency	100%	100%	Sesuai standar			
		7. Pemakaian Pin identitas petugas selama pelayanan	100%	95%	Realisasi 100%, terbangunnya komitmen penuh dari karyawan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan standard akreditasi, bahwa memperkenalkan nama petugas kepada pasien/keluarga dilaksanakan dengan memakai Pin identitas			
		8. Hand hygiene				9.	10.	11.



		Sebelum kontak dengan pasien	100%	80%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Sebelum melakukan tindakan aseptik	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah terkena cairan tubuh pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan pasien	100%	95%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		Setelah kontak dengan lingkungan pasien	100%	90%	Realisasi 100%, sehubungan dengan terjadinya Pandemi COVID-2019, terjadi kepatuhan terhadap protocol pencegahan COVID-19 yaitu 3 M, yang			



					salah satunya adalah mencuci tangan setiap saat			
		12. Kematian pasien di Unit Hemodialisa	≤ 2 0/00	≤ 2 0/00	Realisasi 0			
		13. Kejadian infeksi HAIs di Unit Hemodialisa	≤ 21 %	≤ 21 %	Realisasi 0			
		Kepuasan pelanggan	≥ 70 %	≥ 70 %	Realisasi 76,10%			



4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerrintah Nomor 2 Tahun 2018, jenis Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Jalan
2. Penataan Bangunan Gedung
3. Penataan Bangunan dan lingkungannya
4. Sistem Penyediaan Air Minum
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan serta Persampahan
6. Pembinaan Jasa Konstruksi
7. Operasional Kebersihan dan Pertamanan

Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Pengelolaan Air Limbah merupakan kewajiban Dinas PUTR untuk pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2020.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



Tabel. Target Pencapaian SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator SPM	Target SPM			
	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2020	2019
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih	96,16%	92,47%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.	Persentase Akses Sanitasi Layak	75,16%	74,68%

4.3.4 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

No	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator SPM	Target SPM 2020	Capaian SPM 2020
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih	96,16%	99,27%
5.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.	Persentase Akses Sanitasi Layak	75,16%	75,84%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Tabel. Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN TERSEDIA (RP)
1	Penyediaan air bersih	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 13.261.390.522,-
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp. 3.511.735.000,-
2	Penyediaan sanitasi	Persentase Akses Sanitasi Layak	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 13.261.390.522,-
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp. 3.511.735.000,-

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Untuk pencapaian target SPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh personil pada Bidang Cipta Karya Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel Daftar Jumlah Personil yang Terlibat dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Personil yang terlibat	Jumlah Personil (Org)
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Fasilitator Pamsimas	12 orang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Fasilitator Sanitasi	2 orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi



Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi masalah eksternal maupun internal. Adapun masalah dan kendala yang dihadapi adalah :

1. **Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.**
2. **Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.**

Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ada.

3. **Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM.**

Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 juga berdampak dalam pencapaian target SPM sehingga tidak maksimal pencapaiannya.

4. **Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM**



Indikator yang ada tidak sesuai dengan kondisi objektif di daerah, petugas pengampu SPM dari masing-masing SKPD sering berganti-ganti sehingga mengalami kesulitan dalam pemberian pemahaman untuk penerapan dan percepatan SPM.

- **Solusi Permasalahan**

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Melengkapi dan menyempurnakan ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengusulkan ketersediaan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.
3. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

4.4.2 Target Pencapaian SPM Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM		Target SPM		
	Sub Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2020	2019	2018
1	Perumahan Kawasan Permukiman	Ketersediaan Rumah Layak Huni	1	Rasio Rumah Layak Huni	0.2233	0.221	0.2178
		Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	2	Rasio Permukiman Layak Huni	96.82	96.79	96.76

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Realisasi untuk mencapai standar pelayanan minimal di dukung dengan program dan kegiatan serta Anggaran. Berikut adalah program dan kegiatan yang mendukung target pencapaian SPM dan Realisasi Anggaran

Tabel. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM		Realisasi SPM		
	Sub Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2020	2019	2018
1	Perumahan Kawasan Permukiman	Ketersediaan Rumah Layak Huni	1	Rasio Rumah Layak Huni	0.2461	0.245	0.2292
		Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	2	Rasio Permukiman Layak Huni	96.8094	96.8085	96.79

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Tabel Program dan Kegiatan pencapaian SPM Bidang perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tersedia
1.	Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	1. Program Pengembangan Perumahan	1. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 2. Pengelolaan PSU Perumahan dan MBR 3. Pengelolaan Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun 4. Penunjang Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya 5. Penunjang DAK Perumahan 6. Pengendalian Bidang Perumahan 7. Perencanaan Bidang perumahan 8. DAK Perumahan	5.596.986.020
			2. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pengelolaan Air Limbah Setempat	3.147.623.790
2.	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	Rasio Permukiman Layak Huni	1. Saluran Drainase dan Gorong	Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong Gorong Lingkungan	4.215.256.561
			2. Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	1.325.901.349

			3. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan Jalan Minapolitan	207.781.280
			4. Pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman	1. Koordinasi Bidang Kawasan permukiman 2. Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman 3. Penunjang pemanfaatan dan pengendalian Kawasan Permukiman 4. Penyusunan DED Kawasan Permukiman	



4.4.5 Dukungan Personil :

a. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

1. Aparatur Sipil Negara : 8 Orang-
2. Koordinator Fasilitator : 2 Orang
3. Tenaga Fasilitator Lapangan : 12 Orang

b. Penataan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha

1. Aparatur Sipil Negara : 7 Orang-

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan meliputi masalah eksternal maupun internal. Adapun masalah dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan.
2. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.
Ketersedian data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan yang ada.
3. Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM. Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk

percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain.

4. Akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* terjadi Refocussing Anggaran sehingga Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan APBD Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan.
5. **Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM.** Indikator yang ada tidak sesuai dengan kondisi objektif di daerah, petugas pengampu SPM dari masing-masing SKPD dalam pemberian pemahaman untuk penerapan dan percepatan SPM.

- **Solusi Permasalahan**

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Tahun 2020 Pendataan untuk Rumah Tidak layak Huni sudah dilakukan dengan dana Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga sudah di dapat data jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan kondisi 31 Desember 2020 sebanyak 11.310 unit
2. Melengkapi dan menyempurnakan ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengusulkan ketersediaan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.



4. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pencapaian target SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan.

4.5 URUSAN WAJIB SOSIAL

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 6 November 2008 mendefinisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Dalam peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 4 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana dengan indikator : jumlah korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial



Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pencapaian SPM urusan sosial tersebut diukur melalui pencapaian indikator di masing-masing jenis layanan, secara nasional indikator SPM sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

4.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10%	2020
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	25%	2020
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10%	2020
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2020
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	2020

4.5.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10%	1,35%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10 %	0 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10%	0,96%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Sosial pada tahun 2020 sebesar Rp 297.992.700,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD sebesar Rp 297.992.700,-
- b. APBN sebesar Rp. 0,-
- c. Sumber dana lain yang sah sebesar Rp 0,-



4.5.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial sejumlah 7 orang dengan Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH, Pendamping BPNT, Sakti Peksos, TKSK, TAGANA, dan PSM.

Dalam pelayanan pengaduan/laporan masyarakat telah dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani Orang Terlantar, Rekomendasi Jampersal, Rekomendasi PBI APBD, Permintaan pengusulan Basis Data Terpadu, Pengaduan Bantuan Sosial dan layanan kesejahteraan sosial lainnya.

4.5.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan sosial adalah :

- a. Belum semua PMKS dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penyalur bantuan harus terakreditasi dan penerima bantuan harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- b. Masih sedikitnya Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki sertifikat akreditasi sehingga tidak dapat diusulkan untuk penyaluran bantuan.

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah :

- a. Calon penerima bantuan yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- b. Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendaftarkan dan mengajukan ijin.

4.6 URUSAN WAJIB KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Wajib Ketenteraman dan Ketertiban



Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyelenggaraan urusan wajib tersebut akan diuraikan satu persatu berdasarkan Perangkat Daerah penyelenggara sebagai berikut:

4.6.a Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 121 Tahun 2018 tentang SPM sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 114 Tahun 2018 tentang SPM Sub Urusan Kebakaran. Satpolpp dan Pemadam Kebakaran Mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :

- i. Melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- ii. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- iii. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- iv. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- v. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah. Kewenangan Pemadam Kebakaran menurut PP.Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
- vi. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.



4.6.2 Target Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Selatan

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran telah memasukan target dalam RPJMD dengan Program Ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari segi penganggarnya tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Indikator	Target	Anggaran
1.	Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	79%	2.655.131.080,-
2.	Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			1.011.069.500,-
3.	Penanganan Tanggap Darurat	2. Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	0,65%	1.642.826.000,-

4.6.3 Realisasi pencapaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran pada tahun 2019 tidak terlepas dari peran serta positif dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi anggaran adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1.	Penegakan Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	70%
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	0,65%

4.6.4 Alokasi Anggaran



Alokasi anggaran Satpol pp dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2020 dibiayai dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Penegakan Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	1. Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	406.973.080,-
				2. Penertiban Pelanggaran Hukum Terhadap Ketentuan Pelanggar Perda	50.139.000,-
				3. Pembinaan dan Pembekalan Aparat linmas nagari dan kecamatan	175.880.000,-
			2. Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Forum Penegakan Perda	57.790.000,-
				2. Operasi Pengamanan Ivent-ivent Tertentu	13.394.500,-
				3. Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor dan objek Vital dan Asset Daerah	939.885.000,-
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Penanganan Tanggap Darurat	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	1.642.826.000,-



4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah pesonil atau pegawai yang terlibat dalam penerapan proses SPM. Untuk mencapai target SPM, Satpol pp dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh personil terdiri dari PNS dan Non PNS, sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorar	Jumlah
I	-	-	-
II	26	146	172
III	16	-	16
IV	4	-	4
TOTAL	46	146	192

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honorar	Jumlah
Laki-Laki	43	137	180
Perempuan	3	9	12
TOTAL	46	146	192

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :

Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi beberapa permasalahan Yaitu:

1. Luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari utara ke selatan menuntut pengawasan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang lebih maksimal;
2. Masih belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting ketentraman dan ketertiban umum, dan lebih cenderung mengedepankan arogansi dalam menjalankan tatanan kehidupan sosial, sehingga hal ini sedikit banyaknya akan menimbulkan gesekan yang bersifat horizontal;
3. Dukungan ketersediaan anggaran yang belum tersedia cukup untuk penyelenggaraan operasionalisasi baik berupa patroli rutin maupun



operasi penegakan aturan yang ditetapkan dalam standar pelayanan manusia;

4. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai untuk operasionalisasi penugasan personil ke lapangan sehingga sedikit banyaknya memperlambat pergerakan personil pada titik – titik yang telah direncanakan untuk operasi;
5. Minimnya kuantitas ketersediaan personil jika dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus diawasi dikarenakan posisi kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan daerah penyangga ibukota;
6. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki kurang memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam menghadapi tuntutan sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggara urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum.

b). Solusi :

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan beberapa kendala tersebut adalah:

1. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membuat Satpol pp tingkat kecamatan, sehingga lebih maksimalnya kinerja Anggota Satpol PP Pesisir Selatan dilapangan.
2. Perlunya lebih intens sosialisasi terkait Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat terkait untuk meminimalisasi kerugian masyarakat akibat bahaya kebakaran.
3. Memaksimalkan kondisi yang ada secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang baik dengan OPD terkait, sehingga pelaksanaan tugas-tugas operasional yang melibatkan personil dan menjadi tugas OPD terkait, apabila dimintakan bantuan personil Satpol PP, perjalanan dinas anggota menjadi tanggungjawab OPD tersebut.
4. Perlunya kendaraan patroli yang handal dilapangan mengingat banyaknya medan berat di lalui dilapangan untuk kelancaran mobilisasi Anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
5. Perlunya Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran di setiap Kecamatan.
6. Memaksimalkan kuantitas anggota yang dimiliki dan apabila ada perekrutan anggota harus sesuai dengan standarisasi anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
7. Memberdayakan dan meningkatkan keterampilan anggota Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan fisik dan kesamaptaaan serta pelatihan teknis fungsional Satpol PP dan Pemadam Kebakaran secara bertahap dan berkelanjutan.



4.6.b Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana menurut Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat :

- a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
- b. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setidaknya memuat :

- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- b. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
- c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
- d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
- e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
- f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat :

- a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
- b. Respon cepat darurat bencana
- c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
- d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

4.6.2 Target Pencapaian SPM

a. Target Pencapaian SPM Bidang Bencana

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	Level	4
2	Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	%	74
3	Pulihnya Daerah Terdampak Bencana	1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	%	23
		2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	%	95



b. Target Capaian

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya Risiko Bencana.		Indeks Risiko Bencana	190	180	175	170	165	160
		1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	2	3	3	4	4	5
		2.Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	70%	71%	72%	73%	74%	75%
		3.Pulihnya Daerah Terdampak Bencana	1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	10%	13%	17%	20%	23%	25%
			2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	75%	80%	85%	90%	95%	100%



c. Perhitungan Target Capaian dan Sasaran Kebencanaan

No	Program/ Kegiatan	Sasaran		Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Batas Waktu Capaian (Tahun)
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN						
1.	Penyusunan Data Base dan Kajian Resiko Ancaman Bencana	a.	Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan legal dan sah	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	2020
		b.	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan legal dan sah	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	2020
2.	Penyusunan Dokumen Rencana	a.	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulan	Persentase (%) penyelesaian dokumen	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	2020



	Penanggung- an Bencana		gan Bencana(RPB)	sampai dinyatakan legal dan sah		
3.	Penyediaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	a.	Terselenggar anya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	Persentase (%) jumlah Kepala Keluarga dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah KK didaerah rawan bencana yg memperoleh informasi}}{\text{Jumlah KK didaerah rawan bencana}} \times 100$	2019
4.	Pelatihan Kelembagaan Penunggaluan gan Bencana KSB, Relawan, TRC Daerah dan Satgas PB Kebencanaan	a.	Terselenggar anya pelatihan bagi aparatur yang menangani sub urusan bencana dan KK yang berada dikawasan	Persentase (%) jumlah aparatur dan KK yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Aparatur dan KK yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan KK didaerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019



			rawan bencana			
5.	Simulasi Kesiapsiagaan Kebencanaan	a.	Terlatihnya KK dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah KK yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah KK yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah KK di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019
6.	Pengelolaan Informasi Kebencanaan dan Operasional Pusdalops PB	a.	Tersedianya layanan Pusdalops PB	Persentase (%) jumlah KK yang mendapat layanan Pusdalops PB	$\frac{\text{Jumlah KK yang mendapat layanan Pusdalops PB}}{\text{Jumlah KK di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019
		b.	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh Pusdalops PB dalam penyiapan petugas penanganan	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times$	2019
7.	Penyediaan Peralatan	a.	Tersedianya peralatan	Persentase (%) jumlah KK	$\frac{\text{Jumlah KK yang mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah KK di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	2021



	Perlindungan dan Penyelamatan diri Terhadap Bencana		perlindungan terhadap bencana	yang mendapat peralatan perlindungan		
8.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/ Wabah	a.	Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon KLB kurang dari 24 jam}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
9.	Penyediaan Operasional Penanganan Kebencanaan	a.	Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 48 jam	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 48 jam untuk status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon status darurat bencana kurang dari 48 jam}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}}$	2020
		b.	Terlaksananya a pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	2020



4.6.3 Realisasi

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian
1.	Program Penanggulangan Kebencanaan	Persentase masyarakat yang mengikuti simulasi bencana dan mendapat informasi kebencanaan dan pertolongan	1,611.693,813	1.581.923.950	98,15
		Penyusunan Data Base dan Kajian Resiko Ancaman Bencana	Rp. 0	Rp. 0	95,62
		Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Rp. 0	Rp. 0	77,37
		Operasional dan Pemeliharaan Alat-alat Berat	Rp. 36.919.850	Rp. 36.346.500	98,45
		Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	Rp. 1.738.300	Rp. 1.738.300	100
		Operasional SAR & Tim Reaksi Cepat (TRC)	Rp. 1.144.522.913	Rp. 1.115.992.600	97,51
		Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	Rp. 30.535.000	Rp. 30.263.150	91,54
		Operasional Posko Piket Satgas SAR	Rp. 191.960.200	Rp. 191.960.200	99, 11
		Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten (COVID)	Rp. 103.252.150	Rp. 103.252.150	100
		Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian	Rp. 27.822.047	Rp. 27.745.000	87,50
		Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	Rp. 11.279.303	Rp. 10.992.750	97,46
		Operasional dan Perawatan Pudaltin	Rp. 63.664.050	Rp. 63.633.300	95,98



4.6.4 Alokasi Anggaran (Sumber APBD)

No	Program/ Kegiatan	Sasaran		Alokasi Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN			
1.	Penyusunan Data Base dan Kajian Resiko Ancaman Bencana	a.	Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)	Rp. 0
2.	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	a.	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana(RPB)	Rp. 0
3.	Operasional dan Pemeliharaan Alat-alat Berat	a.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Alat-alat Berat	Rp. 36.919.850
4.	Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	a.	Terselenggaranya Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (Kegiatan ini tidak bias dilaksanakan karan Pandemi COVID-19 Sehingga anggaran di Refokusing)	Rp. 1.738.300
5.	Operasional SAR & Tim Reaksi Cepat (TRC)	a.	Terselenggaranya Operasional SAR & Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Pesisir Selatan	Rp. 1.470.260.263
6.	Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	b.	Terselenggaranya Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	Rp. 30.535.000
7.	Operasional Posko Piket Satgas SAR	c.	Terselenggaranya Operasional Posko Piket Satgas SAR	Rp. 191.960.200
8.	Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten (COVID)	d.	Terselenggaranya Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten (COVID)	Rp. 103.252.150
9.	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian	a.	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian	Rp. 27.822.047



10.	Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	b.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	Rp. 11.279.303
11.	Operasional dan Perawatan Pudaltin	a.	Terselenggaranya Operasional dan Perawatan Pudaltin	Rp. 63.664.050



4.6.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh personil sebanyak 79 orang terdiri dari perempuan sebanyak 11 orang (13,92%), dan laki-laki 68 orang (86,07%). PNS sebanyak 25 orang dan Pegawai Kontrak 54 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 31 Desember 2020

NO	GOLONGAN	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
		II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	
1	GOLONGAN IV	1	3	2	0	0	6
2	GOLONGAN III	0	1	7	0	8	16
3	GOLONGAN II	0	0	0	0	2	2
4	GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0
5	Non PNS (PHL) Dan Satgas SAR dan TRC	0	0	0	55	0	55
	JUMLAH	1	4	9	55	17	79

Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Magister S2	5	20
2	Sarjana S1	18	72
3	SLTA	2	8

Pangkat dan golongan dari 25 orang PNS BPBD adalah sebagai berikut:

- a) Golongan II : 2 orang (8 %)
- b) Golongan III : 17 orang (68%)



c) Golongan VI : 6 orang (29%)

dengan jumlah Pejabat struktural pada BPBD sebanyak 14 orang.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Bencana Tahun 2020 adalah

- a. Pandemi COVID-19 ini banyak Program dan Kegiatan tidak terlaksana secara maksimal.
- b. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan kebencanaan
- c. Keterbatasan SDM dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang bencana
- d. Belum sinerginya upaya implementasi SPM

2. Solusi

- a. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Bencana sebagai salah satu **urusan wajib pelayanan dasar** yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara/masyarakat.
- b. Menambah jumlah SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang bencana

4.7 Program dan Kegiatan

A. Bidang Pendidikan Dasar

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah tahun 2020 yaitu pemberian Beasiswa bagi peserta didik miskin yaitu:

1. Beasiswa PIP sebesar Rp. 10.099.500.000,- bersumber dari APBN.
2. Beasiswa BAZNAS sebesar Rp. 1.080.900.000,- bersumber dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Bidang Kesehatan

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran 2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	17,220,500,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak (Jaminan Persalinan)	1,073,333,000,00
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	17,220,500,00
4	Pelayanan Kesehatan balita	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Usaha Kesehatan Ibu dan anak	17,220,500,00
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah (Prasekdam Usek)	1,817,750,00
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak menular (PTM)	85,706,277,00
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	7,593,000,00
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	85,706,277,00
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	85,706,277,00

10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	32,690,903,00
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	363,237,687,00
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik	363,237,687,00

C. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN TERSEDIA (RP)
1	Penyediaan air bersih	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 13.261.390.522,-
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp. 3.511.735.000,-
2	Penyediaan sanitasi	Persentase Akses Sanitasi Layak	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 13.261.390.522,-
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp. 3.511.735.000,-

D. Bidang Perumahan Dan Permukiman Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tersedia
1.	Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	1. Program Pengembangan Perumahan	1. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 2. Pengelolaan PSU Perumahan dan MBR 3. Pengelolaan Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun 4. Penunjang Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya 5. Penunjang DAK Perumahan 6. Pengendalian Bidang Perumahan 7. Perencanaan Bidang perumahan 8. DAK Perumahan	5.596.986.020
			2. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pengelolaan Air Limbah Setempat	3.147.623.790
2.	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni	Rasio Permukiman Layak Huni	1. Saluran Drainase dan Gorong	Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong Gorong Lingkungan	4.215.256.561
					1.325.901.349



	dan Berkelanjutan		2. Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	
			3. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan Jalan Minapolitan	207.781.280
			4. Pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman	1. Koordinasi Bidang Kawasan permukiman 2. Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman 3. Penunjang pemanfaatan dan pengendalian Kawasan Permukiman 4. Penyusunan DED Kawasan Permukiman	

E. Bidang Sosial

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Sosial pada tahun 2020 sebesar Rp 297.992.700,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD sebesar Rp 297.992.700,-
- b. APBN sebesar Rp. 0,-
- c. Sumber dana lain yang sah sebesar Rp 0,-



F. Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. SATPOL PP

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Penegakan Perda/Perkada	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	1. Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Penertiban Pelanggaran Hukum Terhadap Ketentuan Pelanggar Perda 3. Pembinaan dan Pembekalan Aparat linmas naggari dan kecamatan	406.973.080,- 50.139.000,- 175.880.000,-
			2. Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Forum Penegakan Perda 2. Operasi Pengamanan Ivent-ivent Tertentu 3. Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor dan objek Vital dan Asset Daerah	57.790.000,- 13.394.500,- 939.885.000,-
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Penanganan Tanggap Darurat	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	1.642.826.000,-

2. BPBD

No	Program/ Kegiatan	Sasaran		Alokasi Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN			
1.	Penyusunan Data Base dan Kajian Resiko Ancaman Bencana	a.	Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)	Rp. 0
2.	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	a.	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana(RPB)	Rp. 0
3.	Operasional dan Pemeliharaan Alat-alat Berat	a.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Alat-alat Berat	Rp. 36.919.850
4.	Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	a.	Terselenggaranya Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (Kegiatan ini tidak bias dilaksanakan karan Pandemi COVID-19 Sehingga anggaran di Refokusing)	Rp. 1.738.300
5.	Operasional SAR & Tim Reaksi Cepat (TRC)	a.	Terselenggaranya Operasional SAR & Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Pesisir Selatan	Rp. 1.470.260.263
6.	Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	b.	Terselenggaranya Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	Rp. 30.535.000



7.	Operasional Posko Piket Satgas SAR	c.	Terselenggaranya Operasional Posko Piket Satgas SAR	Rp. 191.960.200
8.	Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten (COVID)	d.	Terselenggaranya Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten (COVID)	Rp. 103.252.150
9.	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian	a.	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian	Rp. 27.822.047
10.	Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	b.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	Rp. 11.279.303
11.	Operasional dan Perawatan Pudaltin	a.	Terselenggaranya Operasional dan Perawatan Pudaltin	Rp. 63.664.050





BAB 5

PENUTUP

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020**

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Penyusunan LPPD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan secara teknis mempedomani Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Mendagri Nomor : 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020. Sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, LPPD Tahun 2020 dapat memberikan informasi yang utuh kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat untuk dapat memberikan penjelasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatulallahi Wabarakatuh





PUNCAK PAKU
mandor

**BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

tapem@pesisirselatankab.go.id